

DISERTASI

**PENGARUH ANGGARAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DALAM APBD KOTA DAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
KEMISKINAN
DI DAERAH PERKOTAAN INDONESIA**

A. HENY MULAWATI

P0500306034



**PROGRAM S3 ILMU EKONOMI
PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2011**

DISERTASI

PENGARUH ANGGARAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DALAM APBD KOTA DAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
KEMISKINAN
DI DAERAH PERKOTAAN INDONESIA

A. HENY MULAWATI

P0500306034



PROGRAM S3 ILMU EKONOMI
PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN
M A K A S S A R
2011

DISERTASI

**PENGARUH ANGGARAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT DALAM APBD KOTA DAN
DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KEMISKINAN
DI DAERAH PERKOTAAN INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

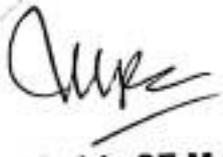
A. HENY MULAWATI NURDIN

Nomor Pokok : P0500306034

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Promosi
pada Tanggal 7 Februari 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui
Komisi Penasehat**


Prof. Dr. H. M. Yunus Zain, MA
Promotor


Dr. Madris, SE, M. Si
Ko - Promotor

**Ketua Program Studi
Ilmu Ekonomi**


Prof. Dr. H. Djabir Hamzah, MA

**Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Ir. Mursalim

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbilalamiin, puji dan syukur atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanuddin.

Ada motivasi yang sangat kuat dalam diri penulis untuk mengkaji dan mengungkapkan betapa permasalahan kemiskinan masih merupakan tantangan besar yang harus dihadapi bangsa ini, sehingga diperlukan pemikiran mendalam guna merumuskan solusi yang tepat bagi penanggulangannya. Disertasi ini cukup banyak mengulas hal tersebut terutama dikaitkan dengan anggaran pemberdayaan dan desentralisasi fiskal serta kinerja makro ekonomi. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tulisan ini yang disebabkan berbagai keterbatasan yang dimiliki.

Energi kekuatan dan ketegaran penulis dalam menghadapi berbagai kendala selama proses penyelesaian pendidikan program doktor ini bersumber dari dukungan dan motivasi berbagai pihak secara tulus. Untuk itu penulis mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih kepada :

Prof. Dr. H. Muhammad Yunus Zain, MA., Guru besar Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin selaku Promotor, dengan keluasan Ilmu dan wawasan yang beliau miliki serta kesabaran dan ketulusannya dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis, sehingga tulisan ini menjadi layak disebut sebagai disertasi, tanpa beliau disertasi ini tidak akan tersusun sebagaimana layaknya disertasi yang sesungguhnya.

Dr.Madris,DPS,SE,M.Si, Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, selaku ko-promotor, dengan pemahaman teori

yang mendalam telah membimbing penulis dalam membangun konstruk teori yang sesuai dengan model penelitian, kesediaan meluangkan waktu untuk konsultasi dengan penuh keramah-tamahan dan motivasi, menjadi pemicu semangat penulis untuk dapat menyelesaikan disertasi ini dengan segera.

Prof. Dr. H.Latanro, Prof.Dr.H.Andi Munarfah, MS., Prof. Dr. I Made Benyamin, M.Ec., Prof.Dr. Hj. Rahmatia, MA., dan Dr. Michael M. Papayungan, MA. sebagai tim penguji, dengan cermat dan bijaksana telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga dalam setiap tahapan perbaikan mulai dari proposal penelitian hingga penyusunan disertasi ini.

Prof.Dr.Hj.Rahmatia,MA, Ketua Jurusan pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, yang telah meniupkan semangat *gender equity* dalam diri penulis, sehingga sangat termotivasi untuk secepatnya menyelesaikan disertasi ini.

Prof. Dr. H. Djabir Hamzah, MA., Guru besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Ketua Program Studi S3 Ilmu Ekonomi

Bapak dan Ibu dosen pada Program Doktor bidang Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. H. Basri Hasanuddin, MA., Prof. Dr. Wim Poli., Prof. Dr. H. Latanro, Prof. Dr. H. Halide, Prof. Dr. H. A. Karim Saleh, Dr. Michael M. Papayungan MA., Prof. Dr. H. Djabir Hamzah, MA., Prof. Dr. I Made Benyamin, M.Ec. Prof. Dr. H. Muhammad Yunus Zain, MA., Prof.Dr.Osman Lewangka, MA, Prof.Dr.Hj.Rahmatia,MA, Prof.Dr.Gagaring Pagalung yang telah banyak memberikan Filsafat Ilmu, Konstruksi Teori, Teori Ekonomi, Metode Kuantitatif dan Metode Riset.

Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi dan Prof.Dr.H.Muhammad Ali, M.Si, Dekan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin

Bupati Bone , Bapak H.Andi Muhammad Idris Galigo,SH dan Ibu Hj.Andi Warnawati Idris, atas dukungan dan restunya sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan.

Kepala Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone, Bapak Prof.H.Dr.Murtir Jeddawi,S.H,S.Sos,M.Si, yang telah memberi dukungan dan motivasi sepenuh hati kepada penulis selama masa pendidikan, " *he is the most apprehensive leader that I ever met*"

Rekan-rekan mahasiswa S3 Tahun 2006 : Dr.Amron, Dr.Ronny, Dr.Murtiadi, Dr.Baso Amang, Jamaluddin Sawaji, A.Djam'an, Rahman Suwandar, M.Yahya, Ahmad Syarif, Erlina Pakki, Rahmat Budi Santoso, dan A.Mardiana, sobat seperjuangan yang selalu saling membantu di masa perkuliahan dan detik-detik menghadapi ujian prelium.

Kakanda Dr.Muh.Rum,SE., M.Si , teman diskusi yang kritis tapi humoris dan telah banyak memberi masukan dalam penulisan disertasi ini. Pak Zainuddin Saenong, yang selalu memberi nasihat untuk tetap bersemangat menghadapi semua tantangan.

Dr.Sumardi,SE,M.Si, Dosen Tetap Fakultas Ekonomi, Sekretaris Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin , beserta staf administrasi Pak Fahrudin, Bu Susi, Pak Jamal, yang telah membantu dalam proses administrasi sehingga semua tahapan ujian dapat terlaksana dengan baik.

Rekan-rekan Kerja di Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone, terutama Sekretaris Bappeda H.Kaharinuddin,S.Sos,M.Si yang tidak pernah bosan membantu menyelesaikan tugas penulis dan secara khusus kepada para staf bidang Ekonomi: Andi Hidayat,SE, Muh.Rusli,SKM,M.Si, A.Andry Pratama,SH, Sumarni (Oshin), A.Hendra Setiawan,S.Pt, dan A.Tenri Burhanuddin, SP, M.Si, atas pengertian dan bantuannya selama penulis menjalani pendidikan sehingga tugas-tugas kantor dapat terlaksana dengan baik.

Kedua orang tua tercinta , Ayahanda Alm.Andi Nurdin Wahiduddin dan Ibunda R.Ayu Hasijah Koesoemowijoyo yang telah memberi coretan

dan warna dalam hidup penulis sehingga memiliki motivasi belajar yang tinggi dan dapat menjalani kehidupan ini sebagaimana yang diridhoi Allah SWT, sungguh suatu anugrah dapat terlahir sebagai anak ayah dan bunda.

Kedua Mertua yang terhormat, Alm.Andi Passamula Pt.Rani dan Almh.Hj.Andi Kiding Pt.Nisang, yang semasa hidupnya senantiasa memberikan dukungan untuk tetap melanjutkan pendidikan, tanpa restu beliau penulis tidak akan pernah mencapai semuanya.

Andi Ansaruddin,SE, suami terkasih yang selalu setia mendampingi dan memberi dukungan moril, materil dalam mewujudkan semua obsesi istrinya. Anak-anakku tercinta : Dini, Dila, Sizy, Lulun, Keyzar dan Ona, yang begitu tabah dan penuh pengertian serta tidak pernah protes terhadap kesibukan mamanya dan tetap menjadi anak-anak yang manis dan patuh.

Saudara dan saudariku: Ir.Andi Ali Imran,MT, Andi Heliyah Suryaningsih, Andi Atikah Rahmatia,Amd.Fis, Andi Aminah,S.Sos, Mayor Andi Evi Kemala Dewi,S.Psi, Andi Farid S.Alim,ST. Serta para ipar : Hj. Andi Army Passamula, Almh.Hj.Andi Nurhana Passamula, Hj. Andi Murni Passamula, Hj.Andi Bansuhari Passamula, Asih Sumari, Kasman, Sudarsono,SE, Mayor Heru Syamsu Hidayat, S.Si, Asfiaty Fahmi,SE, atas dukungan dan doanya.

Segenap keluarga, rekan, sahabat dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta mendoakan keberhasilan penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya dan membimbing kita semua dalam jalan yang diridhoinya.

Makassar, 31 Januari 2011

A.Heny Mulawati Nurdin

ABSTRAK

A. HENY MULAWATI. *Pengaruh Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam APBD Kota dan Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan Daerah Perkotaan di Indonesia* (dibimbing oleh Muhammad Yunus Zain dan Madris).

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) pengaruh anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat terhadap kemiskinan perkotaan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, investasi, PAD dan pengangguran, (2) pengaruh dana desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan perkotaan di Indonesia baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, investasi, PAD dan pengangguran, (3) pengaruh investasi terhadap kemiskinan baik secara langsung, maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, PAD dan pengangguran, (4) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan perkotaan di Indonesia baik secara langsung, maupun secara tidak langsung melalui investasi, PAD dan pengangguran, dan (5) pengaruh PAD terhadap kemiskinan perkotaan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengangguran.

Dalam estimasi regresi digunakan *pooling data* untuk *cross-section* (24) dan *time series* (5) sehingga jumlah observasi menjadi $n = 120$. Populasi penelitian adalah daerah perkotaan di seluruh Indonesia. Sampel sebesar 24 kota dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. *Kedua*, investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. *Ketiga*, dana desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap kemiskinan perkotaan. *Keempat*, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. *Kelima*, PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan daerah perkotaan



ABSTRACT

A. HENY MULAWATI. *The Impact of Social Economic Empowering Budget on Local Budget (APBD) ; and the Impact of Fiscal Decentralization on Urban Poverty in Indonesia* (Supervised by **Muhammad Yunus Zain and Madris**)

The objectives of this study are to analyze: (1) the influence of social economic empowering budget on urban poverty, either directly or indirectly, through economic growth, investment, local generated revenue (PAD), and unemployment; (2) the influence of fiscal decentralization fund on urban poverty, either directly or indirectly, through economic growth, investment, local generated revenue, and unemployment; (3) the influence of investment on poverty, either directly or indirectly, through economic growth, local generated revenue, and unemployment; (4) the influence of economic growth on urban poverty in Indonesia, either directly or indirectly, through investment, local generated revenue, and unemployment; and (5) the influence of local generated revenue on urban poverty, either directly or indirectly, through economic growth, investment, and unemployment.

In the regression estimation (SEM), the researcher used cross-section (24) and time series (5) so that the number of observation was 120 ($n = 120$). The research population includes all urban areas in Indonesia. 24 cities were chosen as samples by using purposive sampling.

The results reveal that: (1) social economic empowering budget does not have any influence on the poverty; (2) investment has a significant negative influence on the poverty; (3) fiscal decentralization fund does not have any influence on urban poverty; (4) economic growth does not have any influence on the poverty; and (5) local generated revenue does not have significant influence on the poverty in urban areas.

Keywords: economic empowering budget, investment, fiscal decentralization, unemployment, local generated revenue, poverty



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	24
C. Tujuan Penelitian	26
D. Kegunaan Penelitian	27
E. Ruang Lingkup Penelitian	28
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Beberapa Ulasan tentang Masalah Pentingnya Anggaran Pemerintah dalam Suatu Perekonomian	29
1. Keterkaitan Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Pertumbuhan Ekonomi	33
2. Keterkaitan Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Investasi	38
3. Keterkaitan Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Pendapatan Asli Daerah.....	39
B. Beberapa Ulasan tentang Masalah Desentralisasi Fiskal Bagi Perekonomian Daerah perkotaan	44
1. Keterkaitan Desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi	47
2. Keterkaitan Desentralisasi Fiskal dengan Investasi	50
3. Keterkaitan Desentralisasi Fiskal dengan PAD	51
4. Keterkaitan Desentralisasi Fiskal dengan Kemiskinan dan Pengangguran	52
C. Beberapa Ulasan tentang Kinerja Makroekonomi Daerah Perkotaan	54
1. Keterkaitan Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi	58
2. Korelasi Investasi dengan Pendapatan Asli Daerah	61

3. Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah	62
4. Hubungan Investasi dengan Pengangguran dan Kemiskinan Daerah Perkotaan	65
5. Keterkaitan pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran dan Kemiskinan	71
D. Beberapa Hasil Studi Empiris Sebelumnya	74
BAB III. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kerangka Konseptual	88
B. Hipotesis Penelitian.....	98
BAB IV. METODE PENELITIAN	
A. Disain penelitian	99
B. Daerah penelitian	99
C. Populasi dan Sampel	102
D. Instrumen Pengumpulan Data	103
E. Model dan Teknis Analisis Data	104
F. Definisi Operasional Variabel	116
BAB V. HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kinerja Makroekonomi Perkotaan di Indonesia	132
1. Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perkotaan	132
2. Kinerja Makroekonomi dan Kemiskinan di Perkotaan Indonesia	136
B. Deskripsi Variabel Penelitian	140
1. Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam APBD	140
2. Investasi PMDN dan PMA di Daerah Perkotaan Indonesia	144
3. Pendapatan Asli Daerah Perkotaan	147
4. Desentralisasi Fiskal Daerah Perkotaan	149
5. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Perkotaan	150
6. Pengangguran di Daerah Perkotaan Indonesia	153
7. Kemiskinan di Daerah Perkotaan Indonesia	154
C. Hasil Estimasi Pengaruh Antara Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Dana Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan Daerah Perkotaan	156
1. Hasil Estimasi Pengaruh Antara Koefisien Variabel Eksogen dengan Variabel Endogen	156

2. Hasil Estimasi Pengaruh Langsung dan Tidak langsung Antara Variabel Eksogen dengan Endogen	164
--	-----

BAB VI. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis dan Implikasi Pengaruh Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terhadap Kemiskinan di daerah Perkotaan	168
1. Pengaruh Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi	168
2. Pengaruh Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terhadap Investasi	172
3. Pengaruh Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD)	173
4. Pengaruh Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terhadap Pengangguran	175
5. Pengaruh Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terhadap Kemiskinan Daerah Perkotaan	179
B. Analisis dan Implikasi Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi,Investasi, PAD dan Pengangguran	181
1. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi	181
2. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Investasi	182
3. Pengaruh desentralisasi Fiskal terhadap Pengangguran	185
4. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan	186
C. Analisis dan Implikasi Pengaruh Investasi terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan Pengangguran	
1. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi	188
2. Pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah	190
3. Pengaruh Investasi terhadap Pengangguran	190
4. Pengaruh Investasi terhadap Kemiskinan Perkotaan	193

D. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Daerah Perkotaan Melalui PAD dan Pengangguran	
1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap PAD	196
2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran	198
3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan.....	200
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengangguran.....	207
5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemiskinan Perkotaan.....	209
E. Keterbatasan Penelitian.....	214
BAB VII. PENUTUP	
1. Simpulan	216
2. Saran	218
DAFTAR PUSTAKA	221
LAMPIRAN	239



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Indikator Pembangunan Indonesia 2004-2010	14
Tabel 2. Hasil Studi Empiris Sebelumnya	81
Tabel 3. Kedudukan Variabel Penelitian, Sifat Pengaruh antar Variabel dan Penelitian yang Mendukung , Variabel eksogen	96
Tabel 4. Kedudukan Variabel Penelitian, Sifat Pengaruh antar Variabel dan Penelitian yang Mendukung , Variabel endogen	97
Tabel 5. Kota Lokasi Penelitian	101
Tabel.6 . Persentase Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Dalam APBD	135
Tabel 7. Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Dalam APBD Kota	142
Tabel 8. Investasi Kota Tertinggi	145
Tabel 9. Tabel Investasi Kota Terendah.....	146
Tabel 10. PAD Kota Tertinggi.....	148
Tabel 11. PAD Kota Terendah.....	148
Tabel 12. Dana Desentralisasi Fiskal	150
Tabel 13. Pertumbuhan Ekonomi Kota-kota di Indonesia , Kategori Tinggi dan Rendah	151
Tabel 14. Angka Pengangguran	154
Tabel 15. Angka Kemiskinan	155
Tabel 16. Hasil Uji Kesesuaian Model	157
Tabel 17. Hasil Estimasi Nilai-Nilai <i>Intercept</i> Berdasarkan Model SEM	158

Tabel 18. Koefisien Estimasi Hubungan Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan Daerah Perkotaan	159
Tabel 19. Pengaruh Langsung dan Tak Langsung Antara Variabel Eksogen dengan Variabel Endogen	165

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kemiskinan Indonesia Tahun 1976- 2010	2
Gambar 2. Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan 2000-2010.....	3
Gambar 3. Persentase Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Dalam APBD	11
Gambar 4. Hubungan Antara Dana Transfer dengan Penduduk Miskin	12
Gambar 5. Korelasi Antara Dana Transfer dengan Pertumbuhan PDRB	14
Gambar 6. Tren Pertumbuhan Ekonomi dikaitkan dengan Kemiskinan	15
Gambar 7. Kurva Diagram Sebaran antara Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	22
Gambar 8. Kerangka Konseptual	95
Gambar 9. Model Struktural Penelitian	106
Gambar 10. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	139
Gambar 11. Hasil Estimasi Pengaruh Antara Variabel Eksogen dan Endogen	160
Gambar 22. Hubungan Anggaran Pemberdayaan dan Kemiskinan	153
Gambar 23. Hubungan Desentralisasi Fiskal dan Kemiskinan Perkotaan	154
Gambar 24. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kota-Kota di Indonesia (Th.2004-2008).....	156
Gambar 25. Perkembangan PAD dan Kemiskinan Kota-Kota di Indonesia	158

BAB I

PENDAHULUAN

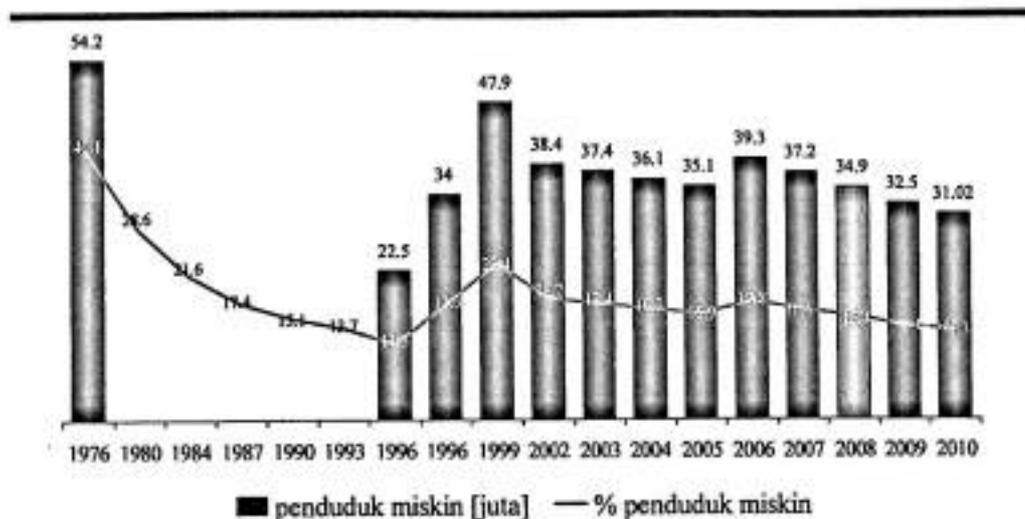
A. LATAR BELAKANG MASALAH

Fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama, walaupun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanggulangnya, namun sampai saat ini masih terdapat lebih dari 1,2 milyar penduduk dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari satu dolar perhari dan lebih dari 2,8 milyar penduduk dunia hanya berpenghasilan kurang dari dua dollar perharinya dan hidup dibawah tingkat pendapatan riil minimum internasional. Garis tersebut tidak mengenal tapal batas antar negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan perkapita di suatu negara dan juga tidak memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara.

Terlebih bagi Indonesia, sebagai sebuah negara berkembang, masalah kemiskinan adalah permasalahan yang sangat penting dan pokok dalam pembangunan. Kemiskinan memang bukan masalah baru, sejak Bangsa Indonesia merdeka, cita-cita bangsa adalah mensejahterakan seluruh rakyat, karena kenyataan yang dihadapi adalah kemiskinan diderita oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Hampir setiap pemimpin di Indonesia, selalu menghadapi kenyataan ini, sehingga kemiskinan menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai *nation state*, sejarah sebuah negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan, hal tersebut terlihat dari persetase kemiskinan

yang walaupun mengalami penurunan namun lajunya sangat kecil sebagaimana terlihat dalam Gambar 1 berikut :

Gambar 1. Kemiskinan Indonesia Tahun 1976- 2010, Data Makro



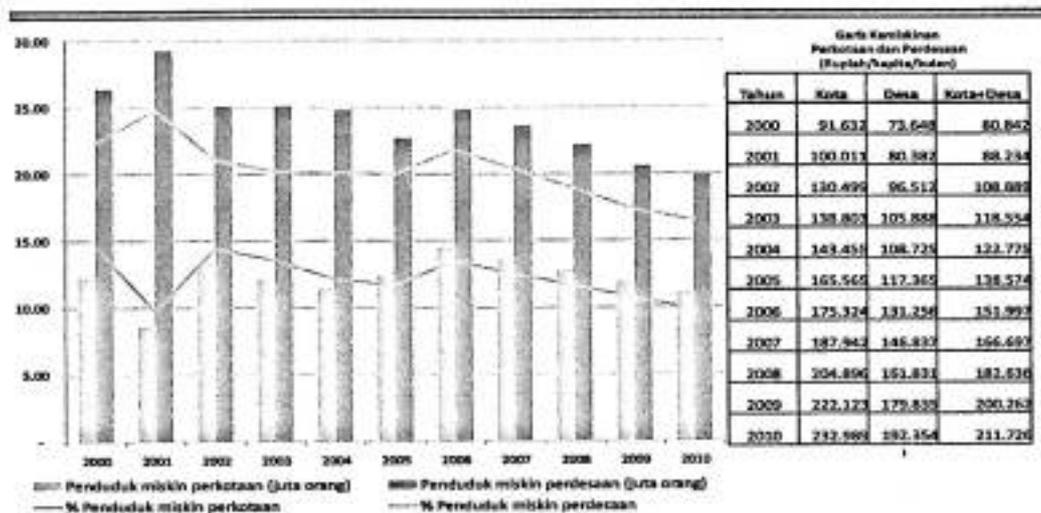
Sumber : BPS, Jakarta

Terlihat pada Gambar 1 diatas, jumlah penduduk miskin Indonesia Tahun 2004 mencapai 36,1 juta jiwa atau 16,7% dan Tahun 2008 sebesar 34,9 juta atau 15,42% dengan demikian dalam kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan sangat kecil hanya 1,18% . Walaupun pemerintah selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun, jumlah penduduk miskin Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan. Memang data di BPS menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin, namun secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata bahkan kondisi masyarakat miskin tidak semakin membaik.



Secara khusus di daerah perkotaan, kemiskinan dan pengangguran telah menjadi permasalahan yang sangat krusial dan sulit untuk ditanggulangi, kondisi kemiskinan perkotaan di Indonesia terlihat pada Gambar 2. berikut :

Gambar 2. Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan Th. 2000-2010



Sumber : Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Bappenas 2010

Gambar 2. diatas menunjukkan bahwa berdasarkan garis kemiskinan nasional perkotaan dan perdesaan, dalam kurun waktu Tahun 2000-2010 telah terjadi penurunan angka kemiskinan secara nasional, namun jumlah kemiskinan di perkotaan berfluktuasi dan hampir tidak terjadi penurunan jumlah yang signifikan. Ini berarti terjadinya tren penurunan yang cukup besar di Indonesia hanya terdapat di pedesaan. Bahkan secara persentase terhadap total kemiskinan di Indonesia, kemiskinan di perkotaan selama satu dekade ini cenderung tidak

menunjukkan penurunan berarti. Sejak Tahun 2000 persentase penduduk miskin perkotaan terhadap total penduduk miskin Indonesia ternyata hampir tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun , yaitu tetap dalam kondisi dimana rata-rata setiap tahunnya hampir seperempatnya (25,02%) berada di daerah perkotaan.

Sejak awal kemerdekaan telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui berbagai program pembangunan. Misalnya, dibidang pendidikan, pemerintah mencanangkan pemberantasan buta huruf dan tidak terbatas di sekolah formal saja, namun juga secara non-formal. Di era Bung Karno, anak-anak usia sekolah dipaksa agar masuk sekolah. Di era Pak Harto, dicanangkan wajib belajar sembilan tahun, dan hasilnya luar biasa. Hal ini ditunjukkan pada peningkatan peserta pendidikan dasar dari 62 persen anak-anak pada tahun 1973 menjadi lebih dari 90 persen pada tahun 2003. Namun, sampai saat ini tingkat buta huruf dilaporkan masih cukup tinggi di Indonesia, yaitu meliputi sekitar 5,9 juta orang yang berumur antara 10-44 tahun.

Di bidang kesehatan, pemerintah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperkenalkan sistem santunan sosial. Di era Orde Baru, sejak 1970-an, dikenalkan pusat pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan (Puskesmas) agar lebih mudah terjangkau oleh masyarakat desa. Belakangan dibentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap desa.

Pada awal 1990-an pembangunan pusat kesehatan masyarakat meningkat lebih tinggi daripada rumah sakit. Penempatan bidan di desa yang mendidik kader-kader dari kalangan penduduk desa sendiri, dan mendampingi kader dalam kegiatan rutin posyandu, menunjukkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Kaderisasi semacam ini meningkatkan peluang keberlanjutan program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Berencana juga merupakan program strategis untuk mengurangi tingkat kemiskinan keluarga.

Melalui program transmigrasi, penduduk miskin dari daerah padat diberi peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Pembukaan dan pengembangan tanah pertanian baru diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja para transmigran.

Selanjutnya, melalui *Small Enterprise Development Project* (SEDP) dari Bank Dunia dilaksanakanlah program kredit likuiditas Bank Indonesia berupa Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) pada tahun 1974 sampai awal 1990-an. Melalui paket 29 Januari 1990, pola kredit usaha kecil diwujudkan dalam KUK (Kredit Usaha Kecil) yang merupakan kredit komersial. KUK ditetapkan sebesar 20 persen dari portofolio kredit bank yang menyalurkannya. Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1232/1989, BUMN diwajibkan untuk menyisihkan 1-5 persen labanya bagi pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK). Fasilitas lainnya lagi adalah kredit usaha tani (KUT)

yang mulai dilaksanakan tahun 1985 dan merupakan bantuan modal kerja bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan juga diluncurkan berbagai Inpres, seperti Inpres Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres Pasar, Bangdes, dan yang cukup terkenal adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT). Juga terdapat program-program pemberdayaan lainnya seperti Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), P2KP, PPK, CERD, SPADA, PEMP, WSSLIC, P2MPD, yang paling populer saat ini adalah PNPB dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Hingga saat ini, hampir semua departemen mempunyai program penanggulangan kemiskinan, dan anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan program-program tersebut telah mencapai puluhan triliun rupiah. Pertanyaannya kini adalah seberapa besar efek pemberdayaan yang telah ditimbulkan berbagai program tersebut pada lapisan masyarakat miskin yang menjadi sasarannya ?

Bila pemerintah pusat telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan anggaran belanja yang demikian besar, dan ternyata belum berpengaruh signifikan terhadap penurunan

kemiskinan, apakah pemerintah daerah/ kota juga melakukan hal yang sama?.

Dalam tataran konsep, semua pemerintah daerah/kota berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakatnya, hal tersebut dituangkan dalam RPJMD daerah/kota yang memuat berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi Kesejahteraan sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat, akan tetapi pada tahap implementasi hal tersebut sangat diragukan bila dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih sangat jauh dari kategori sejahtera.

Di era otonomi daerah, kewenangan pengambil keputusan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sepenuhnya ada pada pemerintah daerah/kota dan legislatifnya termasuk dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan dan salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat miskin.

Instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan adalah Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah, sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral, anggaran harus memuat kinerja baik untuk penilaian secara

internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Akan tetapi, anggaran belanja daerah/kota tersedia terbatas sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan relatif banyak. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu melakukan penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan dimana penyusunannya berdasarkan kriteria yang terukur dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menunjang implelementasi program pembangunan tersebut.

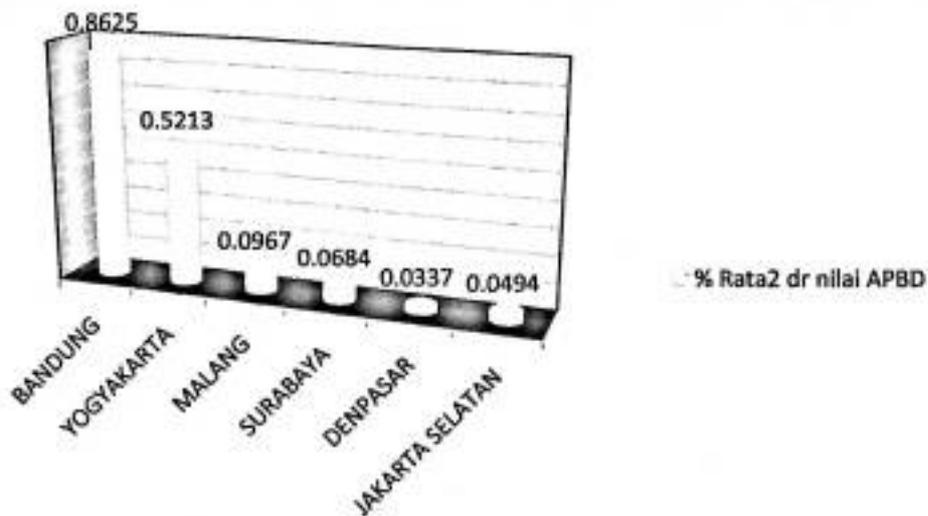
Anggaran belanja pembangunan dikeluarkan oleh pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena belanja pembangunan memang dimaksudkan untuk peningkatan pelayan publik. Salah satu bentuk anggaran belanja pembangunan tersebut adalah anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang seharusnya memiliki korelasi dengan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran.

Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam APBD diperuntukkan bagi program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro. Oleh karena teori-teori ekonomi makro, umumnya bersandar pada peran pasar dalam alokasi sumber daya, serta dengan pra-anggapan bahwa kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat akan

menguntungkan semua lapisan masyarakat, dalam kenyataannya tidak dapat menghasilkan jawaban yang memuaskan bagi masalah kesenjangan. Kekuatan sosial yang tidak berimbang, menyebabkan kegagalan pasar untuk mewujudkan harapan itu (Brown, 1995). Sehingga, diperlukan intervensi yang tepat, agar kebijaksanaan pada tingkat makro mendukung upaya mengatasi kesenjangan yang harus dilakukan dengan kegiatan yang bersifat mikro dan langsung ditujukan pada lapisan masyarakat terbawah melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Anggaran belanja daerah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, Saragih (2003) pengeluaran pemerintah seharusnya lebih banyak diperuntukkan bagi program-program kepentingan masyarakat. Stine (1994) Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. Akan tetapi fenomena yang terjadi di daerah saat ini, anggaran belanja daerah lebih banyak digunakan sebagai belanja rutin untuk membiayai belanja aparat pemerintah yang relatif kurang produktif dan anggaran untuk belanja publik minim, hal tersebut terlihat antara lain pada anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dialokasikan dalam APBD kota rata-rata tidak lebih dari 0,007 persen dan hanya beberapa kota besar seperti Bandung, Surabaya, Jakarta Selatan dan Yogyakarta yang mengalokasikan anggaran dengan persentase yang cukup signifikan dari nilai APBD kota sebagaimana terlihat pada Gambar 3. berikut:

Gambar 3. Persentase Anggaran Pemberdayaan Ekonomi dalam APBD Kota



Sumber : Dokumen APBD(2004-2008) Lokasi Penelitian, diolah

Gambar 3. diatas menunjukkan bahwa hanya kota Bandung yang mengalokasikan anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat hampir sebesar 1 persen dari nilai APBD Kota, sedangkan kota lain mengalokasikan anggaran sangat minim.

Selain anggaran pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan desentralisasi fiskal juga diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan, karena melalui hal tersebut pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi, Oates (1993). Akan tetapi desentralisasi fiskal di

negara-negara berkembang apabila tidak berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi.

Hubungan antara desentralisasi fiskal dengan penanggulangan kemiskinan bersifat *ambiguous*. Pada beberapa negara miskin kualitas institusi dan adanya konflik politik menyebabkan kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak mencapai sasaran. Dampak kemiskinan terhadap desentralisasi tergantung oleh kualitas infrastruktur sebuah Negara (Jutting, et al, 2004)

Terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik ditegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linear* dan *asymmetric*. Holtz-Eakin *et.al.*, (1985) dalam Darwanto (2007)

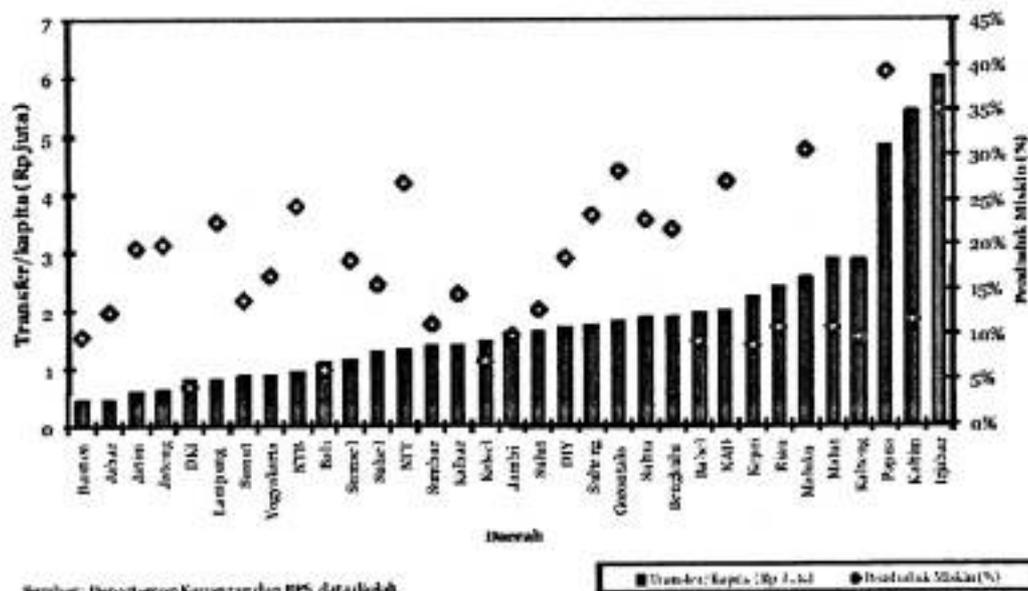
Pengaruh fiskal desentralisasi terhadap pajak lokal dan besarnya pengeluaran sektor publik menjadi perdebatan bagi para ahli (Wilson, 1999), menurut Lewis (2001), hal ini terjadi karena Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi sumber utama pendapatan daerah pada umumnya sebagian besar akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, sehingga anggaran untuk pembangunan menjadi kecil.

Sejalan dengan peningkatan sumber-sumber pendanaan daerah yang dilaksanakan melalui desentralisasi fiskal, perekonomian Indonesia



dan tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun peningkatan transfer dari Pemerintah ke daerah diiringi juga dengan perbaikan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, namun apabila dilihat dari kondisi pada setiap daerah dan korelasi antara transfer dengan tingkat kesejahteraan masyarakat secara nasional menunjukkan perbaikan, namun tidak semua daerah mengalami perbaikan, bahkan 18 provinsi mengalami peningkatan persentase penduduk miskin. Peningkatan transfer diiringi dengan perbaikan tingkat kesejahteraan, namun korelasinya sangat rendah. Korelasi antara transfer per kapita dengan persentase penduduk miskin di 33 provinsi selama tahun 2006-2007 menunjukkan angka korelasi kurang dari 0,5 bahkan mendekati 0 (nol). Hubungan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4. berikut ini :

Gambar 4. Hubungan antara Dana Transfer dengan penduduk miskin



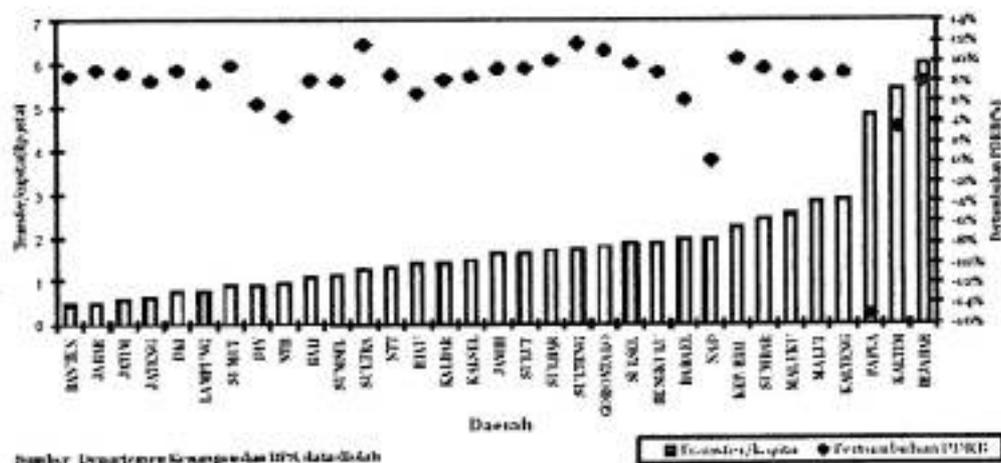
Sumber: Departemen Keuangan dan BPS, data tidak

Pada Gambar 4. terlihat bahwa untuk beberapa daerah yang rata-rata transfer per kapitanya tinggi ternyata justru menunjukkan rata-rata persentase penduduk miskin yang tinggi pula. Hal tersebut menunjukkan bahwa transfer pemerintah ke daerah masih terkonsentrasi pada daerah-daerah yang tingkat kesejahteraannya masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan transfer dana ke daerah belum berpengaruh secara langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat

Untuk itu, pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya mengupayakan agar dana desentralisasi dapat dimanfaatkan secara lebih baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan terlihat hubungan yang lebih jelas dan kuat antara pelaksanaan desentralisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambaran yang tidak terlalu berbeda juga dapat dilihat dari pola hubungan antara transfer pemerintah dan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

Gambar 5. Korelasi antara Dana Transfer dengan Pertumbuhan PDRB

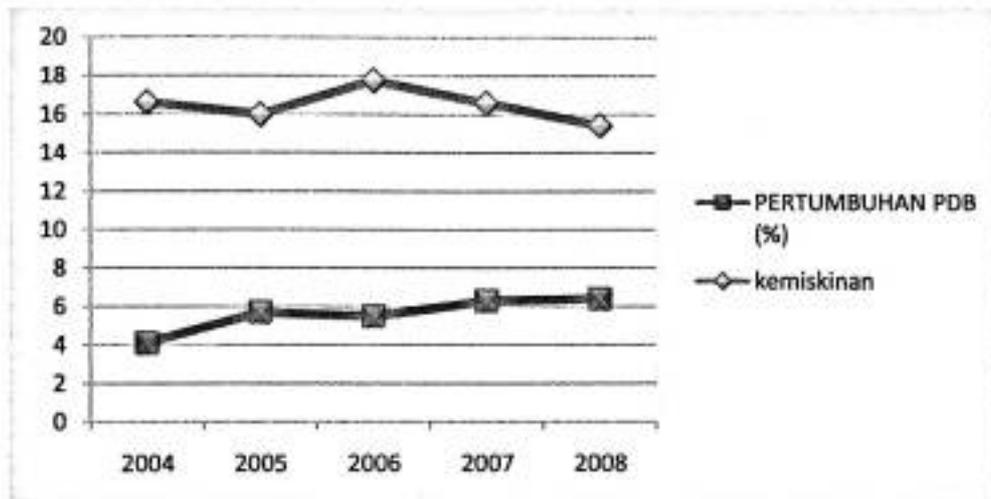


Dalam Gambar.5 diatas terlihat bahwa pada tahun 2006-2008, daerah yang menerima transfer per kapita tinggi adalah daerah yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah. Hal ini menunjukkan pemerintah dan pemerintah daerah belum memanfaatkan pola belanja daerah secara lebih efektif dalam mendorong perekonomian daerah. Sehingga, daerah yang mendapatkan transfer yang lebih tinggi mampu secara riil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih optimal.

Selama ini kinerja makroekonomi merupakan indikator yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah, demikian pula halnya dengan kota-kota di Indonesia. Pemerintah kota selalu menunjukkan kesuksesan pembangunan kotanya dengan mengemukakan capaian kinerja makro ekonomi yang bagus, namun di sisi lain, capaian indikator mikro yang terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat terabaikan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kinerja makro ekonomi yang dapat menjadi barometer seberapa besar pencapaian pembangunan ekonomi, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi stabil, investasi tinggi, inflasi rendah, pengangguran dan kemiskinan semakin menurun, tren pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan kemiskinan di Indonesia sebagai berikut :

Gambar 6. Tren pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan kemiskinan



Sumber : BPS Jakarta, diolah

Dalam Gambar 6 diatas pertumbuhan ekonomi terlihat relatif stagnan dan angka kemiskinan tidak menunjukkan penurunan yang signifikan, hal tersebut ditunjukkan dengan jelas oleh data indikator pembangunan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Indikator Pembangunan Indonesia Tahun 2004-2010

Indikator Pembangunan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 APBN-P
Pertumbuhan	4.1	5.7	5.5	6.3	6.3	4.3	5.8
Inflasi	6.4	17.1	6.6	6.6	12.5	6.2	5.3
Kemiskinan	16.60	15.97	17.75	16.98	15.42	14.15	13.33

Sumber : BPS, Jakarta, 2010

Pada Tabel 1. diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2004-2008 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga 6,3 % dan sedangkan angka kemiskinan berfluktuasi, dan Tahun 2007 mengalami peningkatan hingga 17,75%, walaupun terjadi pertumbuhan yang signifikan pada periode 2007-2008 namun kemiskinan mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan hanya sekitar 1,2%.

Dalam teori ekonomi pembangunan dinyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Aliran Keynesian menunjukkan bahwa pembelanjaan pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini menjelaskan bahwa dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan permintaan berbagai barang dan jasa yang diproduksi perekonomian secara agregat, sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian.

Implikasi kebijakan dari adanya hubungan timbal balik antara anggaran pengeluaran pemerintah dan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pada pembuatan proyeksi/perkiraan kebutuhan anggaran pembangunan tahunan dan target pertumbuhan ekonomi. Dengan memegang asumsi bahwa hubungan timbal balik tersebut terjadi, maka dalam membuat proyeksi pengeluaran pemerintah harus memperhitungkan variabel pertumbuhan ekonomi; dan sebaliknya dalam memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi, variabel pengeluaran pemerintah harus dijadikan salah satu faktor penentu.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan saat ini dikenal secara luas sebagai kondisi yang diperlukan untuk mengurangi kemiskinan, akan tetapi, sangat memungkinkan untuk menunjukkan secara empiris bahwa tidak ada variasi lainnya dalam hubungan invarian antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Walaupun demikian, pertumbuhan ekonomi tentunya memberikan elastisitas yang berbeda dalam menurunkan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari sektor yang kurang banyak melibatkan rumah tangga miskin akan memberikan elastisitas yang rendah bagi penurunan kemiskinan, demikian pula sebaliknya.

Investasi merupakan salah satu elemen pokok dalam kegiatan ekonomi makro, selain konsumsi, tabungan, pengeluaran pemerintah, pajak, ekspor dan impor. Besar kecilnya investasi secara langsung akan mempengaruhi besaran pertumbuhan ekonomi. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukimo,2000:367).

Adanya investasi-investasi baru memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004), investasi merupakan komponen pengeluaran yang cukup besar dan tidak mudah

habis, perubahan besar pada investasi akan mempengaruhi permintaan agregat (efek jangka pendek) yang pada akhirnya berakibat juga pada output dan kesempatan kerja. Kemudian investasi mendorong terjadinya akumulasi modal yang dapat meningkatkan output potensial suatu bangsa dan merangsang pertumbuhan.

Tingkat investasi berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi, yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru, dengan demikian, tingkat pengangguran bisa direduksi dan pendapatan masyarakat pun meningkat. Adanya investasi juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan (knowledge) dari negara maju ke negara berkembang.

Pada Tahun 2007, realisasi penanaman modal Indonesia naik cukup signifikan dibandingkan dengan 2006. Pada periode itu, realisasi investasi PMDN sebesar Rp32,98 triliun naik 143,59% dibandingkan dengan periode yang sama 2006 yang sebesar Rp13,54 triliun, namun pada Tahun 2008 terjadi penurunan investasi dan hanya mencapai Rp.20.363 trilyun. Sementara itu, realisasi investasi PMA naik dari US\$9,02 miliar pada tahun 2007 menjadi US\$14,8 miliar tahun 2008. Pada periode yang sama pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan .

Akan halnya PAD, selama ini tidak didapatkan hubungan langsung antara PAD terhadap kemiskinan dan pengangguran, akan

tetapi hubungannya secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi atau anggaran belanja pemerintah. Sebagaimana penelitian di beberapa negara tentang hubungan antara pendapatan pemerintah dengan pengeluaran (belanja) daerah.

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan eksekusi dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Optimalisasi penerimaan PAD harus didukung dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik. (Mardiasmo, 2002).

Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal karena sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah (Sidik, 2002; Bappenas 2003). Data menunjukkan bahwa kontribusi PAD di Indonesia meningkat menjadi 14,33 persen pada tahun 2008 (Badan Pusat Statistik, 2009), dengan sumber utama penerimaan dari pajak daerah dan retribusi. Namun demikian, kontribusi PAD ini masih sangat kecil bila dibandingkan dengan transfer pusat (DAU dan DAK) yang mencapai 79,14 persen.

Pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10 persen dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran

Pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10 persen dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah & Halim, 2004)

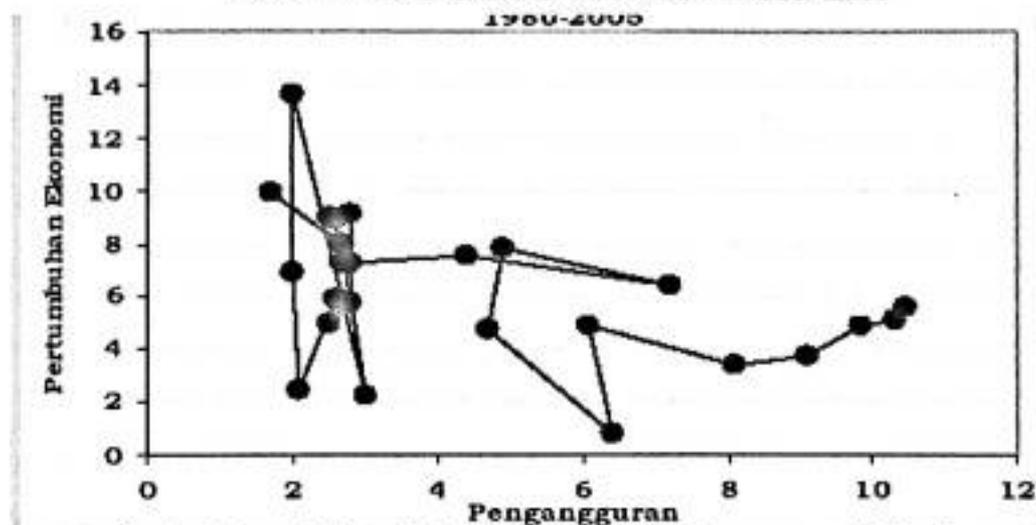
Dalam literatur dinyatakan bahwa ada tiga hipotesis utama yang dapat menjelaskan hubungan antara pendapatan dan pengeluaran atau anggaran belanja pemerintah, pertama, peningkatan pajak akan menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah, kedua adalah hipotesis pengeluaran dan pajak, yang menyatakan bahwa peningkatan pajak dan pinjaman disebabkan oleh adanya peningkatan pengeluaran pemerintah Peacock and Wiseman (1979) , dalam penelitian empiris hipotesis ini bermakna hubungan kausalitas yang tidak langsung antara pengeluaran terhadap pendapatan. (Narayan, 2005), ketiga adalah hipotesis sinkronisasi fiscal, Barro's (1979) mengemukakan model pajak '*smoothing*' yaitu keputusan pajak dan pengeluaran dilakukan secara simultan sehingga pendapatan dan pengeluaran saling berubah secara bergantian Meltzer and Richard (1981) dari sisi empiris hipotesis ini mengungkapkan postulat "*bidirectional causality*" antara pengeluaran dan pendapatan pemerintah.

Selain kemiskinan, pengangguran merupakan permasalahan lain yang juga dihadapi oleh kota-kota di Indonesia. Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja menimbulkan pengangguran yang tinggi.

Perubahan tingkat pengangguran erat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, sebab pertumbuhan ekonomi merupakan akibat dari adanya peningkatan kapasitas produksi yang merupakan turunan dari peningkatan investasi. sehingga, pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan peningkatan penggunaan tenaga kerja, begitu pula dengan investasi dengan asumsi investasi tidak bersifat padat modal.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat dilihat bagaimana hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dalam bentuk kurva. Dengan menggunakan data antara pengangguran dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti yang digunakan dalam membuat kurva Phillip hubungan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran. Kurva hubungan antara pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tingkat pengangguran seperti terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 7. Kurva Diagram Sebaran antara Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Th.1980- 2005



Sumber : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia (Amri Amir, 2007)

Gambar 7. di atas menunjukkan bahwa kurva sebaran pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menyerupai kurva Philips, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran signifikan.

Guna menanggulangi permasalahan kemiskinan dan pengangguran telah dilakukan intervensi pemerintah kota melalui program pemberdayaan ekonomi dengan mengalokasikan anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat pada APBD kota dalam beberapa tahun terakhir, akan tetapi upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal.

Fenomena yang sering terjadi adalah pertumbuhan ekonomi tinggi, investasi tinggi, pendapatan dan belanja pemerintah juga tinggi, akan tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat rendah, terlihat dari angka kemiskinan dan pengangguran yang tetap tinggi dan IPM yang masih rendah.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan sejauhmana implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat, apakah anggaran pemberdayaan ekonomi yang tersedia sudah cukup besar untuk dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran, apakah tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sudah cukup berkualitas untuk dapat mendorong keberdayaan ekonomi masyarakat?, pertanyaan yang sudah terlalu sering diucapkan bahkan telah dilakukan kajian tentang permasalahan tersebut, namun hingga kini masih belum dapat memberi solusi yang tepat dalam penanganannya

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, timbul motivasi untuk mengkaji lebih dalam tentang anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam APBD kota dan dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan daerah perkotaan di Indonesia

B. Perumusan Masalah

Kemiskinan dan pengangguran hingga saat ini masih menjadi permasalahan penting di daerah perkotaan, walaupun telah dilakukan berbagai upaya melalui program dan kegiatan untuk menanggulangnya namun nampaknya permasalahan tersebut seolah-olah belum dapat tertangani dengan baik.

Salah satu program yang diharapkan dapat menekan jumlah penduduk miskin dan pengangguran di daerah perkotaan adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dalam pelaksanaannya dibiayai melalui anggaran belanja kota.

Selain anggaran pemberdayaan ekonomi, terdapat beberapa faktor lain yang juga diharapkan dapat berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran yaitu ; besarnya dana desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, investasi dan PAD kota, hal ini menjadi menarik untuk dikaji sejauhmana hubungan variabel-variabel tersebut dalam kurun waktu 2004-2008.

Berdasarkan hal di atas, maka rumusan masalah penelitian untuk menganalisa Pengaruh Kinerja Makroekonomi dan Desentralisasi Fiskal terhadap Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perkotaan di Indonesia sebagai berikut :

1. Apakah Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam APBD Kota berpengaruh terhadap kemiskinan baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, Investasi, Pendapatan Asli Daerah dan Pengangguran?.
2. Apakah Dana Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Kemiskinan Perkotaan baik langsung maupun tidak langsung melalui Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pendapatan Asli Daerah dan Pengangguran?
3. Apakah Investasi berpengaruh terhadap kemiskinan daerah perkotaan baik langsung maupun tidak langsung melalui Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Pengangguran?.
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan daerah perkotaan baik langsung maupun tidak langsung melalui Investasi, PAD dan Pengangguran?
5. Apakah PAD berpengaruh terhadap kemiskinan daerah perkotaan baik langsung maupun tidak langsung melalui Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Pengangguran?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa dan mengukur pengaruh Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terhadap kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pendapatan Asli Daerah dan Pengangguran.
2. Untuk menganalisa dan mengukur pengaruh Dana Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pendapatan Asli Daerah dan Pengangguran.
3. Untuk menganalisa dan mengukur pengaruh Investasi terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Pengangguran.
4. Untuk menganalisa dan mengukur pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan melalui Investasi, PAD dan Pengangguran.
5. Untuk menganalisa dan mengukur pengaruh PAD terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, PAD dan Pengangguran.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Manfaat dalam aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kota. Selain itu dapat menjadi sumber pengetahuan dan menjadi acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat dalam aspek Praktis

Sebagai masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah kota bidang pembangunan ekonomi, khususnya dalam menetapkan besarnya anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan perencanaan yang akurat, proporsional dan mengarah pada peningkatan kinerja Makro Ekonomi yang sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kota sebagai pihak pengambil keputusan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan ekonomi, terutama dalam menentukan pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran dan memberi manfaat bagi rakyat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa hubungan antara variabel Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam APBD Kota, Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pendapatan Asli Daerah, Pengangguran dan Kemiskinan Daerah Perkotaan di Indonesia.

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup kaidah penelitian yang diterima umum. Ruang lingkup objek penelitian ini adalah Anggaran pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam APBD Kota, Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Makro Ekonomi yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta hubungannya dengan Kemiskinan di 24 Kota Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini dilaksanakan dengan memberikan kejelasan tentang variabel yang digunakan sebagai dasar menyusun kerangka pikir dan pengembangan hipotesis . Berbagai kajian teori serta sejumlah konstruk dihimpun sebagai bahan referensi yang dibahas secara detail dan runtun

A. Beberapa Ulasan tentang Masalah Pentingnya Anggaran Pemerintah dalam Suatu Perekonomian

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono ,2000) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran daerah atau anggaran belanja daerah dalam APBD mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Efektivitas pengeluaran akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelayanan publik, yang akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Efektivitas pengeluaran daerah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal

pemerintahan daerah, antara lain proses penyusunan dengan APBD sebelum dan sesudah tahun anggaran yang bersangkutan, dan sinergi dengan program-program Pemerintah.

Proses penyusunan APBD bukan merupakan suatu proses yang sederhana, karena terkait dengan mekanisme perencanaan yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang sangat beragam. Proses penyusunan anggaran yang baik akan mengutamakan kepentingan masyarakat dan diwujudkan dalam anggaran yang efisien, sehingga akan menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan perencanaan. Tantangan dalam proses penyusunan APBD yaitu bagaimana menciptakan hubungan yang jelas antara *input* (anggaran dalam APBD) dengan *output* dan *outcome* dari program dan kegiatan.

Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja

Lebih dari tujuh puluh tahun lalu, V.O. Key sudah mengisyaratkan bahwa penganggaran memiliki satu masalah paling mendasar, yakni keterbatasan sumber daya. Key (1940) mengajukan pertanyaan berikut: *"on what basis shall it be decided to allocate x dollars to activity A instead of activity B?"* Keterbatasan sumber daya yang dimiliki menyebabkan proses pembuatan keputusan pengalokasian menjadi sangat dinamis, terlebih lagi dalam kondisi di mana terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda (Rubin, 1993)

Teori-teori ekonomi makro, yang umumnya bersandar pada peran pasar dalam alokasi sumber daya, serta dengan pra-anggapan bahwa kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat akan menguntungkan semua lapisan masyarakat, dalam kenyataannya tidak dapat menghasilkan jawaban yang memuaskan bagi masalah kesenjangan. Kekuatan sosial yang tidak berimbang, menyebabkan kegagalan pasar untuk mewujudkan harapan itu (Brown, 1995).

Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tepat, agar kebijaksanaan pada tingkat makro mendukung upaya mengatasi kesenjangan yang harus dilakukan dengan kegiatan yang bersifat mikro dan langsung ditujukan pada lapisan masyarakat terbawah. Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro.

Belanja pembangunan dikeluarkan oleh pemerintah yang mana manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena

belanja pembangunan memang dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan publik. Salah satu bentuk anggaran belanja pembangunan tersebut adalah anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Alokasi anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersumber dari APBN melalui berbagai PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat telah dilaksanakan sejak Tahun 2007 dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan produktivitas masyarakat, dan diharapkan menjadi salah satu solusi bagi pengurangan jumlah penduduk miskin dan pengangguran.

Anggaran pemberdayaan yang bersumber dari APBN terbatas jumlahnya dan tidak akan dapat memenuhi kebutuhan anggaran pemberdayaan di seluruh negeri ini, sehingga kekurangan anggaran pemberdayaan tersebut idealnya dialokasikan dalam APBD setiap daerah, dan menjadi komponen dari anggaran belanja langsung yang dialokasikan dalam anggaran program dan kegiatan SKPD setiap tahun. Anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat diberikan kepada kelompok masyarakat dalam bentuk dana stimulan atau bantuan permodalan dan dana pelatihan guna peningkatan kualitas SDM masyarakat. Besarnya anggaran pemberdayaan ekonomi sangat tergantung pada komitmen pemerintah daerah terhadap upaya pemberdayaan masyarakatnya dan seberapa dalam pihak eksekutif dan legislative memahami pentingnya program pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Keterkaitan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat dengan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Aliran Keynesian menunjukkan bahwa pembelanjaan pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini menjelaskan bahwa dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan permintaan berbagai barang dan jasa yang diproduksi perekonomian secara agregat, sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian. Jadi, pengeluaran pemerintah dipandang output agregat. Dengan kata lain, dalam kasus ini pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari pengeluaran pemerintah. Sebaliknya, Hukum Wagner "hukum meningkatnya ekspansi aktivitas publik" menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai determinan utama pertumbuhan sektor publik (Wagner, 1983 dalam Mankiw, 2007 dan Donrbusch, et,al, 1987) yang berarti pengeluaran pemerintah merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi.

Analogi untuk hubungan ini adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka tingkat penerimaan pemerintah dari sektor pajak juga meningkat yang akhirnya meningkatkan pengeluaran pemerintah. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga mencerminkan semakin besarnya kebutuhan layanan jasa pemerintah, sehingga dibutuhkan anggaran pemerintah yang semakin besar pula

Implikasi kebijakan dari adanya hubungan timbal balik antara tingkat pengeluaran pemerintah dan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pada pembuatan proyeksi/perkiraan kebutuhan anggaran pembangunan tahunan dan target pertumbuhan ekonomi. Dengan memegang asumsi bahwa hubungan timbal balik tersebut terjadi, maka dalam membuat proyeksi pengeluaran pemerintah harus memperhitungkan variabel pertumbuhan ekonomi; dan sebaliknya dalam memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi, variabel pengeluaran pemerintah harus dijadikan salah satu faktor penentu.

Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Teori yang membahas mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi diuraikan panjang lebar dalam *The General Theory Keynes*. Teori ini menguraikan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek, sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya.

Hukum Wagner mengenai pengeluaran publik adalah salah satu usaha paling awal yang menekankan pertumbuhan ekonomi sebagai determinan mendasar dari pertumbuhan sektor publik. Sejumlah studi menemukan hubungan positif yang nyata antara pertumbuhan sektor publik dan pertumbuhan ekonomi hanya untuk negara berkembang tetapi bukan pada negara maju, yang lainnya malahan melaporkan hubungan negatif antara pembelanjaan pemerintah dan *GNP*.



Pengeluaran pemerintah sebagai variabel dependen artinya produk domestik bruto mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Teori perkembangan pengeluaran pemerintah yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) akan mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah.

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap PDB. Wagner mengemukakan pendapatnya bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan "The Law of Expanding State Expenditure". Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman, Jepang). Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar , terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat.

Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Studi yang menunjukkan hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan diantaranya: Barro dan Sallai-Martin (1992) yang membagi pengeluaran pemerintah menjadi pengeluaran produktif dan tidak produktif. Pengeluaran produktif apabila pengeluaran tersebut mempunyai efek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebanyakan studi mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi mengasumsikan semua pengeluaran pemerintah bersifat produktif (Barro,1990). Landau (1983) meneliti 27 negara berkembang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah yang besar terutama pengeluaran konsumsi justru akan menurunkan pertumbuhan pendapatan per kapita.

Hasil yang sama ditemukan oleh Landau (1986) terhadap 65 negara berkembang. Devarajan dan Vinaya (1993) menemukan hubungan negatif dan tidak signifikan hubungan antara pengeluaran produktif dengan pertumbuhan. Sementara itu Lin (1994) menyatakan pengeluaran non-produktif mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan di negara industri tetapi positif dan signifikan di negara berkembang. Hal ini terjadi karena pelayanan pemerintah yang bersifat non produktif di negara berkembang sebagian besar digunakan untuk konsumsi.

Josaphat P Kweka dan Oliver Morrissey (1999) meneliti hubungan keduanya terhadap negara Tanzania periode 1965-1996. Hasil yang diperoleh bahwa pengeluaran pemerintah berdampak negatif terhadap

pertumbuhan. Dampak negatif disebabkan karena tidak efisiennya pengeluaran pemerintah di Tanzania. Penelitian lain menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan (Grier dan Tullock, 1989, Barro, 1991).

Studi terhadap negara-negara maju juga menyimpulkan hasil yang sama seperti Hannson dan Henrekson (1994). Pada mayoritas studi, pengeluaran pemerintah total mempunyai efek negatif terhadap pertumbuhan (Romer, 1990; Folster dan Henrekson, 2001). Folster dan Henrekson mengatakan bahwa pada tingkat pengeluaran pemerintah yang rendah di negara miskin terutama untuk pengeluaran produktif dan rendah pula pajaknya, biasanya tidak efisien dalam pengumpulan pajak dan pengeluaran pemerintahnya.

Studi yang menunjukkan hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan diantaranya: Ram (1986) dan Grossman (1988) menemukan hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Diamond (1989) menyatakan bahwa pengeluaran sosial mempunyai hubungan positif yang signifikan dan pengeluaran investasi mempunyai efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak tersebut sangat dipengaruhi oleh efisiensi penggunaan dana.

2. Keterkaitan Antara Anggaran Pemberdayaan Masyarakat dengan Investasi

Dalam literatur sering diperdebatkan tentang hubungan antara investasi dengan belanja pemerintah, karena hasil penelitian yang berbeda, oleh sebab itu menarik perhatian dan banyak penelitian dilakukan tentang hubungan keduanya baik di negara maju maupun negara berkembang (Hermes and Lensink, 2001)

Investasi menjadi isu sentral dalam Teori Makroekonomi, hal tersebut berperan penting terhadap perekonomian negara karena mendorong kapasitas produksi dalam ekonomi serta meningkatkan proses teknologi melalui pengenalan teknologi baru, namun investasi seringkali tidak pasti karena tergantung pada berbagai faktor dan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi GDP melalui siklus bisnis (Dornbush et al. 1999). Oleh sebab itu dianggap perlu untuk mengkaji secara mendalam determinan dari investasi tersebut..

Anggaran belanja pemerintah pada umumnya diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu belanja non pembangunan (belanja rutin) dan belanja pembangunan. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Aschaver (1989), Greene and Villanuva (1991), Munnell (1992), Shafik (1992), Oshikaya (1994), Ramirez (1994), Ghura and Goodwin (2000), Mamatzakis (2001) and Rashid (2005) mendapatkan hubungan positif antara investasi dan pengeluaran pemerintah, akan tetapi peneliti lainnya Akkina and Celibi (2002), Pereira and Sagales (2001), Williams and Darius (1998) and

Wai and Wang (1982)] menyatakan hubungan yang negatif. Dengan demikian ,hingga saat ini masih terus dilakukan penelitian tentang hubungan tersebut .

Studi lain menyatakan bahwa investasi ditentukan oleh pendapatan negara, interest rate dan kinerja makroekonomi (Aschaver, 1989), dan ditambahkan pula bahwa belanja pemerintah adalah variable lainnya yang berperan penting terhadap investasi, fakta yang didapatkan berbeda yaitu pendapatan berpengaruh positif terhadap investasi dan interest rate, ketidakstabilan makroekonomi berpengaruh negatif, sedangkan belanja pemerintah dapat berpengaruh positif dan negative terhadap investasi (Dixit and Pindyck, 1994).Belanja konsumsi tidak berpengaruh terhadap investasi swasta, hal ini mungkin disebabkan oleh adanya tekanan interest rate, atau menjadi pengganti bagi investasi. Dengan demikian belanja tersebut dapat berpengaruh positif pada investasi swasta melalui permintaan (demand) Ahmad (2007).

3. Keterkaitan Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Pendapatan Asli daerah

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan (Aziz et al, 2000; Blackley, 1986; Oulfaih & Mokeerjee, 1990; Legrensi & milas, 2001; Von Furstenberg et al, 1986)

Sebuah Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan (terutama pajak) akan mempegaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama tax spend hyphotesis (Aziz et al, 2000; Doi, 1998; Von

Furstenberg et al, 1998). Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum penambahan pengeluaran.

Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis. Di dalam konteks internasional beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja daerah diantaranya Cheng, 1999; Friedman, 1978; Hoover & Sheffrin, 1992 dalam Kesit Bambang Prakosa, 2004. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa hipotesis pajak belanja berlaku untuk kasus pemerintah daerah di beberapa negara Amerika Latin, yakni Kolumbia, Republik Dominika, Honduras dan Paraguay. Friedman dalam Kesit Bambang Prakosa, 2004 menyatakan bahwa kenaikan pajak akan meningkatkan kenaikan belanja.

Kebijakan makroekonomi antara lain pengurangan belanja publik, peningkatan pajak dan retribusi pendapatan, penyusunan kembali nilai tukar dan berbagai kebijakan keuangan yang bersifat membatasi dan pada umumnya dirancang untuk menciptakan kondisi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi berdampak negatif terhadap rumah

tangga miskin, sehingga berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah (Squire, 1999)

Beberapa studi empiris menemukan bahwa respon pemerintah atas berkurangnya pendapatan adalah pengurangan anggaran belanja modal atau belanja sosial (Schade, 2005; Khattry, 2003; Khattry and Rao, 2002; Ndikumana, 2004; Rao, 1999; Kumar et al. 2007; Gupta et al. 2002; 2005; Dabla-Norris and Matovu, 2002; Zaghini, 2001; Annett, 2002; Baldacci et al. 2004, Gupta et al. 2003; Basu and Morrissey, 1997; Tanzi, 1993). Bila pendapatan pemerintah berkurang, sehingga permasalahan sosial dan ekonomi menjadi tantangan terberat bagi negara berkembang, dari pada pengurangan anggaran. karakteristik yang paling mendasar bagi sistem perpajakan yang efektif adalah upaya mencukupkan pendapatan terhadap anggaran pengeluaran pemerintah dan pembangunan, (Stepanyan, 2003; Indraratna, 2003; Teera and Hudson, 2004). kemampuan sistem perpajakan sebagai upaya pemerintah untuk mengumpulkan pajak atau efektifitas administrasi perpajakan, menjaga kondisi makroekonomi, tingkat pembangunan dan struktur ekonomi (Steenekamp, 2007; Teera and Hudson, 2004).

4. Korelasi Pendapatan Asli Daerah dengan Pengangguran dan Kemiskinan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ardi Hamzah (2009), tentang hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan



Pengangguran. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Selama ini tidak didapatkan hubungan langsung antara PAD terhadap kemiskinan dan pengangguran, akan tetapi hubungannya secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi atau anggaran belanja pemerintah. Sebagaimana penelitian di beberapa negara tentang hubungan antara pendapatan pemerintah dengan pengeluaran (belanja)

Dalam literatur dinyatakan bahwa ada tiga hipotesis utama yang dapat menjelaskan hubungan antara pendapatan dan pengeluaran atau anggaran belanja pemerintah .pertama, hipotesis tentang pajak dan pengeluaran yang mengemukakan adanya hubungan kausal antara pendapatan terhadap pengeluaran, pendapat yang dipelopori oleh Friedman (1978), yang menyatakan bahwa peningkatan pajak akan menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah, selanjutnya Friedman (1982) menerangkan bahwa defisit keuangan tidak dapat dikurangi dengan menaikkan pajak karena kenaikan pajak akan menyebabkan lebih besar pengeluaran, sehingga pengurangan defisit dilakukan sesuai dengan kemampuan tertinggi yang dapat diterima oleh masyarakat.

Kedua adalah hipotesis pengeluaran dan pajak, yang menyatakan bahwa peningkatan pajak dan pinjaman disebabkan oleh

adanya peningkatan pengeluaran pemerintah Peacock and Wiseman (1979), menyebabkan permasalahan bahwa peningkatan pengeluaran baik krisis dan kemudian peningkatan pengeluaran tahap kedua setelah krisis. Ide utamanya adalah peningkatan pajak dan krisis akan menjadi kebijakan perjakan yang seterusnya di masa mendatang (Narayan, 2005). Dalam penelitian empiris hipotesis ini bermakna hubungan kausalitas yang tidak langsung antara pengeluaran terhadap pendapatan.

Ketiga adalah hipotesis sinkronisasi fiscal, Barro's (1979) mengemukakan model pajak 'smoothing' yaitu keputusan pajak dan pengeluaran dilakukan secara simultan sehingga pendapatan dan pengeluaran saling berubah secara bergantian Meltzer and Richard (1981) dari sisi empiris hipotesis ini mengungkapkan postulat "*bidirectional causality*" antara pengeluaran dan pendapatan pemerintah, penelitian Anderson et al. (1986), dengan menggunakan teknik ekonometrik tradisional, menemukan bahwa pengeluaran pemerintah menyebabkan pendapatan di AS. Marlow and Manage (1986) meneliti hubungan kausal antara pengeluaran federal dan penerimaan dalam rangka membuktikan bahwa pajak akan mengurangi defisit, hasilnya adalah tidak berhubungan langsung dan positif dari dana grant terhadap pengeluaran.

Penelitian yang terkait dengan hal tersebut telah dilakukan oleh banyak peneliti antara lain . Ram (1988), Miller and Russek (1990) di Ireland, Kollias and Makrydakis (2000) di Itali, Li (20 di China) Cairneiro et al. (2004) di Guinea-Bissau. Narayan (2005) di 9 negara Asia salah satu

diantaranya Indonesia, dan sesuai dengan hipotesis pajak yaitu bila pajak meningkat maka pengeluaran juga meningkat.

Dengan demikian dapat dilihat adanya hubungan tidak langsung antara Pendapatan dengan kemiskinan dan pengangguran melalui pengeluaran pemerintah, beberapa penelitian tentang hubungan pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan dan pengangguran dilakukan antara lain oleh : (Schade, 2005; Khattry, 2003; Khattry and Rao, 2002; Ndikumana, 2004; Rao, 1999; Kumar et al. 2007; Gupta et al. 2002; 2005; Dabla-Norris and Matovu, 2002; Zaghini, 2001; Annett, 2002; Baldacci et al. 2004, Gupta et al. 2003; Basu and Morrissey, 1997; Tanzi, 1993). mengungkapkan bahwa berkurangnya pendapatan berpengaruh bagi pengurangan belanja pemerintah, hal tersebut menjadi tantangan terberat bagi negara berkembang terutama menghadapi permasalahan ekonomi dan sosial. Sehingga banyak negara yang menaikkan pengeluaran publiknya untuk program pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan melalui strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Negara tersebut dalam upaya mencapai Millennium Development Goals (MDG's)

B. Beberapa Ulasan tentang Masalah Desentralisasi Fiskal Bagi Perekonomian Daerah Perkotaan

Implementasi Desentralisasi Fiskal diyakini sebagai sarana yang efektif untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

(Bird dan Wallich, 1993). Hal tersebut juga sebagai dampak dari kegagalan pelaksanaan sistem pemerintahan sentralistis di negara – negara (Martínez- Vázquez dan McNab, 2003). Bank Dunia (1999), argumennya adalah pada awal abad 21 seiring dengan era globalisasi, muncul tuntutan lokalisasi atau dorongan untuk mendapatkan otonomi bagi pemerintah lokal.

Argumentasi yang mendasari pelaksanaan desentralisasi adalah selain meningkatkan efisiensi di sektor pelayanan publik juga menjaga kestabilan pembangunan ekonomi jangka panjang (Oats, 1972). Desentralisasi meningkatkan efisiensi ekonomi sebab pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi daerahnya dalam menetapkan kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan pemerintah pusat baik dari kebutuhan fisik maupun pengembangan kelembagaan. Hal tersebut memungkinkan pemerintah daerah akan membangun kebutuhan publik dan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan pembiayaan yang lebih rendah.

Selain itu , pemerintah daerah menjadi lebih mudah mendapat tuntutan langsung dari masyarakatnya . Dengan adanya kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar akan meningkatkan efisiensi dengan memberikan insentif kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam penyediaan barang dan pelayanan publik yang lebih berkualitas (Martínez-Vázquez dan McNab, 2003).

Pengalokasian dana desentralisasi akan lebih efisien bila ada kesesuaian yang cermat antara pendapatan dan pengeluaran belanja pemerintah daerah Oates (1972), penyesuaian itu dilakukan dengan memberikan insentif fiskal yang lebih besar untuk mendukung pengembangan daerah (Jin et al, 2005), dan peningkatan tanggung-jawab pemerintah daerah serta pengurangan efek ketimpangan regional antar pemerintah daerah (Shah, 1994).

Oates (1999) mengemukakan bahwa dengan membedakan output pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat, maka desentralisasi akan mewujudkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Bila setiap daerah yang memiliki kebutuhan berbeda mendapatkan tingkat pelayanan dan barang publik yang serupa, maka hal tersebut akan menyebabkan tidak efisien. Semakin besar keberagaman permintaan barang publik di setiap daerah, maka akan semakin besar manfaat desentralisasi fiskal. Diversifikasi tersebut memungkinkan masyarakat untuk memilih atau berpindah daerah yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan barang dan pelayanan publik yang dikehendaki.

Krisis yang dihadapi negara-negara kesejahteraan mengharuskan dilakukan reformasi dan restrukturisasi untuk merawat prestasi kesejahteraan secara berkelanjutan, antara lain dengan menata ulang kebijakan sosial dan ekonomi (Ferrera dan Rhodes, 2000; Kautto et. al, 2001; Taylor- Gooby, 2001, 2004; Huber dan Stephens, 2001, Jochen Clasen 2005; Streeck dan Trampusch, 2005); serta pelaksanaan

desentralisasi untuk mengurangi struktur negara kesejahteraan yang hirarkhis dan sentralistik.

Para ekonom yang berhaluan liberal dan pasar tidak menyetujui solusi negara kesejahteraan dan desentralisasi fiskal, dan melontarkan kritik bahwa negara kesejahteraan terlalu besar, terlalu mahal, terlalu birokratis dan terlalu boros (Jochen Clasen, 2005). Para ekonom juga selalu mengingatkan bahwa desentralisasi fiskal selalu rentan memunculkan defisit fiskal (Jonathan Rodden, Gunnar S. Eskeland, dan Jennie Litvack, 2003). Tetapi arus desentralisasi tidak bisa dibendung. Selama hampir dua dekade terakhir tengah muncul keyakinan dan pengalaman di banyak negara bahwa desentralisasi dan pemerintahan lokal yang demokratis memiliki vitalitas yang lebih baik dalam mencapai kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik secara akuntabel.

1. Keterkaitan Desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi

Peranan pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian sangat ditentukan oleh kebijakan anggaran dalam memberikan ruang gerak bagi aktifitas perekonomian. Pola belanja pemerintah yang ekspansif dan terarah akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal bertujuan untuk mendukung pendanaan atas urusan-urusan yang telah diserahkan kepada daerah, agar daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik, diharapkan dapat memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan mendorong perkembangan ekonomi melalui pembangunan daerah. Selain itu tujuan utama pemberian dana perimbangan dalam kerangka otonomi daerah untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah (*equalizing transfer*) (Ehtisham, 2002). Secara umum dana desentralisasi terdiri dari bantuan umum (*block grant*) dan bantuan khusus (*specific grant*) (Davey, 1998). Penggunaan DAU, DBHP dan DBH SDA (*block grants*) diserahkan pada kebijakan masing-masing daerah.

Desentralisasi mempunyai pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/pembelanjaan publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dalam era desentralisasi fiskal dengan transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, Mursinto (2004). Pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) kabupaten/kota, pengeluaran pemerintah daerah yang semakin besar akan mendorong pertumbuhan ekonomi (PDRB) daerah. Untuk



meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (pertumbuhan ekonomi) tidak hanya peran pemerintah saja, tetapi diperlukan peran serta swasta dan masyarakat yang semakin besar.

Menurut Oates (1993) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang apabila tidak berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Desentralisasi fiskal memungkinkan untuk melakukan korupsi pada level lokal karena memberikan pertimbangan politikus lokal dan birokrat yang dapat di akses dan peka terhadap kelompok lokal.

Desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurutny daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya.

2. Keterkaitan Desentralisasi Fiskal dengan Investasi

Menurut Jhingan (2000), kebijakan fiskal adalah penggunaan pajak, pinjaman masyarakat dan pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilisasi dan pembangunan. Kebijakan fiskal ini merupakan sarana untuk menggalakkan pembangunan ekonomi yang bertujuan: meningkatkan laju investasi, mendorong investasi optimal secara sosial, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional, menanggulangi inflasi, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional.

Desentralisasi fiskal dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dan dapat pula mendorong pertumbuhan melalui efisiensi alokasi sumberdaya pada level daerah. Selain itu, transfer dana dari pemerintah pusat akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja publik yang digunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan infrastruktur dan suprastruktur daerah, hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting yang menjadi pertimbangan para investor dalam melakukan investasi di suatu wilayah, dengan demikian dana desentralisasi fiskal bila dimanfaatkan secara efisien dan efektif dan berorientasi pada belanja publik, akan berpengaruh terhadap peningkatan investasi di daerah perkotaan.

Investasi merupakan salah satu elemen pokok dalam kegiatan ekonomi makro, hal tersebut menyebabkan besar kecilnya investasi secara langsung akan mempengaruhi besaran pertumbuhan ekonomi

3. Korelasi Desentralisasi Fiskal dengan Pendapatan Asli Daerah

Desentralisasi fiskal adalah salah satu pendukung pelaksanaan otonomi daerah karena kemampuan keuangan daerah merupakan hal yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Indikator penting keberhasilan kemampuan keuangan daerah tercermin dalam kemampuan suatu daerah dalam menggali pendapatan asli daerah (PAD) nya untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan di daerah tersebut. Dilain pihak sebagai daerah otonom yang tetap menjadi bagian dari negara kesatuan, daerah masih harus tetap melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan pemerintah pusat. Kewenangan untuk melaksanakan tugas tersebut tentu saja disertai dengan pembiayaan dan bantuan dari pusat. Selain itu, mengingat kondisi dan potensi masing-masing daerah otonomi yang berbeda-beda, pemerintah pusat juga memberikan dana perimbangan yang bertujuan untuk melakukan pemerataan dalam pembangunan.

Dengan demikian kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan mampu membuka peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, selanjutnya diharapkan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD-nya, sehingga daerah menjadi benar-benar otonom.

Komponen-komponen penerimaan daerah yang mempunyai peluang untuk ditingkatkan kontribusinya terhadap APBD kota apabila faktor-faktor pendukungnya juga dioptimalkan. Keberhasilan kinerja keuangan daerah dapat tercermin dari pos-pos penerimaan. Semakin besar porsi penerimaan daerah dari PAD, maka semakin kecil juga ketergantungan daerah terhadap APBN.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji hubungan antara desentralisasi fiskal dengan kinerja keuangan daerah, antara lain oleh Waluyo (2007), selama tahun 2001 hingga 2003 fenomena yang terjadi di Indonesia adalah peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD semakin menurun. Menurunnya peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan pengeluaran total dalam APBD mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan peranan mekanisme transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan (Mahi, 2005 dalam Waluyo, 2007). Selain itu menurut Mahroji (2005) dalam Waluyo (2007) menunjukkan bahwa masih terjadinya ketimpangan vertikal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2001, yang disebabkan adanya kelebihan dana penerimaan di pemerintah pusat.

4. Korelasi Desentralisasi Fiskal dengan Pengangguran dan Kemiskinan

Penelitian Jutting et all (2004) dengan menggunakan data lintas Negara menunjukkan bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal dengan

penanggulangan kemiskinan bersifat *ambiguous*. Pada beberapa negara miskin kualitas institusi dan adanya konflik politik menyebabkan kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak mencapai sasaran. Dampak kemiskinan terhadap desentralisasi tergantung oleh kualitas infrastruktur sebuah negara, hal ini berdampak terhadap kapasitas dan kemampuan pengambil kebijakan untuk mencurahkan perhatian terhadap program penanggulangan kemiskinan.

Penelitian Yose Rizal Damuri dan Ari A Perdana (2003) dengan menggunakan model keseimbangan umum terapan "WAYANG" menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Dampak yang terasa sangat besar terhadap penyediaan kesehatan di sektor masyarakat miskin di perkotaan dan pengangguran di desa.

Menurut Oates (1993) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang apabila tidak berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi.

Beberapa penelitian tentang hal tersebut di atas telah dilakukan antara lain oleh : (Barzelay, 1991), Oates (1993) (Bahl,2000), Lewis (2001), Gemmell , Kneller, Sanz (1998), Tao Zhang , Heng-fu Zou (1998), Bird, 1993; Bird, Wallich, 1993, Linn, 1992; Gramlich, 199 ,Wang, Hu, 1993; World Bank, 1995, 1996,. Akai and Sakata 1997-2001, Davoodi and Zou (2003), Woller and Phillips(1974)

B. Beberapa Catatan tentang Masalah Kinerja Makroekonomi Daerah Perkotaan

Negara-negara yang mengalami guncangan (shock) makroekonomi memiliki pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan yang lebih lamban dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki pengelolaan makroekonomi yang lebih baik (Bank Dunia, 2005).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan



peningkatan, menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada "proses", karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

Dalam konteks makroekonomi, investasi merupakan pergerakan arus pengeluaran yang dapat menambah stok modal secara fisik, seperti pembangunan pabrik dan kantor. Investasi dalam identitas pendapatan nasional merupakan investasi rumah tangga dan swasta, serta investasi pemerintah yang merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah (Mankiw, 2000)

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno,2000:367)

Penanaman Modal Asing salah satu kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sukses, secara khusus PMA diyakini sebagai faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, paling tidak melalui peningkatan kualitas SDM . Oleh karena pertumbuhan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi pengurangan kemiskinan, maka PMA menjadi penentu utama dalam mencapai tujuan tersebut (K.Michael, 1999)

Kemiskinan memberi gambaran situasi serba kekurangan seperti terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan.

Ketidakberdayaan penduduk miskin, menurut Mubyarto (1997), disebabkan mereka tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan juga karena struktur sosial ekonomi tidak membuka peluang orang miskin ke luar dari lingkungan kemiskinan yang tak berujung pangkal. Pelbagai inisiatif pemerintah daerah untuk membangun perekonomian jarang menyentuh kaum miskin, justru meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan. Penelitian yang didasari pengamatan tahun 2003 dan 2005 tersebut, juga menjelaskan mengenai kinerja buruk pemerintah daerah, melalui pelembagaan yang lemah, informasi dan strategi yang

tidak jelas dan kurangnya partisipasi dari masyarakat miskin itu sendiri. Variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan, perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, perbedaan peranan sektor swasta dan negara, perbedaan struktur industri, perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain dan perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri, (Todaro 1997)

Secara khusus kemiskinan di kota erat kaitannya dengan langkanya peluang kerja yang produktif. Penduduk, baik pendatang (urbanisasi) maupun penduduk kota yang baru masuk angkatan kerja, dengan kemampuan yang mereka miliki menciptakan kesempatan kerja dengan memanfaatkan kehidupan kota.

Produktivitas yang rendah, pendapatan yang rendah menyebabkan pendidikan rendah. Pendidikan yang rendah mengakibatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Kualitas SDM yang rendah menyebabkan produktivitas yang rendah dan demikian seterusnya. Rangkaian tersebut sering disebut sebagai *vicious circle* atau lingkaran setan kemiskinan. Bahwa kemampuan mereka untuk keluar dari permasalahan kemiskinan relatif sulit. Pada kasus demikian, pendapatan (hasil), keterampilan dan pendidikan yang rendah merupakan

suatu mata rantai. Keduanya saling berkaitan dan saling berpengaruh.
(Jalaludin R 1999)

Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Konsep ini sering diartikan sebagai keadaan pengangguran terbuka. Menurut Dumairy Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan (masih atau sedang) mencari pekerjaan (B. Mantra 2001)

Guna memperoleh pengertian sepenuhnya tentang arti penting dari masalah ketenagakerjaan (employment) di perkotaan, harus diperhitungkan pula masalah pertambahan pengangguran terbuka yang jumlahnya lebih besar yaitu mereka yang kegiatannya aktif bekerja tetapi secara ekonomis sebenarnya mereka tidak bekerja secara penuh (underutilized).

1. Keterkaitan Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Harrod Domar menganalisis tentang syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dengan mantap (*steady growth*). Menurutya investasi memberikan peranan kunci dalam proses pertumbuhan yang disebabkan karena Investasi dapat menciptakan pendapatan yang merupakan dampak dari Penawaran; investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stock modal yang merupakan dampak dari penawaran.

Menurut Sadono Sukirno (2000) Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Dalam model pertumbuhan endogen dikatakan bahwa hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar. Dengan diasumsikan bahwa investasi swasta dan publik di bidang sumberdaya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) dan memacu produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan ilmiah penurunan skala hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Implikasi yang menarik dari teori di atas adalah mampu menjelaskan potensi keuntungan dari investasi komplementer (*complementary investment*) dalam modal atau sumberdaya manusia, sarana prasarana infrastruktur atau kegiatan penelitian. Mengingat investasi komplementer akan menghasilkan manfaat personal maupun sosial, maka pemerintah berpeluang untuk memperbaiki efisiensi alokasi

sumberdaya domestik dengan cara menyediakan berbagai macam barang publik (sarana infrastruktur) atau aktif mendorong investasi swasta dalam industri padat teknologi dimana sumberdaya manusia diakumulaskannya. Dengan demikian model ini menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan investasi baik langsung maupun tidak langsung

Pembangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Pendapatan Nasional (PN) akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer, khususnya industri manufaktur dengan *increasing return to scale* (relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi (Weiss, 1988).

Ada kecendrungan (dapat dilihat sebagai suatu hipotesis) bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang membuat semakin tinggi pendapatan masyarakat per kapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi dengan asumsi faktor-faktor penentu lain mendukung proses tersebut, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi tersedia.

Menurut Kuznets, perubahan struktur ekonomi umumnya disebut transformasi struktural. Didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi *Aggregate*

Demand (AD) , perdagangan luar negeri (ekspor impor), *Aggregate Supply (AS)* atau produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan(Chenery,1979). Transformasi struktural dapat dilihat pada perubahan pangsa Nilai Output (NO) atau Nilai Tambah Bruto (NTB) dari setiap sektor di dalam pembentukan PDB atau PNB atau PN.

Berdasarkan hasil studi Chenery dan Syrquin, perubahan pangsa dalam periode jangka panjang menunjukkan suatu pola dimana kontribusi sektor primer semakin turun dan sektor sekunder dan tersier semakin meningkat. Kontribusi output dari pertanian (sektor primer) terhadap pembentukan PDB mengecil, sedangkan pangsa PDB dari industri manufaktur dan jasa (sektor sekunder dan tersier) mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan PDB atau PN per kapita

2. Korelasi Investasi dengan Pendapatan Asli Daerah

Investasi menjadi isu sentral dalam Teori Makroekonomi , hal tersebut berperan penting terhadap perekonomian negara karena mendorong kapasitas produksi dalam ekonomi serta meningkatkan proses teknologi melalui pengenalan teknologi baru, namun investasi seringkali tidak pasti karena tergantung pada berbagai faktor dan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi GDP melalui siklus bisnis (Dornbush et al. 1999). Oleh sebab itu dianggap perlu untuk mengkaji secara mendalam determinan dari investasi tersebut..

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Aschaver (1989), Greene and Villanuva (1991), Munnell (1992), Shafik (1992), Oshikaya (1994), Ramirez (1994), Ghura and Goodwin (2000), Mamatzakis (2001) and Rashid (2005) mendapatkan hubungan positif antara investasi dan pengeluaran pemerintah, akan tetapi peneliti lainnya Akkina and Celibi (2002), Pereira and Sagales (2001), Williams and Darius (1998) and Wai and Wang (1982)] menyatakan hubungan yang negatif. Dengan demikian ,hingga saat ini masih terus dilakukan penelitian tentang hubungan tersebut .

Studi lain menyatakan bahwa investasi ditentukan oleh pendapatan negara, interest rate dan kinerja makroekonomi (Aschaver, 1989), dan ditambahkan pula bahwa belanja pemerintah adalah variabel lainnya yang berperan penting terhadap investasi, fakta yang didapatkan berbeda yaitu pendapatan berpengaruh positif terhadap investasi dan *interest rate*, ketidakstabilan makroekonomi berpengaruh negatif, sedangkan belanja pemerintah dapat berpengaruh positif dan negative terhadap investasi (Dixit and Pindyck, 1994).

3. Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah

Ekonom klasik mengatakan, investasi akan dilakukan apabila tingkat pengembalian dari investasi (*return on investment*) lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku. Sementara aliran Keynes mengatakan, masalah investasi baik ditinjau dari penentuan jumlahnya maupun



kesempatan untuk mengadakan investasi itu sendiri, didasarkan pada konsep *Marginal Efficiency of Capital* (MEC). Investasi akan dilakukan oleh investor, bila MEC yang diharapkan lebih tinggi dari tingkat bunga yang berlaku. Di mana MEC sangat tergantung pada perkiraan-perkiraan dan pertimbangan investor terhadap perkembangan situasi perekonomian masa yang akan datang

Peningkatan pertumbuhan ekonomi, akan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pemerintah dari sektor pajak antara lain PAD . Ada kecenderungan (dapat dianggap sebagai suatu hipotesis) bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang membuat semakin tinggi pendapatan masyarakat per kapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi dengan asumsi faktor-faktor penentu lain mendukung proses tersebut, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi tersedia.

Untuk membangun suatu perekonomian harus memiliki *Social Overhead Capital* yaitu proyek-proyek raksasa yang diperlukan untuk memperlancar bisnis dan perdagangan seperti jalan raya, rel kereta api, proyek irigasi dan bendungan, serta sarana kesehatan umum. Semua ini memerlukan investasi yang sangat besar yang cenderung bersifat sekaligus. Tidak ada seorang pun atau perusahaan kecil yang mampu membangun suatu sistem jalan raya. Tidak ada perusahaan yang bisa berharap mendapatkan laba jika dana yang diperlukan tidak mampu disediakan oleh pemerintah.

Investasi langsung (*Direct Investment*) merupakan investasi yang melibatkan pihak investor secara langsung dalam operasional usaha yang akan di laksanakan, sehingga dinamika usaha yang menyangkut kebijakan perusahaan yang di tetapkan, tujuan yang hendak di capai, tidak lepas dari pihak yang berkepentingan (investor asing). Investasi langsung, langsung di perjual belikan di pasar uang (*money market*), pasar modal (*capital market*) dan pasar turunan (*derivative market*)

Investasi tidak langsung (*portofolio*) merupakan investasi keuangan yang di lakukan di luar negeri. Investor membeli uang atau ekuitas, dengan harapan mendapat manfaat finansial dari investasi tersebut. Bentuk investasi portofolio yang sering di temui adalah pembelian obligasi/perusahaan asing, tanpa kontrol manajemen di perusahaan investasi.

Dalam pengertian investasi riil dibedakan antara investasi bruto dan investasi netto, investasi swasta dan investasi pemerintah, serta investasi domestik dan investasi asing. Dua pasangan pengertian investasi riil yang terakhir jelas merupakan pembedaan dari segi pemiliknya saja yaitu apakah merupakan milik serta dilakukan pemerintah atau oleh swasta, dan merupakan milik serta dilakukan oleh orang asing atau oleh warga negara sendiri. Istilah investasi bruto swasta domestik menunjukkan investasi pada mesin-mesin, peralatan serta gedung-gedung yang habis dikonsumsi dalam proses produksi pada tahun berjalan ditambah dengan tambahan netto persediaan barang-barang

kapital. Konsumsi pemakaian barang-barang kapital merupakan penyusutan. Jadi investasi bruto adalah investasi pengganti ditambah investasi bersih atau investasi tambahan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa dilihat dari investasi netto, bila investasi bruto melebihi penyusutan atau investasi penggantinya maka terdapat investasi netto dan perekonomian negara tersebut mengalami perluasan. Perekonomian suatu negara mengalami stagnasi atau penurunan bila investasi netto negatif atau dimana investasi bruto lebih kecil daripada investasi pengganti.

Priyo HA (2006) telah melakukan penelitian mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota se Jawa-Bali, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Namun pertumbuhan ekonomi pemda kabupaten dan kota masih kecil, akibatnya penerimaan PAD kecil.

4. Hubungan Investasi dengan Pengangguran dan Kemiskinan

Investasi telah diakui sebagai sumber penting bagi pembangunan ekonomi. Banyak ahli yang berpendapat bahwa arus PMA bisa mengisi kesenjangan antara investasi yang diinginkan dan memobilisasi tabungan dalam negeri (Todaro dan Smith, 2003, Hayami, 2001). Selain itu juga dapat meningkatkan pendapatan pajak dan memperbaiki manajemen, teknologi, serta keterampilan tenaga kerja di negara tuan rumah (Todaro dan Smith, 2003, Hayami, 2001). Sehingga

PMA dapat membantu negara tuan rumah untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan dan keterbelakangan (Hayami, 2001)

Banyak manfaat investasi dapat mencakup akuisisi teknologi baru, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia, dan kontribusi terhadap integrasi perdagangan internasional, meningkatkan investasi domestik, dan meningkatkan pajak pendapatan yang dihasilkan oleh PMA (Jenkins dan Thomas, 2002; Bank Dunia, 2000). Semua ini diharapkan memberikan kontribusi bagi ekonomi dan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi tinggi yang merupakan alat efektif untuk mewujudkan perbaikan dalam pengurangan kemiskinan. Akan tetapi, dampak PMA terhadap kemiskinan dan pengangguran tergantung pada banyak faktor termasuk kebijakan negara, kualitas pasar tenaga kerja, ekonomi lingkungan, dan investasi itu sendiri (Mayne, 1997).

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa PMA sangat penting karena menyediakan sumber modal, melengkapi investasi swasta domestik, dan menghasilkan peluang kerja baru serta transfer teknologi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara penerima.

Investasi asing baik langsung dan maupun tidak langsung dapat memberi dampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Dampak tidak langsung dari PMA pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan peningkatan taraf hidup karena terjadi

peningkatan PDB, peningkatan teknologi dan produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi .

Dampak langsung investasi terhadap kemiskinan dapat dilihat melalui peningkatan lapangan kerja dan pengurangan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang dihasilkan dari peningkatan permintaan untuk kerja, dan peningkatan tenaga kerja dan keselamatan.

Bende-Nabende (1998) meneliti data dari 5 negara Asia Selatan Timur dan menemukan hubungan langsung yang positif antara PMA dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian itu, dia menemukan bahwa PMA untuk Indonesia, Malaysia dan Filipina tersebut berkorelasi positif terhadap pertumbuhan, sedangkan untuk Singapura dan Thailand adalah negatif terkait. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa FDI mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN sebagian besar melalui modal manusia dan kerja.

Penanaman Modal Asing memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja secara langsung peluang dan secara tidak langsung melalui penciptaan kesempatan kerja di lain organisasi. Hasil kerja tidak langsung yang diciptakan oleh afiliasi asing di negara-negara tuan rumah dapat besar, mungkin lebih besar dari yang dibuat secara langsung. Dengan pertumbuhan produksi internasional bagian dari penciptaan lapangan kerja oleh afiliasi asing bertambah.

Penciptaan lapangan kerja di negara-negara penerima, telah sebagian dikaitkan dengan padat karya dengan sifat kegiatan ekonomi yang ditetapkan oleh perusahaan asing. Ada pula yang mengalami pertumbuhan rendah atau penurunan lapangan kerja dengan adanya afiliasi asing (OECD, 1995)

Selain itu, pertumbuhan ekonomi adalah faktor yang paling penting yang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Dollar and Kraay (2000), dengan menggunakan Deninger dan Juragan Database, menemukan bahwa pertumbuhan cenderung untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin secara proporsional dengan pertumbuhan secara keseluruhan. PMA adalah faktor penting untuk menghasilkan pertumbuhan dan dengan demikian patut disetujui bahwa efek positif PMA cenderung lebih besar daripada efek negatif, sehingga pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, Nelson dan Pack (1999), dan Kakwani (2000).

Selanjutnya, Roemer dan Gugerty (1997) menunjukkan bahwa rata-rata penduduk miskin mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Kenaikan tingkat pertumbuhan per kapita GDP sangat berkorelasi dengan rata-rata pendapatan masyarakat miskin. Nordstrom et al. (1999) menunjukkan bahwa integrasi ekonomi secara umum positif merupakan kontributor untuk penanggulangan kemiskinan, dengan membiarkan orang untuk memanfaatkan produktivitasnya, mereka mendukung potensi

pertumbuhan ekonomi, dan membantu negara untuk mencegah hal yang tak terduga seperti guncangan krisis.

Walaupun tidak ditemukan hubungan langsung antara PMA dan penanggulangan kemiskinan, disimpulkan bahwa efek skala dampak PMA terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan dan kualitas kerja lebih baik. Efek yang merupakan dampak langsung dari terhadap pengurangan kemiskinan, tingkat pendapatan masyarakat miskin, dan peningkatan keterampilan.

Pada umumnya para ekonom bersepakat tingkat investasi berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi, yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru. Dengan begitu, tingkat pengangguran bisa direduksi dan pendapatan masyarakat pun meningkat. Adanya investasi juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan (knowledge) dari negara maju ke negara berkembang.

Dornbusch & Fischer berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa mendatang. Persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu negara menurut Todaro (1981) adalah: Akumulasi modal, termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia; Perkembangan penduduk yang



dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya;Kemajuan teknologi.

Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (output) dan pendapatan di kemudian hari. Untuk membangun hal tersebut mengalihkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi dalam bentuk "*capital formation*" untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Investasi di bidang pengembangan sumberdaya manusia akan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia,sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif.

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat , pendapatan nasional serta kesempatan kerja; penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi (Sadono, 2000).

5. Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran dan Kemiskinan

Kemiskinan adalah permasalahan terbesar yang dihadapi umat manusia di masa modern ini. Secara international, mengurangi penduduk miskin sudah dijadikan sebagai tujuan pembangunan millennium (*Millennium Development Goal*), yaitu mengurangi penduduk miskin menjadi separuh dari keadaan tahun 2000 pada tahun 2015 (Bage, 2001). Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya penting untuk mengurangi kemiskinan.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan angka kemiskinan sudah dibahas oleh banyak peneliti sebelum ini. Bank Dunia dalam Laporan *Monitoring Global* tahun 2005 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memainkan peran sentral dalam upaya menurunkan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan global. Perkembangan ekonomi akan memberikan kesempatan usaha dan kesempatan kerja yang lebih luas kepada masyarakat, termasuk rumah tangga miskin. Dalam *Agenda 21, combating poverty* (United Nations Conference on Environment & Development, 1993) ditegaskan bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang adalah bentuk langsung menekan angka kemiskinan melalui penciptaan kesempatan kerja dan program-program peningkatan pendapatan masyarakat. Thiel (2005) lebih tegas lagi menekan bahwa pengurangan penduduk miskin tidak mungkin dilakukan jika ekonomi tidak berkembang.

Pertumbuhan ekonomi adalah syarat utama dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan masalah klasik dalam pembangunan ekonomi. Ada beberapa pendapat yang bertolak belakang mengenai keterkaitan diantara dua konsep tersebut. Beberapa ahli berpendapat bahwa kemiskinan dapat dikurangi dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun sebaliknya beberapa ahli yang mengadakan studi empiris ada yang menemukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru menambah kemiskinan. Beberapa study empiris, dengan pendekatan time series (data di setiap negara) dan data yang bersifat cross-section antar negara, beberapa study memberikan kesimpulan yang beragam.

Deininger dan Squire (dalam Tambunan: 2001) menyimpulkan ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan peningkatan angka kemiskinan. Namun studi yang dilakukan oleh (World Bank, Fields dan Jakobson dan Ravallion 2001), menunjukkan tidak ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Kajian kajian empiris di atas pada hakekatnya adalah menguji hipotesis Kuznets di mana hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan negatif, sebaliknya hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi adalah hubungan positif. Hubungan ini sangat terkenal dengan nama kurva U terbalik dari Kuznets. Maka kedua studi yang mempunyai hasil bertolak belakang tersebut, justru menguatkan hipotesis dari Kuznets dengan kurva U terbalik.

Kuznets menyimpulkan bahwa pola hubungan yang positif kemudian menjadi negatif, menunjukkan terjadi proses evolusi dari distribusi pendapatan dari masa transisi suatu ekonomi pedesaan (rural) ke suatu ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi industri. Indonesia termasuk negara yang memiliki keyakinan bahwa kemiskinan dapat dikurangi dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi (terutama pada masa Orde Baru) dimana angka pertumbuhan ekonomi pernah mencapai delapan 8 %, namun hasilnya jauh dari apa yang diharapkan angka kemiskinan masih tinggi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan persyaratan untuk mengurangi kemiskinan, karena pertumbuhan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin secara proporsional melalui pertumbuhan secara menyeluruh (Dollar and Kraay,2000).

Meskipun secara umum pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi pengurangan kemiskinan, namun di beberapa negara tidak terjadi demikian (World Bank,2000), karena tidak ada rumusan yang paling tepat dalam menerjemahkan pertumbuhan tersebut dalam upaya pengurangan kemiskinan, setiap negara menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dalam menetapkan bahwa pertumbuhan diarahkan untuk mengurangi kemiskinan (World Bank, 2000).

Siwar dan Idris (1996) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak seiring dengan penghapusan kemiskinan dan perbaikan pendapatan. Sebagian besar negara berkembang mengalami pertumbuhan yang tinggi,

namun manfaatnya amat sedikit yang menetes ke bawah untuk sampai pada golongan masyarakat miskin dan sangat miskin.

Schneider (2003) justru mendebatkan antara upaya penurunan angka kemiskinan dengan stabilitas ekonomi makro suatu negara. Disebutkannya bahwa upaya untuk menstabilkan tingkat inflasi, menurunkan defisit anggaran dan meningkatkan cadangan devisa, tentunya pengeluaran untuk belanja sosial (pelayanan kesehatan dasar, pendidikan, air bersih dan pembangunan wilayah pedesaan) menjadi berkurang. Selama ini otoritas makro ekonomi cenderung memilih untuk menstabilkan indikator ekonomi makro tersebut dibanding pengelolaan ekonomi makro yang memihak pada masyarakat miskin.

Simon Kuznets pada tahun 1955 dalam tulisannya yang berjudul *Economic Growth and Income Inequality* dan dimuat di jurnal *American Economic Review*, memaparkan bentuk hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembagian pendapatan (Ali dan Ismail, 1996. Mubyarto dan Bromley, 2003). Hipotesis Kuznets yang terkenal dengan Hipotesis U terbalik menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan, kesenjangan pembagian pendapatan antar masyarakat sangat tajam yang ditandai dengan tingginya indeks gini yang tinggi. Kesenjangan ini muncul karena pada saat awal pembangunan ekonomi, masukan modal dan teknologi untuk merubah perekonomian dari tradisional menjadi modern hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil elit, sementara modal yang terbentuk belum mampu diteteskan ke bawah, ke golongan masyarakat

mayoritas miskin. Akan tetapi seiring dengan kemajuan ekonomi, perkembangan industri, terbuka lapangan kerja yang luas, masyarakat yang semula berada di pedesaan dan bekerja di sektor primer pindah ke perkotaan dan bekerja di sektor industri, maka secara perlahan kesenjangan pembagian pendapatan mulai kembali turun. Pergerakan indeks gini, yang bila digambar secara grafis sepanjang periode pembangunan ekonomi akan seperti huruf U terbalik .

Terdapat beberapa pendapat berbeda tentang pertumbuhan ekonomi yang *pro-poor* . Ada yang menyatakan sebagai pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat miskin secara proporsional dalam arti bahwa peningkatan pendapatan si miskin lebih besar dibandingkan yang tidak miskin (Pernia, 2003) . Pendapat lain mengemukakannya sebagai pertumbuhan ekonomi yang terkait secara langsung dengan pengurangan jumlah kemiskinan absolut(Ravallion and Chen, 2003;DFID).

Elastisitas Pengurangan Kemiskinan, elastisitas dalam hal ini dilihat dari perbandingan antara laju penurunan persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauhmana kemampuan perkembangan perekonomian dalam menurunkan atau meningkatkan persentase penduduk miskin. Semakin tinggi elastisitas pengurangan angka kemiskinan berarti semakin tinggi pula keterkaitan antara perkembangan ekonomi dalam kaitannya dengan dinamika persentase penduduk miskin. Angka elastitas yang bernilai



mayoritas miskin. Akan tetapi seiring dengan kemajuan ekonomi, perkembangan industri, terbuka lapangan kerja yang luas, masyarakat yang semula berada di pedesaan dan bekerja di sektor primer pindah ke perkotaan dan bekerja di sektor industri, maka secara perlahan kesenjangan pembagian pendapatan mulai kembali turun. Pergerakan indeks gini, yang bila digambar secara grafis sepanjang periode pembangunan ekonomi akan seperti huruf U terbalik .

Terdapat beberapa pendapat berbeda tentang pertumbuhan ekonomi yang *pro-poor* . Ada yang menyatakan sebagai pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat miskin secara proporsional dalam arti bahwa peningkatan pendapatan si miskin lebih besar dibandingkan yang tidak miskin (Pernia, 2003) . Pendapat lain mengemukakannya sebagai pertumbuhan ekonomi yang terkait secara langsung dengan pengurangan jumlah kemiskinan absolut(Ravallion and Chen, 2003;DFID).

Elastisitas Pengurangan Kemiskinan, elastisitas dalam hal ini dilihat dari perbandingan antara laju penurunan persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauhmana kemampuan perkembangan perekonomian dalam menurunkan atau meningkatkan persentase penduduk miskin. Semakin tinggi elastisitas pengurangan angka kemiskinan berarti semakin tinggi pula keterkaitan antara perkembangan ekonomi dalam kaitannya dengan dinamika persentase penduduk miskin. Angka elastitas yang bernilai



positif berarti terdapat hubungan terbalik antara pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan angka kemiskinan. Semakin besar laju pertumbuhan ekonomi menyebabkan semakin cepat turunnya angka kemiskinan.

Demikian pula sebaliknya, angka elastisitas yang bernilai negatif memperlihatkan terdapat hubungan positif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan laju pertumbuhan persentase penduduk miskin. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi semakin tinggi pula laju perkembangan persentase penduduk miskin.

Pertumbuhan dengan Pengangguran

Pengangguran adalah suatu permasalahan yang ada di seluruh negara dan mempengaruhi banyak, bila jumlah orang-orang yang menganggur sangat tinggi, sehingga lebih sedikit orang yang akan membelanjakan uang mereka dan membatasi belanja yang tak perlu dan menjadi lebih hemat dengan pendapatan mereka. Hal ini mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan, karena bila lebih sedikit orang yang membelanjakan uang akan menyebabkan bisnis menghasilkan jumlah penjualan yang lebih rendah dan mempengaruhi banyak perusahaan utama. Pada saat orang-orang tidak bekerja, jumlah jasa dan barang-barang yang dapat diproduksi berkurang dan lebih rendah. Penduduk akan terus kehilangan pekerjaan sehingga perlu dilakukan perubahan pada bidang ekonomi.

Pada sisi lain ketika pengangguran berkurang, GDP meningkat dan peningkatan output perusahaan. Kondisi ini menunjukkan suatu hal baik, kecuali jika terjadi kenaikan pada tingkat tarip. Jika GDP meningkat dengan cepat kemudian harga produk dan jasa akan naik dan mendorong ke arah inflasi. Ekonomi cenderung untuk bergerak dalam suatu siklus berkelanjutan hingga di masa datang. Dalam ekonomi, peningkatan permintaan untuk tenaga kerja akan berdampak terhadap menurunnya pengangguran.

Dalam perdebatan ahli ekonomi, sering dinyatakan bahwa suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga menunjukkan pengangguran yang lebih rendah, hal ini memang benar dalam jangka pendek. Akan tetapi dalam jangka panjang pengangguran tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi.

Apakah sebenarnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, pendapat umum menyatakan adanya hubungan antara satu dengan lainnya, akan tetapi ada pendapat yang mengemukakan bahwa peningkatan produktivitas berarti berkurangnya pekerjaan.

Seringkali sulit untuk membedakan antara peningkatan output yang berarti peningkatan kapasitas utilitas pada jangka panjang. Perubahan dalam peraturan perburuhan menyebabkan penurunan biaya upah dengan demikian akan meningkatkan ketenaga-kerjaan, tentu saja, hal tersebut juga menyebabkan pertumbuhan output dalam jangka

panjang. Selama proses penyesuaian output akan diperkuat dengan peningkatan modal , sehingga investasi akan menjadi lebih menguntungkan dan mengarah pada peningkatan produktifitas buruh dan selanjutnya akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. (Bean, 1998).

Hipotesa lain mengungkapkan bahwa pengangguran itu sendiri akan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Bila demikian peraturan pasar buruh yang mengatur pengurangan pengangguran akan mendorong pertumbuhan ekonomi, hal tersebut terjadi dalam model teori pertumbuhan endogen.

Salah satu argumen yang sama (Daveri and Tabellini, 2000). Peningkatan pekerja berarti peningkatan agregat pendapatan dalam ekonomi dengan tingkat tabungan yang tinggi, ini berarti bahwa peningkatan tenaga kerja akan meningkatkan tingkat tabungan. Peningkatan pekerja juga berarti meningkatkan cadangan modal dan didukung dengan peningkatan buruh . Sehingga tingkat tabungan juga semakin meningkat pula. Pendapatan agregat yang diikuti dengan peningkatan tingkat tabungan berarti akan lebih banyak akumulasi modal dengan demikian pertumbuhan juga meningkat.

Pendapat yang serupa, bahwa bursa kerja yang tinggi dengan keterampilan yang rendah akan mendorong pertumbuhan karena akan lebih menguntungkan bila melakukan investasi sumber daya manusia. Tenaga kerja yang tinggi juga berarti akumulasi modal SDM, bila

hal tersebut terlaksana dengan cara belajar sambil bekerja pada pekerjaannya. (Aghion and Howitt, 1994; Daveri and Tabellini, 2000).

Akan tetapi akan berdampak yang berbeda bila peningkatan tenaga kerja cenderung akan mengurangi waktu rata-rata yang digunakan dalam system pendidikan sebelum para siswa memasuki bursa kerja (Storesletten and Zilibotti, 2000).

Hubungan antara pendapatan nasional (GDP) dan pengangguran dapat dijelaskan dengan Hukum Okun. Hukum Okun diambil dari nama Arthur Okun, seorang ekonom yang pertama kali mempelajari hubungan antara pendapatan nasional dan pengangguran. Hukum Okun menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara pengangguran dan GDP riil. Hal itu dapat dijelaskan melalui fakta bahwa ketika GDP riil meningkat para pekerja membantu dalam proses memproduksi barang sedangkan para penganggur tidak. Oleh karena itu, peningkatan dalam tingkat pengangguran akan menyebabkan pendapatan berkurang.

Lebih jauh, Hukum Okun dapat dijelaskan melalui persamaan berikut : $\text{Perubahan persentase dalam GDP riil} = 3\% - 2 \times \text{Perubahan dalam Tingkat pengangguran}$ berdasarkan persamaan di atas, maka jika tingkat pengangguran tetap sama, GDP riil tumbuh sekitar 3 persen. Pertumbuhan produksi barang serta jasa yang normal ini merupakan hasil dari pertumbuhan angkatan kerja, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Selain itu, untuk setiap poin persentase kenaikan tingkat pengangguran, pertumbuhan GDP riil biasanya turun sekitar 2 persen

(Mankiw, 2003) . Dalam Siregar (2005), Hukum Okun juga menyatakan bahwa laju pengangguran berbanding terbalik dengan selisih laju pertumbuhan ekonomi dalam keadaan normal.

Menurut teori ekonomi klasik, bila pasar mencapai keseimbangan, dimana persediaan permintaan sama; semua orang ingin menjual pada harga pasar. Bagi yang tidak ingin menjual pada harga pasar pekerja ini yang dinyatakan sebagai pengangguran klasik. Peningkatan dalam permintaan untuk tenaga kerja akan berpindah; gerakkan ekonomi sepanjang kurva permintaan, akan meningkatkan ketenaga-kerjaan dan gaji. Permintaan untuk tenaga kerja di dalam suatu perekonomian diperoleh dari permintaan baik barang dan jasa.

Dengan demikian, jika terjadi permintaan jasa dalam peningkatan ekonomi, permintaan untuk tenaga kerja akan meningkat pula , serta meningkatkan gaji dan ketenaga-kerjaan. Kebijakan moneter dan fiskal kedua-duanya dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek , meningkatkan permintaan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

D. Beberapa Hasil Studi Empiris sebelumnya

Untuk membantu penyusunan konstruk teori dan model penelitian ini, telah dirujuk beberapa penelitian terdahulu dengan berbagai variabel dan metode penelitian berikut ini :

Tabel 2. Hasil Studi Empiris Terkait Penelitian

No	Peneliti	Judul/Lokasi	Variabel	Hasil Penelitian
1	Hyun H. Son Nanak Kakwani 2007	Economic Growth and Poverty Reduction : Initial Condition Matter Department of Economics, Macquarie University, Sydney 2109, Australia	Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative signifikan terhadap kemiskinan
2	Raffaele Paci University of Cagliari and) Francesco Pigliano University of Cagliari and) Maurizio Pugno University of Trento) 2001	Disparities in economic Growth and unemployment across the European regions; a sectoral perspective	Pertumbuhan ekonomi , pengangguran	Di beberapa Negara pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran
3	PRADEEP AGRAWAL 2001	Economic Growth and Poverty Reduction: Evidence from Kazakhstan	Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kazakhstan
4	Darwanto Yulia Yustika Sari 2007	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Indonesia	Pertumbuhan ekonomi PAD,DAU Belanja Modal	- secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi ,pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal - secara parsial variabel dependen menyimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD.

5	Brian W. Cashell 2003	Economic Growth, Inflation, and Unemployment: Limits to Economic Policy	Pertumbuhan ekonomi, Inflasi dan pengangguran	Pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran
6	Rizwanul Islam 2004	The Nexus of Economic Growth, Employment and Poverty Reduction: An Empirical Analysis	Economic Growth, Employment, poverty	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap perluasan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan
7	Abustan Mahyuddin 2007	Analisis Vector Auto Regressive (VAR) Terhadap Korelasi Antara Belanja Publik dan pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan, Tahun 1985-2005	APBD PDRB	Hubungan kausalitas antara PDRB dan APBD hanya satu arah yakni PORB sebagai determinan terhadap APBD dan tidak sebaliknya. Berarti bahwa kinerja belanja publik tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
8	MUTURA IMAMUNAH Universitas Gadjah Mada RUSDZ AKBAR Universitas Gadjah Mada 2008	Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera	DAU, PAD dan Belanja Daerah	DAU dan PAD berpengaruh terhadap APBD daerah/kota
9	Deddy Rustiono, SE 2005	Analisis Pengaruh Investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap Pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah	PMA, PMDN, Tenaga Kerja, Belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi	PMA dan PMDN berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Belanja Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
10	Michael Klein Carl Aaron Bitu Hadjimichael 2004	Foreign Direct Investment and Poverty Reduction	pertumbuhan ekonomi Foreign Direct Investment Kemiskinan	Pertumbuhan berpengaruh terhadap kemiskinan FDI menunjang pertumbuhan menjadi faktor penting dalam mengurangi angka kemiskinan

11	Bigsten, Arne and Levin, Jorgen. Helsinki, 2001	Growth, Income Distribution and Poverty	Economic Income Poverty Growth, Distribution,	Kemiskinan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah yang tepat. Kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang cepat dan distribusi pendapatan yang merata akan berpengaruh terhadap percepatan pengurangan kemiskinan
12	Dollar, David, and Aart Kraay, 2000	Growth Is Good for the Poor, Development Research Group, World Bank	Pertumbuhan ekonomi Pendapatan per kapita penduduk miskin Pendapatan per kapita seluruh penduduk	Bila pendapatan perkapita penduduk secara menyeluruh meningkat maka pendapatan penduduk miskin juga meningkat. Kondisi makroekonomi yang stabil dan kebijakan fiskal yg disiplin bukan hanya mempengaruhi peningkatan pendapatan secara menyeluruh ttp juga menunjukkan adanya dampak peningkatan distribusi pendapatan
13	Lars Calmfors and Bertil Holmlund 1998	Unemployment and economic growth: a partial survey	Pengangguran pertumbuhan ekonomi	Tingkat Pengangguran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
14	Roemer, Michael, and Mary Kay Gugerty, 1997.	Does Economic Growth reduce poverty, Harvard Institute For International Development	Pertumbuhan rata-rata 20% pendapatan perkapita sangat miskin Pertumbuhan rata-rata 40% pendapatan perkapita miskin Pertumbuhan ekonomi Pendapatan perkapita nasional	Scr menyeluruh pertumbuhan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan perkapita miskin. Perubahan distribusi pendapatan sangat lambat dan adanya kebijakan untuk meredistribusi pendapatan melalui pengeluaran sangat kecil pengaruhnya terhadap pengurangan kemiskinan
15	Edmund Amann, Nektarios Aslanidis, Frederick Nixon and Bernard Walters School of Economic Studies University of Manchester 2002	Economic Growth and Poverty Alleviation: A reconsideration of Dollar and Kraay.	Average Income Openness Government Inflation Financial Dev. Rule of Law Economic Growth	Pendapatan, Keterbuka pemerintah Tingkat inflasi Anggaran pembangunan Penegakan hukum Secara menyeluruh sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi



16	Marta Luis Cumbi 2006	The Impact of Foreign and Domestic investment on Poverty	PMA, PMDN dan kemiskinan	Investasi asing (PMA) tidak berpengaruh langsung terhadap pengurangan kemiskinan, pengaruhnya melalui pertumbuhan ekonomi
17	Hafiz Mirza Axèlle Giroud Hossein Jalilian John Weiss Nick Freeman Mya Than 2005	Regionalisation, Foreign Direct Investment and Poverty Reduction: The Case of ASEAN	Investasi Asing (PMA), kemiskinan	Investasi asing di negara ASEAN berpengaruh terhadap kemiskinan baik melalui pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja sebagai dampak adanya investasi tersebut
18	Dritsakis, Nikolaos dan Adamopoulos, Antonis. 2004.	A Causal Relationship Between Government Spending and Economic Development: An Empirical Examination of The Greek Economic	Government Spending Economic Growth (GNP)	Pengeluaran Pemerintah Berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi
19	Shenggen Fan Peter Hazell Sukhadeo Thorat 2000	Linkages between Government Spending, Growth, and Poverty in Rural India	Pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan	Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi
20	Neelesh Gounder Pareesh Kumar Narayan Arti Prasad School of Economics, The University of the South Pacific, Suva, Fiji, 2003	An empirical investigation of the relationship between government revenue and expenditure	Pengeluaran dan Pendapatan pemerintah	Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran atau belanja pemerintah
21	Hamzah, Muhammad Zilal. 2005.	Does Block Grant Generates Economic Growth on Province Level In Indonesia After The Implementation of Fiscal Desentralization Policy	Block Grant Economic Growth	Block Grant berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi

22	Francis Applah Joseph A. Ayee Joseph Appeah Kwadwo Baah- Wiredu Richard Martin Jesper Steffensen Svend Trollegaard 2003	Fiscal Decentralisation and Sub-National Government Finance in Relation to Infrastructure and Service Provision in Ghana	Dana desentralisasi Keuangan pemerintah infrastruktur dan pelayanan publik	Dana desentralisasi berpengaruh terhadap belanja pemerintah, secara khusus terhadap penyediaan infrastruktur dan pelayanan public
23	Lorenzo BOETTI (University of Torino) Massimiliano PIACENZA (University of Torino – Gilberto TURATI 2001	Fiscal Decentralization and Spending Efficiency of Local Governments An Empirical Investigation on a Sample of Italian Municipalities	Dana desentralisasi Pengeluaran Pemerintah	Dana desentralisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah
24	Tao Zhang , Heng-fu Zou 2001	Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China	Dana desentralisasi Pengeluaran pemerintah Pertumbuhan ekonomi	Dana desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi
26	Setiyawati, Anis dan Hamzah, Ard. 2007. The 1st Accounting Conference. Jakarta.	Analisa PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, kemiskinan dan Pengangguran	PAD, DAU, DAK Belanja Pemb. Pertmbhan Ekonomi Kemiskinan Pengangguran	PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran
27	Ardi Hamzah (2007)	Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengguran dan kemiskinan (Studi pada 29 kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur)	Rasio Kemandirian1 Rasio Kemandirian 2 Rasio Efektifitas Rasio Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi Kemiskinan Pengangguran	Kinerja Keuangan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan dan pengangguran melalui pertumbuhan Ekonomi

28	Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti 2003	Dampak pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan PDRB Agrishare Industrishare Populasi Inflasi Tingkat pendidikan Dummy Krisis	Pertumbuhan berpengaruh signifikan tapi relatif kecil terhadap kemiskinan Pertumbuhan merupakan syarat keharusan tapi harus didukung syarat kecukupan yaitu laju inflasi dan populasi Industrialisasi tepat dan kualitas SDM.
29	Pierre-Richard Agénor, Halliworth Professor of International Macroeconomics and Development Economics Centre for Growth and Business Cycle Research University of Manchester, United Kingdom 2007	The Macroeconomics of Poverty Reduction	Tenaga kerja Pengeluaran pemerintah Pertumbuhan ekonomi Kemiskinan	Tingkat pendidikan dan tenaga kerja terserap, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan
30	Kishore G. Kulkarni, Ph.D., Professor of Economics, Metropolitan State College of Denver, 2003	Dualistic Economic Structure and Unemployment in China	Struktur ekonomi Pengangguran	Perubahan struktur ekonomi dari sector primer ke sekunder berpengaruh signifikan terhadap pengurangan pengangguran
31	Henry Willebal Luis Bértola Economic and Social History Programme, Faculty of Social Sciences, Universidad de la República, Uruguay 2004	Distribution, Structural Change and Economic Performance in Settler Societies, 1870-2000	Distribusi pendapatan Pertumbuhan ekonomi Perubahan struktur ekonomi	Distribusi pendapatan dan kesejahteraan berpengaruh terhadap pola produktivitas dan perdagangan secara khusus dimana kedua hal tersebut merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi perubahan teknologi, pertumbuhan dan performa ekonomi lainnya.

32	A.Heny Mulawati 2010	Pengaruh Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam APBD Kota dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan di Daerah Perkotaan Indonesia	Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Desentralisasi Fiskal Pertumbuhan Ekonomi Investasi PAD Pengangguran Kemiskinan	Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tidak Berpengaruh Terhadap Kemiskinan di daerah perkotaan Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap kemiskinan Investasi berpengaruh terhadap kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi Tidak berpengaruh terhadap kemiskinan PAD Tidak berpengaruh terhadap kemiskinan
----	-------------------------	--	--	--

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam penelitian ini dirancang kerangka konseptual yang mengacu pada prinsip penulisan karya ilmiah, berdasarkan teori dan konsep yang diuraikan sebagai berikut :

Peranan pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian sangat ditentukan oleh kebijakan anggaran dalam memberikan ruang gerak bagi aktifitas perekonomian. Pola belanja pemerintah yang ekspansif dan terarah akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik . Peran tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (Aziz, 2006). Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, (Mardiasmo, 2002)

Anggaran daerah memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, karena di dalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan *input* dan *output* dalam satuan keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan anggaran

harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Dimana efektivitas pengeluaran akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelayanan publik, yang akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

Selain itu, sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral anggaran harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakat, maupun aspek kebijakan. Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik, maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik.



Sebagai bagian dari anggaran belanja publik, anggaran pemberdayaan ekonomi memiliki hubungan timbal balik dengan pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatnya pengeluaran atau belanja pemerintah maka pertumbuhan akan meningkat pula (Keynesian, Mankiw, 2007) , dan sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka tingkat penerimaan pemerintah dari sektor pajak juga meningkat yang akhirnya meningkatkan pengeluaran pemerintah. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga mencerminkan semakin besarnya kebutuhan layanan jasa pemerintah, sehingga dibutuhkan anggaran pemerintah yang semakin besar pula.(Wagner, 1983 dalam Mankiw, 2007 dan Donrbusch, et,al, 1987)

Alokasi anggaran pemberdayaan ekonomi dalam APBD kota diperuntukkan bagi program-program pemberdayaan ekonomi rakyat dalam rangka mewujudkan keberdayaan ekonomi seluruh masyarakat, terutama kelompok marginal yaitu masyarakat miskin dan juga pengangguran. Sebagaimana diketahui bahwa kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan krusial di wilayah perkotaan, sehingga memerlukan penanganan secara khusus, antara lain melalui intervensi program pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui anggaran tersebut angka diharapkan kemiskinan dan jumlah pengangguran di perkotaan dapat berkurang.

Investasi Sebagai salah satu elemen pokok dalam kegiatan ekonomi makro, selain konsumsi, tabungan, pengeluaran pemerintah, pajak, ekspor dan Impor, menyebabkan besar kecilnya investasi secara langsung akan mempengaruhi besaran pertumbuhan ekonomi. Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasikal dari Solow, dan teori Endogen oleh Romer menyatakan bahwa terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yakni: akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

Dalam kaitannya dengan kemiskinan diharapkan sumber-sumber pertumbuhan tersebut dapat menurunkan kemiskinan. Investasi melalui penyerapan tenaga kerjanya baik oleh swasta maupun oleh pemerintah, perkembangan teknologi yang semakin inovatif dan produktif dan pertumbuhan penduduk melalui peningkatan modal manusia (*human capital*).

Bila pertumbuhan ekonomi dikontribusi oleh seluruh elemen ekonomi secara simultan, tentu akan meningkatkan kesempatan berusaha (termasuk wirausaha) dan kesempatan kerja secara terdistribusi. Sebagai mesin perekonomian, output yang dihasilkan secara bersamaan akan memberi input ke berbagai sektor, di antaranya kepada masyarakat berupa upah, gaji, sewa, dan lainnya, sehingga diasumsikan dapat menurunkan tingkat

kemiskinan. Selain hal tersebut, dengan adanya investasi-investasi baru memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Dengan demikian akan menambah output dan pendapatan baru pada faktor produksi akan menambah output nasional sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi

Perubahan besar pada investasi akan mempengaruhi permintaan agregat (efek jangka pendek) yang pada akhirnya berakibat juga pada output dan kesempatan kerja. Kemudian investasi mendorong terjadinya akumulasi modal yang dapat meningkatkan output potensial suatu bangsa dan merangsang pertumbuhan ekonomi (efek jangka panjang). Iklim investasi yang baik akan menumbuhkan pertumbuhan investasi melalui penanaman investasi dengan dukungan produktifitas yang tinggi. Oleh karena itu setiap pemerintah daerah akan berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan investasi di daerahnya (Samuelson dan Nordhaus dalam Lailatussholihah, 2005).

Faktor lain yang juga diharapkan dapat mendorong kemampuan keuangan daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah desentralisasi fiskal yang

bertujuan untuk mendukung pendanaan atas urusan-urusan yang telah diserahkan kepada daerah, agar daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik, diharapkan dapat memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan mendorong perkembangan ekonomi melalui pembangunan daerah. Selain itu tujuan utama pemberian dana perimbangan dalam kerangka otonomi daerah untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah (*equalizing transfer*) (Ehtisham, 2002).

Dana Alokasi Umum selain untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, juga diharapkan dapat menstimulasi pembangunan daerah. Transfer ke daerah dari tahun ke tahun dapat meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antara pusat dan daerah dan antar daerah, serta mendukung pembangunan daerah dalam upaya menanggulangi kemiskinan (*pro poor*), memperluas lapangan kerja (*pro job creation*), dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*)

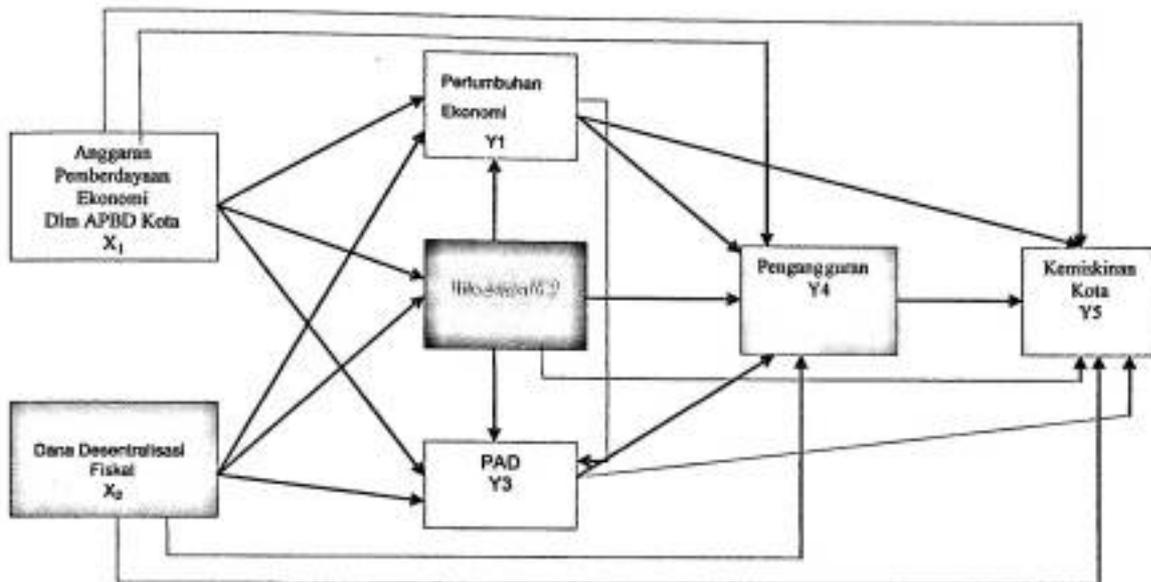
Sumber pendanaan pembangunan lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut hipotesis pajak yaitu bila pajak meningkat maka pengeluaran juga meningkat . Dengan demikian terdapat hubungan tidak

langsung antara pendapatan dengan kemiskinan dan pengangguran melalui pengeluaran pemerintah, berkurangnya pendapatan berpengaruh bagi pengurangan belanja pemerintah, hal tersebut menjadi tantangan terberat bagi negara berkembang terutama menghadapi permasalahan ekonomi dan sosial seperti ; kemiskinan, pengangguran , kriminal (Schade, 2005; Khattry, 2003; Khattry and Rao, 2002; Ndikumana, 2004; Rao, 1999; Kumar et al. 2007; Gupta et al. 2002; 2005; Dabla-Norris and Matovu, 2002; Zaghini,2001; Annett, 2002; Baldacci et al. 2004, Gupta et al. 2003; Basu and Morrissey, 1997; Tanzi, 1993).

Selama ini tidak didapatkan hubungan langsung antara PAD terhadap kemiskinan dan pengangguran, akan tetapi hubungannya secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi atau anggaran belanja pemerintah. Sebagaimana penelitian di beberapa negara tentang hubungan antara pendapatan pemerintah dengan pengeluaran (belanja).

Berdasarkan konsep dan teori di atas dirancang kerangka konseptual sebagai berikut :

Gambar 8 . Kerangka Konseptual Penulisan Disertasi



Keterangan :

- X_1 = Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- X_2 = Dana Desentralisasi Fiskal
- Y_1 = Pertumbuhan Ekonomi
- Y_2 = Investasi
- Y_3 = PAD
- Y_4 = Pengangguran
- Y_5 = Kemiskinan



Tabel .3. Kedudukan Variabel Penelitian, Sifat Pengaruh antar Variabel dan Penelitian yang Mendukung , Variabel eksogen

Variabel Utama	Indikator	Peneliti
X1=Anggaran pemberd. Ekonomi	1. Jumlah Anggaran pemberdayaan Ekonomi dalam APBD Kota	1.Dritsakis, Nicolaos Adamopoulos, Antonis. 2. Shenggen Fan Peter Hazell Sukhadeo Thorat 3. Neelesh Gounder Paresh Kumar Narayan Arti Prasad
X2 = Desentralisasi Fiskal	DAU dan Dana Perimbangan	1. Francis Appiah Joseph A. Ayee Joseph Appeah Kwadwo Baah-Wiredu Richard Martin Jesper Steffensen Svend Trollegaard 2. Hamzah, M. Zilal 3. Lorenzo BOETTI 4. Tao Zhang , Heng-fu Zou

Tabel .4. Kedudukan Variabel Penelitian, Sifat Pengaruh antar Variabel dan Penelitian yang Mendukung , Variabel endogen

Variabel Utama	Indikator	Peneliti
Y1= Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	1. Hyun H. Son Nanak Kakwani 2. Pradeep Agrawal 3. Brian W. Cashell 4. Bigsten, Arne Levin, Jorgen. Helsinky,
Y2 = Investasi	1. Investasi Dalam Negeri 2. (Investasi Luar Negeri	1. Michael ,Carl Aaron 2. Marta Luis Cumbi 3. Hafiz Mirza Axèle Giroud Hossein Jallian John Weiss Nick Freeman Mya Than 4. Deddy Rustiono
Y3 = PAD	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1. Darwanto ,Yulia Y 2. Muturah Imamurah Rudz Akbar 3. Setiyawati, Anis dan Hamzah, Ardi.
Y4=Pengangguran	Jumlah Pengangguran	1.Raffaele Paci Francesco Pigliaru Maurizio Pugno 2.Brian W. Cashell 3.Lars Calmfors and Bertil Holmlund
Y5=Kemiskinan Daerah Perkotaan	Jumlah Penduduk Miskin	1.Dollar,AartKraay. 2.Edmund Amann, Nektarios Aslanidis, Frederick Nixon and Bernard Walters 3.Roemer, Michael, and Mary Kay Gugerty. 1997.

B. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka konseptual maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Daerah Perkotaan baik secara langsung maupun tidak langsung .melalui pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan pengangguran.
2. Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Daerah Perkotaaan baik secara langsung maupun tidak langsung .melalui ,pertumbuhan ekonomi, PAD dan pengangguran .
3. Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Daerah Perkotaan baik secara langsung maupun tidak langsung.melalui pertumbuhan ekonomi, PAD dan pengangguran..
4. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan daerah perkotaan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi dan pengangguran.
5. PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan daerah perkotaaan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi dan pengangguran

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini didesain untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, dan tujuan penelitian yang hendak dicapai serta menjawab hipotesis yang diambil secara statistik . Desain penelitian ini adalah penelitian observasional yang kausalitas dimana penelitian ini mengumpulkan data anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat, tanpa berusaha untuk mengintervensi dengan unit analisisnya. Berdasarkan analisis datanya, maka penelitian ini merupakan penelitian analisis, karena menganalisa data sample dari populasi Kota dengan menggunakan peralatan Structural Equation Model (SEM) kemudian digeneralisasikan. Berdasarkan perumusan masalahnya, penelitian ini menghubungkan antara Kinerja Makro Ekonomi dan Desentralisasi Fiskal dengan beberapa variabel yang mempengaruhi besarnya Anggaran pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota.

B. Daerah Penelitian

Dalam konteks administrasi pemerintahan di Indonesia, kota adalah pembagian wilayah administratif setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang walikota. Selain kota, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kabupaten. Secara umum, baik kabupaten dan

kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten dan kota bukan bawahan dari provinsi, karena itu bupati atau walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Setiap kota memiliki keunikan dan ciri tersendiri dalam perkembangannya, berawal dari sebuah kota kecil dengan komunitas penduduk terbatas dan aktivitas perekonomian yang hanya untuk memenuhi kebutuhan kota itu sendiri, hingga berkembang menjadi kota besar metropolitan bahkan megapolitan dengan berbagai permasalahan yang kompleks, diantaranya kemiskinan dan pengangguran. Penelitian ini dilakukan di 24 kota dan dianggap sudah mewakili seluruh wilayah dan kota di Indonesia yang berjumlah 98 . Penetapan lokasi kota terpilih dilakukan secara purposive dengan melihat beberapa aspek yang dimiliki kota tersebut yaitu : sebagai ibukota provinsi, kota penyangga, kota pemekaran, mewakili pulau tertentu, angka kemiskinan, pengangguran, dan PAD, kota yang dipilih sebagai lokasi penelitian sebagai berikut :

Tabel.5. Kota Lokasi Penelitian

NO	LETAK	KOTA	KATEGORI KOTA
1	SUMATERA	PALEMBANG	BESAR
2	JABAR	BOGOR	MENENGAH
3	JABAR	SUKABUMI	MENENGAH
4	JABAR	BANDUNG	BESAR
5	JABAR	BEKASI	MENENGAH
6	JABAR	DEPOK	MENENGAH
7	JABAR	CIMAHI	MENENGAH
8	JATENG	SURAKARTA	BESAR
9	JATENG	SEMARANG	BESAR
10	JATENG	YOGYAKARTA	BESAR
11	JATIM	MALANG	MENENGAH
12	JATIM	PASURUAN	KECIL
13	JATIM	SURABAYA	BESAR
14	BALI	DENPASAR	MENENGAH
15	KALTIM	BALIKPAPAN	MENENGAH
16	KALTIM	SAMARINDA	BESAR
17	SULUT	MANADO	BESAR
18	SULSEL	MAKASSAR	BESAR
19	SULSEL	PARE-PARE	KECIL
20	SULTRA	KENDARI	MENENGAH
21	GORONTALO	GORONTALO	MENENGAH
22	MALUKU	AMBON	MENENGAH
23	PAPUA	JAYAPURA	MENENGAH
24	DKI	JAKARTA SELATAN	BESAR

Sumber : Ditjen Otonomi Daerah Depdagri, 2009



C. Proses dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui proses pengumpulan data sekunder yang terkait dengan variabel penelitian di beberapa kantor yaitu: BPS Pusat, BKPM Pusat, Bappeda Kota, Dinas Koperasi dan UMKM Kota, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya dilakukan analisis statistik untuk memecahkan masalah serta menjawab hipotesis.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wilayah kota di Indonesia yaitu sebanyak 104 kota. Data yang dianalisis adalah data sekunder :

- Pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari Kota Dalam Angka
- Investasi (PMA dan PMDN) bersumber dari BKPM dan KPM
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Desentralisasi (DAU) bersumber dari Laporan Realisasi APBD Kota.
- Data Kemiskinan bersumber dari Data Kemiskinan Indonesia BPS
- Data Pengangguran bersumber dari Kota Dalam Angka dan Statistik Pengangguran BPS.
- Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat bersumber dari APBD Kota dan LPJ Walikota.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2007).

Besarnya ukuran sampel didasarkan pada analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis. Sebanyak 24 kota dengan data panel 8 variabel selama 5 tahun. Penelitian ini menggunakan SEM, dengan model dasar path analysis, sehingga ukuran sampel ditentukan oleh korelasi yang terkecil di antara variabel yang ada dalam jalur. Untuk menentukan besaran sampel, maka penelitian Roscoe (1982:253) dalam Sugiyono (2007:74) mengatakan bahwa :

- a. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian antara 30 sampai 500.
- b. Bila sampel dibagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel dalam kategori minimal 30.
- c. Bila penelitian menggunakan multivariate analisis (Regresi dan Korelasi) maka jumlah sampel sebanyak 10 kali jumlah variabel.
- d. Jika penelitian eksperimen yang sederhana, maka jumlah sampel dalam kelompok 10 sampai 20.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini Metode Survei Kepustakaan untuk mendapatkan data Sekunder, yaitu dokumen dan catatan yang diterbitkan oleh lembaga terkait, misalnya laporan periodik atau dokumen yang diterbitkan oleh

Instansi Pemerintah, seperti Biro Pusat Statistik, Bappeda, dan Instansi terkait lainnya.

F. Model dan Teknik Analisis Data

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan struktural atau structural equation modeling (SEM) untuk mengetahui hubungan kausal antar variabel laten yang terdapat dalam persamaan struktural.

Untuk menganalisis data hasil survei, menginterpretasi hasil penelitian serta untuk menguji hipotesis, maka digunakan analisis deskriptif, pengujian model pengukuran, pengujian model overall, pengujian model struktural serta pengujian hubungan variabel terobservasi. Untuk memudahkan proses analisis digunakan beberapa program aplikasi statistik, antara lain SPSS (Statistical Package for Service Solution) dan AMOS (Analisis Moment of Structure) yang merupakan paket dalam program SEM (*Structural Equation Model*).

1. Analisis Deskriptif

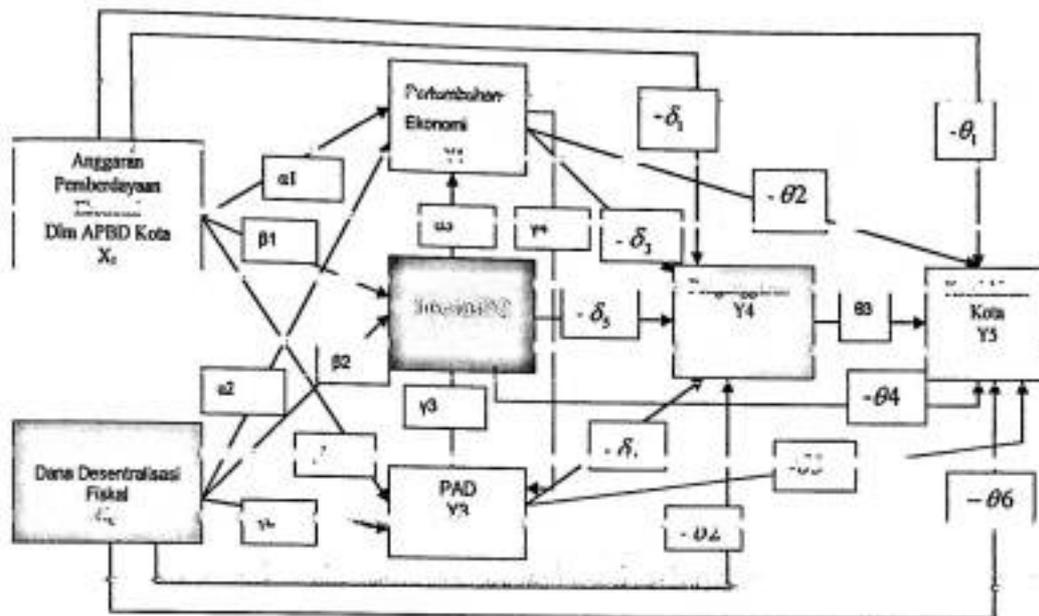
Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel penelitian baik *exogenous variable* maupun *endogenous variable*, meliputi : Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Investasi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Perubahan Struktur Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kemiskinan Kota

2. Analisis Model Struktural

Pengujian model struktural digunakan setelah diperoleh model keseluruhan fit yang bertujuan untuk menguji hipotesis hubungan kausal antar construct (Hair et.al., 1992). Uji statistik yang digunakan adalah uji t yang didasarkan pada *critical value*. Nilai t_{hitung} dalam program AMOS ditunjukkan oleh critical ratio (CR). Signifikansi hubungan dapat ditentukan berdasarkan nilai CR atau nilai probabilitas (P) dalam program AMOS. Berdasarkan tabel distribusi t (Walpole, 1995) critical value pada tingkat ketelitian 10% atau 1,28, tingkat ketelitian 5% adalah 1,65 dan tingkat ketelitian 1% adalah 2,33 (menggunakan dua arah). Tingkat signifikansi dalam penelitian ini digunakan 5%, sehingga hubungan tersebut dikatakan signifikan jika nilai $CR \geq 1.65$ atau $P \leq 0,05$.

Untuk mengetahui pengaruh Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam APBD (X_1), dan Pengaruh Dana Desentralisasi Fiskal (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y_1), Investasi (Y_2), Pendapatan Asli Daerah (Y_3), Pengangguran (Y_4), dan Kemiskinan Perkotaan (Y_5), data dianalisis dengan menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan paket program AMOS (*Analysis Moment of Structure*) dengan kerangka analisis struktur persamaan sebagai berikut:

Gambar 9. Model Struktural Penelitian



Berdasarkan kerangka analisis di atas, dibentuk model fungsional

sebagai berikut:

$$Y_1 = f(Y_2, X_1, X_2) \dots\dots\dots (1)$$

$$Y_2 = f(X_1, X_2) \dots\dots\dots (2)$$

$$Y_3 = f(Y_1, Y_2, X_1, X_2) \dots\dots\dots (3)$$

$$Y_4 = f(Y_1, Y_2, Y_3, X_1, X_2) \dots\dots\dots (4)$$

$$Y_5 = f(Y_1, Y_2, Y_3, Y_4, X_1, X_2) \dots\dots\dots (5)$$

Sehingga dari persamaan (5), kemiskinan (Y_5) dapat ditulis ulang menjadi:

$$Y_5 = f((Y_1(Y_2, X_1, X_2), Y_2(X_1, X_2), Y_3(Y_1, Y_2, X_1, X_2), Y_4(Y_1, Y_2, Y_3, X_1, X_2), X_1, X_2, \dots)) \dots\dots\dots (1a)$$



Persamaan (1 - 5) merupakan persamaan non-linier dan dapat dinyatakan dalam bentuk lain untuk estimasi regresi linier dengan mentransferkan ke dalam semi logaritma natural sebagai berikut:

$$Y_1 = \ln A_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 Y_2 + \varepsilon_1 \dots\dots\dots(5a)$$

Dimana $\ln A_0$ = konstanta α_0 dan ε_1 adalah random error dari Pertumbuhan Ekonomi (Y_1)

$$Y_2 = \ln B_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon_2 \dots\dots\dots(6a)$$

Dimana $\ln B_0$ = konstanta β_0 dan ε_2 adalah random error dari Investasi (Y_2)

$$Y_3 = \ln C_0 + \gamma_4 Y_1 + \gamma_3 Y_2 + \gamma_1 X_1 + \gamma_2 X_2 + \varepsilon_3 \dots\dots\dots(7a)$$

Dimana = konstanta γ_0 dan ε_3 adalah random error dari PAD (Y_3)

$$Y_4 = \ln D_0 + \delta_3 Y_1 + \delta_5 Y_2 + \delta_4 Y_2 + \delta_1 X_1 + \delta_2 X_2 + \varepsilon_4 \dots\dots\dots(8a)$$

Dimana $\ln D_0$ = konstanta δ_0 dan ε_4 adalah random error dari Pengangguran (Y_4)

$$Y_5 = \ln E_0 + \theta_2 Y_1 + \theta_4 Y_2 + \theta_5 Y_3 + \theta_3 Y_4 + \theta_1 X_1 + \theta_6 X_2 + \varepsilon_5 \dots\dots\dots(9a)$$

Dimana $\ln E_0$ = konstanta θ_0 dan ε_5 adalah random error dari Kemiskinan (Y_5)

Persamaan (5a – 9a) dapat ditulis kembali menjadi:

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_3 Y_2 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \varepsilon_1$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon_2$$

$$Y_3 = \gamma_0 + \gamma_4 Y_1 + \gamma_3 Y_2 + \gamma_1 X_1 + \gamma_2 X_2 + \varepsilon_3$$

$$Y_4 = \delta_0 + \delta_3 Y_1 + \delta_5 Y_2 + \delta_4 Y_2 + \delta_1 X_1 + \delta_2 X_2 + \varepsilon_4$$

$$Y_5 = \theta_0 + \theta_2 Y_1 + \theta_4 Y_2 + \theta_5 Y_3 + \theta_3 Y_4 + \theta_1 X_1 + \theta_6 X_2 + \epsilon_5$$

Untuk mengestimasi (5a - 9a) tidak dapat dilakukan dengan OLS (*Ordinary Least Square*) sehingga untuk memperoleh *Reduce Form* dilakukan identifikasi koefisien sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Y_1 - \alpha_3 Y_2 &= \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \epsilon_1 \\ -Y_2 &= \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon_2 \\ -\gamma_4 Y_1 - \gamma_3 Y_2 - Y_3 &= \gamma_0 + \gamma_1 X_1 + \gamma_2 X_2 + \epsilon_3 \\ -\delta_3 Y_1 - \delta_5 Y_2 - \delta_4 Y_3 - Y_4 &= \delta_0 + \delta_1 X_1 + \delta_2 X_2 + \epsilon_4 \\ -\theta_2 Y_1 - \theta_4 Y_2 - \theta_5 Y_3 - \theta_3 Y_4 &= \theta_0 + \theta_1 X_1 + \theta_6 X_2 + \epsilon_5 \end{aligned}$$

Jika ditulis dalam bentuk matriks $AX=B$ maka diperoleh bentuk

$$\begin{bmatrix} Y_1 & -\alpha_3 Y_2 & 0 Y_3 & 0 Y_4 \\ 0 Y_1 & -Y_2 & 0 Y_3 & 0 Y_4 \\ -\gamma_4 Y_1 & -\gamma_3 Y_2 & -Y_3 & 0 Y_4 \\ -\delta_3 Y_1 & -\delta_5 Y_2 & -\delta_4 Y_3 & -Y_4 \\ -\theta_2 Y_1 & -\theta_4 Y_2 & -\theta_5 Y_3 & -\theta_3 Y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \epsilon_1 \\ \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon_2 \\ \gamma_0 + \gamma_1 X_1 + \gamma_2 X_2 + \epsilon_3 \\ \delta_0 + \delta_1 X_1 + \delta_2 X_2 + \epsilon_4 \\ \theta_0 + \theta_1 X_1 + \theta_6 X_2 + \epsilon_5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -\alpha_3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -\gamma_4 & -\gamma_3 & -1 & 0 \\ -\delta_3 & -\delta_5 & -\delta_4 & -1 \\ -\theta_2 & -\theta_4 & -\theta_5 & -\theta_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \\ Y_4 \\ Y_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \epsilon_1 \\ \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon_2 \\ \gamma_0 + \gamma_1 X_1 + \gamma_2 X_2 + \epsilon_3 \\ \delta_0 + \delta_1 X_1 + \delta_2 X_2 + \epsilon_4 \\ \theta_0 + \theta_1 X_1 + \theta_6 X_2 + \epsilon_5 \end{bmatrix}$$

Dengan bentuk *reduce form* sebagai berikut:

1. Model Pertumbuhan Ekonomi :

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 Y_2 + \epsilon_1$$

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 \beta_0 + \alpha_3 \beta_1 X_1 + \alpha_3 \beta_2 X_2 + \alpha_3 \epsilon_2 + \epsilon_1$$

$$Y_1 = (\alpha_0 + \alpha_3 \beta_0) + (\alpha_1 + \alpha_3 \beta_1) X_1 + (\alpha_2 + \alpha_3 \beta_2) X_2 + (\alpha_3 \epsilon_2 + \epsilon_1)$$

$$Y_1 = \pi_0 + \pi_1 X_1 + \pi_2 X_2 + \mu_1$$

2. Model Investasi adalah :

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon_2$$

$$Y_2 = \phi_0 + \phi_1 X_1 + \phi_2 X_2 + \mu_2$$

3. Model Pendapatan Asli Daerah adalah:

$$Y_3 = \gamma_0 + \gamma_4 \alpha_0 + \gamma_4 \alpha_1 X_1 + \gamma_4 \alpha_2 X_2 + \gamma_4 \alpha_3 \beta_0 + \gamma_4 \alpha_3 \beta_1 X_1 + \gamma_4 \alpha_3 \beta_2 X_2 + \gamma_4 \alpha_3 \varepsilon_2 + \gamma_4 \varepsilon_1 + \gamma_3 \beta_0 + \gamma_3 \beta_1 X_1 + \gamma_3 \beta_2 X_2 + \gamma_3 \varepsilon_2 + \gamma_1 X_1 + \gamma_2 X_2 + \varepsilon_3$$

$$Y_3 = (\gamma_0 + \gamma_4 \alpha_0 + \gamma_4 \alpha_3 \beta_0 + \gamma_3 \beta_0) + (\gamma_4 \alpha_1 + \gamma_4 \alpha_3 \beta_1 + \gamma_1) X_1 + (\gamma_4 \alpha_2 + \gamma_4 \alpha_3 \beta_2 + \gamma_2 + \gamma_2) X_2 + (\gamma_4 \alpha_3 \varepsilon_2 + \gamma_4 \varepsilon_1 + \gamma_3 \varepsilon_2 + \varepsilon_3)$$

$$Y_3 = \lambda_0 + \lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \varepsilon_3$$

4. Model Pengangguran adalah

$$Y_4 = \delta_0 + \delta_3(\alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 \beta_0 + \alpha_3 \beta_1 X_1 + \alpha_3 \beta_2 X_2 + \alpha_3 \varepsilon_2 + \varepsilon_1) + \delta_5(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon_2) + \delta_4(\gamma_0 + \gamma_4 \alpha_0 + \gamma_4 \alpha_1 X_1 + \gamma_4 \alpha_2 X_2 + \gamma_4 \alpha_3 \beta_0 + \gamma_4 \alpha_3 \beta_1 X_1 + \gamma_4 \alpha_3 \beta_2 X_2 + \gamma_4 \alpha_3 \varepsilon_2 + \gamma_4 \varepsilon_1 + \gamma_3 \beta_0 + \gamma_3 \beta_1 X_1 + \gamma_3 \beta_2 X_2 + \gamma_3 \varepsilon_2 + \gamma_1 X_1 + \gamma_2 X_2 + \varepsilon_3) + \delta_1 X_1 + \delta_2 X_2 + \varepsilon_4$$

$$Y_4 = \delta_0 + \delta_3 \alpha_0 + \delta_3 \alpha_1 X_1 + \delta_3 \alpha_2 X_2 + \delta_3 \alpha_3 \beta_0 + \delta_3 \alpha_3 \beta_1 X_1 + \delta_3 \alpha_3 \beta_2 X_2 + \delta_3 \alpha_3 \varepsilon_2 + \delta_3 \varepsilon_1 + (\delta_5 \beta_0 + \delta_5 \beta_1 X_1 + \delta_5 \beta_2 X_2 + \delta_5 \varepsilon_2) + (\delta_4 \gamma_0 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_0 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_1 X_1 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_2 X_2 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \beta_0 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \beta_1 X_1 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \beta_2 X_2 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \varepsilon_2 + \delta_4 \gamma_4 \varepsilon_1 + \delta_4 \gamma_3 \beta_0 + \delta_4 \gamma_3 \beta_1 X_1 + \delta_4 \gamma_3 \beta_2 X_2 + \delta_4 \gamma_3 \varepsilon_2 + \delta_4 \gamma_1 X_1 + \delta_4 \gamma_2 X_2 + \delta_4 \varepsilon_3) + \delta_1 X_1 + \delta_2 X_2 + \varepsilon_4$$

$$Y_4 = \delta_0 + \delta_3 \alpha_0 + \delta_3 \alpha_3 \beta_0 + \delta_5 \beta_0 + (\delta_3 \alpha_3 \beta_1 + \delta_3 \alpha_1 + \delta_5 \beta_1 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_1 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \beta_1 + \delta_4 \gamma_1 + \delta_4 \gamma_3 \beta_1 + \delta_4 \varepsilon_3 + \delta_1) X_1 + (\delta_4 \gamma_2 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_2 + \delta_5 \beta_2 + \delta_3 \alpha_2 + \delta_3 \alpha_3 \beta_2 + \delta_4 \gamma_4$$

$$\delta_4 \alpha_3 \beta_2 + \delta_4 \gamma_3 \beta_2 + \delta_2) X_2 + \delta_3 \alpha_3 \epsilon_2 + \delta_3 \epsilon_1 + \delta_5 \epsilon_2 + \delta_4 \gamma_0 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_0 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \beta_0 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \epsilon_2 + \delta_4 \gamma_4 \epsilon_1 + \delta_4 \gamma_3 \beta_0 + \delta_4 \gamma_3 \epsilon_2 + \epsilon_4$$

$$Y_4 = \eta_0 + \eta_1 X_1 + \eta_2 X_2 + \mu_3$$

5. Model Kemiskinan Kota adalah

$$Y_5 = \theta_0 + \theta_3(\alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 \beta_0 + \alpha_3 \beta_1 X_1 + \alpha_3 \beta_2 X_2 + \alpha_3 \epsilon_2 + \epsilon_1) + \theta_4(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon_2) + \theta_5(\gamma_0 + \gamma_4 \alpha_0 + \gamma_4 \alpha_1 X_1 + \gamma_4 \alpha_2 X_2 + \gamma_4 \alpha_3 \beta_0 + \gamma_4 \alpha_3 \beta_1 X_1 + \gamma_4 \alpha_3 \beta_2 X_2 + \gamma_4 \alpha_3 \epsilon_2 + \gamma_4 \epsilon_1 + \gamma_3 \beta_0 + \gamma_3 \beta_1 X_1 + \gamma_3 \beta_2 X_2 + \gamma_3 \epsilon_2 + \gamma_1 X_1 + \gamma_2 X_2 + \epsilon_3) + \theta_6(\delta_0 + \delta_3 \alpha_0 + \delta_3 \alpha_1 X_1 + \delta_3 \alpha_2 X_2 + \delta_3 \alpha_3 \beta_0 + \delta_3 \alpha_3 \beta_1 X_1 + \delta_3 \alpha_3 \beta_2 X_2 + \delta_3 \alpha_3 \epsilon_2 + \delta_3 \epsilon_1) + (\delta_5 \beta_0 + \delta_5 \beta_1 X_1 + \delta_5 \beta_2 X_2 + \delta_5 \epsilon_2 + \delta_4 \gamma_0 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_0 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_1 X_1 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_2 X_2 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \beta_0 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \beta_1 X_1 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \beta_2 X_2 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \epsilon_2 + \delta_4 \gamma_4 \epsilon_1 + \delta_4 \gamma_3 \beta_0 + \delta_4 \gamma_3 \beta_1 X_1 + \delta_4 \gamma_3 \beta_2 X_2 + \delta_4 \gamma_3 \epsilon_2 + \delta_4 \gamma_1 X_1 + \delta_4 \gamma_2 X_2 + \delta_4 \epsilon_3 + \delta_1 X_1 + \delta_2 X_2 + \epsilon_4) + \theta_1 X_1 + \theta_2 X_2 + \epsilon_5$$

$$Y_5 = \theta_0 + \theta_3 \alpha_0 + \theta_3 \alpha_3 \beta_0 + \theta_5 \gamma_0 + \theta_5 \gamma_4 \alpha_0 + \theta_5 \gamma_3 \beta_0 + \theta_6 \delta_0 + \theta_6 \delta_3 \alpha_0 + \theta_6 \delta_3 \alpha_3 \beta_0 + \theta_6 \delta_5 \beta_0 + \theta_6 \delta_4 \gamma_0 + \theta_6 \delta_4 \gamma_4 \alpha_0 + \theta_6 \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \beta_0 + \theta_6 \delta_4 \gamma_3 \beta_0 + \theta_4 \beta_0 + \theta_5 \gamma_4 \alpha_3 \beta_0 + (\theta_3 \alpha_1 + \theta_3 \alpha_3 \beta_1 + \theta_4 \beta_1 + \theta_4 \beta_1 + \theta_5 \gamma_4 \alpha_1 + \theta_5 \gamma_4 \alpha_3 \beta_1 + \theta_5 \gamma_3 \beta_1 + \theta_5 \gamma_1 + \theta_6 \delta_3 \alpha_1 + \theta_6 \delta_3 \alpha_3 \beta_1 + \theta_6 \delta_5 \beta_1 + \theta_6 \delta_4 \gamma_4 \alpha_1 + \theta_6 \delta_4 \gamma_3 \beta_1 + \theta_6 \delta_4 \gamma_1 + \delta_1 + \theta_1 + \theta_6 \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \beta_1) X_1 + (\theta_3 \alpha_2 + \theta_3 \alpha_3 \beta_2 + \theta_4 \beta_2 + \theta_5 \gamma_4 \alpha_2 + \theta_5 \gamma_4 \alpha_3 \beta_2 + \theta_5 \gamma_3 \beta_2 + \theta_5 \gamma_2 + \theta_6 \delta_3 \alpha_2 + \theta_6 \delta_3 \alpha_3 \beta_2 + \theta_6 \delta_5 \beta_2 + \theta_6 \delta_4 \gamma_3 \beta_2 + \theta_6 \delta_2 + \theta_2 + \theta_6 \delta_4 \gamma_2 + \theta_6 \delta_4 \gamma_4 \alpha_2 + \theta_6 \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \beta_2) X_2 + (\theta_3 \alpha_3 \epsilon_2 + \theta_3 \epsilon_1 + \theta_4 \epsilon_2 + \theta_5 \gamma_4 \alpha_3 \epsilon_2 + \theta_5 \gamma_4 \epsilon_1 + \theta_5 \gamma_3 \epsilon_2 + \theta_5 \epsilon_3 + \theta_6 \delta_3 \alpha_3 \epsilon_2 + \theta_6 \delta_3 \epsilon_1 + \theta_6 \delta_5 \epsilon_2 + \theta_6 \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \epsilon_2 + \theta_6 \delta_4 \gamma_4 \epsilon_1 + \theta_6 \delta_4 \gamma_3 \epsilon_2 + \theta_6 \delta_4 \epsilon_3 + \theta_6 \epsilon_4 + \epsilon_5)$$

$$Y_6 = \epsilon_0 + \epsilon_1 X_1 + \epsilon_2 X_2 + \mu_3$$

Berdasarkan bentuk *reduce form* di atas, maka pengaruh masing-masing variabel, baik pengaruh langsung (*Direct Effect*), pengaruh tidak langsung (*Indirect Effect*) maupun pengaruh totalnya (*Total Effect*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta

- a. $\pi_0 = (\alpha_0 + \alpha_3\beta_0) =$ konstanta untuk Y_1
- b. $\phi_0 = \beta_0 =$ konstanta untuk Y_2
- c. $\lambda_0 = (\gamma_0 + \gamma_4\alpha_0 + \gamma_4\alpha_3\beta_0 + \gamma_3\beta_0) =$ konstanta untuk Y_3
- d. $\eta_0 = \delta_0 + \delta_3\alpha_0 + \delta_3\alpha_3\beta_0 + \delta_5\beta_0 =$ konstanta untuk Y_4
- e. $\epsilon_0 = \theta_0 + \theta_3\alpha_0 + \theta_3\alpha_3\beta_0 + \theta_5\gamma_0 + \theta_5\gamma_4\alpha_0 + \theta_5\gamma_3\beta_0 + \theta_6\delta_0 + \theta_6\delta_3\alpha_0 + \theta_6\delta_3\alpha_3\beta_0 + \theta_6\delta_5\beta_0 + \theta_6\delta_4\gamma_0 + \theta_6\delta_4\gamma_4\alpha_0 + \theta_6\delta_4\gamma_3\beta_0 + \theta_6\delta_4\gamma_4\alpha_3\beta_0 + \theta_6\delta_4\gamma_3\beta_0 + \theta_4\beta_0 + \theta_5\gamma_4\alpha_3\beta_0 =$ konstanta untuk Y_5

2. Pengaruh Langsung (Direct Effect)

- a. $\alpha_1 =$ Besarnya pengaruh langsung X_1 terhadap Y_1
 $\alpha_2 =$ Besarnya pengaruh langsung X_2 terhadap Y_1
 $\alpha_3 =$ Besarnya pengaruh langsung Y_2 terhadap Y_1
- b. $\beta_1 =$ Besarnya pengaruh langsung X_1 terhadap Y_2
 $\beta_2 =$ Besarnya pengaruh langsung X_2 terhadap Y_2
- c. $\gamma_1 =$ Besarnya pengaruh langsung X_1 terhadap Y_3
 $\gamma_2 =$ Besarnya pengaruh langsung X_2 terhadap Y_3
 $\gamma_3 =$ Besarnya pengaruh langsung Y_2 terhadap Y_3
 $\gamma_4 =$ Besarnya pengaruh langsung Y_1 terhadap Y_3



- d. $\delta_1 =$ Besarnya pengaruh langsung X_1 terhadap Y_4
 $\delta_2 =$ Besarnya pengaruh langsung X_2 terhadap Y_4
 $\delta_3 =$ Besarnya pengaruh langsung Y_1 terhadap Y_4
 $\delta_4 =$ Besarnya pengaruh langsung Y_3 terhadap Y_4
 $\delta_5 =$ Besarnya pengaruh langsung Y_2 terhadap Y_4
- e. $\theta_1 =$ Besarnya pengaruh langsung X_1 terhadap Y_5
 $\theta_2 =$ Besarnya pengaruh langsung Y_1 terhadap Y_5
 $\theta_3 =$ Besarnya pengaruh langsung Y_4 terhadap Y_5
 $\theta_4 =$ Besarnya pengaruh langsung Y_2 terhadap Y_5
 $\theta_5 =$ Besarnya pengaruh langsung Y_3 terhadap Y_5
 $\theta_6 =$ Besarnya pengaruh langsung X_2 terhadap Y_5

3. Pengaruh Tak Langsung (Indirect Effect)

- a. $\beta_1\alpha_3 =$ Besarnya pengaruh tak langsung X_1 terhadap Y_1 melalui Y_2
 $\beta_2\alpha_3 =$ Besarnya pengaruh tak langsung X_2 terhadap Y_1 melalui Y_2
 $\gamma_1 \gamma_4 =$ Besarnya pengaruh tak langsung X_1 terhadap Y_1 melalui Y_3 ,
 $\gamma_2 \gamma_4 =$ Besarnya pengaruh tak langsung X_2 terhadap Y_1 melalui Y_3
 $\beta_1\alpha_3 \gamma_4 =$ Besarnya pengaruh tak langsung X_1 terhadap Y_1 melalui Y_2 dan Y_3
 $\beta_2\alpha_3 \gamma_4 =$ Besarnya pengaruh tak langsung X_2 terhadap Y_1 melalui Y_2 dan Y_3
- b. $\alpha_1 \alpha_3 =$ Besarnya pengaruh tak langsung X_1 terhadap Y_2 melalui Y_1
 $\alpha_2 \alpha_3 =$ Besarnya pengaruh tak langsung X_2 terhadap Y_2 melalui Y_3
 $\gamma_1 \gamma_3 =$ Besarnya pengaruh tak langsung X_1 terhadap Y_2 melalui Y_3
 $\gamma_2 \gamma_3 =$ Besarnya pengaruh tak langsung X_2 terhadap Y_2 melalui Y_3
- c. $\theta_2\alpha_1 =$ Besarnya pengaruh tak langsung X_1 terhadap Y_5 melalui Y_1

- $\theta_2\alpha_2$ = Besarnya pengaruh tak langsung X_2 terhadap Y_5 melalui Y_1
 $\theta_4\beta_1$ = Besarnya pengaruh tak langsung X_1 terhadap Y_5 melalui Y_2
 $\theta_4\beta_2$ = Besarnya pengaruh tak langsung X_2 terhadap Y_5 melalui Y_2
 $\theta_5\gamma_1$ = Besarnya pengaruh tak langsung X_1 terhadap Y_5 melalui Y_3
 $\theta_5\gamma_2$ = Besarnya pengaruh tak langsung X_2 terhadap Y_5 melalui Y_3
 $\theta_3\alpha_1 \cdot \delta_3$ = Besarnya pengaruh tak langsung X_1 terhadap Y_5 melalui Y_1 dan Y_4
 $\theta_3\beta_1 \cdot \delta_5$ = Besarnya pengaruh tak langsung X_1 terhadap Y_5 melalui Y_2 dan Y_4
 $\theta_3\gamma_1 \cdot \delta_4$ = Besarnya pengaruh tak langsung X_1 terhadap Y_5 melalui Y_3 dan Y_4
 $\theta_3\alpha_2 \cdot \delta_3$ = Besarnya pengaruh tak langsung X_2 terhadap Y_5 melalui Y_1 dan Y_4
 $\theta_3\beta_2 \cdot \delta_5$ = Besarnya pengaruh tak langsung X_2 terhadap Y_5 melalui Y_2 dan Y_4
 $\theta_3\gamma_2 \cdot \delta_4$ = Besarnya pengaruh tak langsung X_2 terhadap Y_5 melalui Y_3 dan Y_4
 $\theta_3 \cdot \delta_1$ = Besarnya pengaruh tak langsung X_1 terhadap Y_5 melalui Y_4
 $\theta_3 \cdot \delta_2$ = Besarnya pengaruh tak langsung X_2 terhadap Y_5 melalui Y_4
 $-\theta_6 \cdot \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \beta_1$ = Besarnya pengaruh tak langsung X_1 terhadap Y_5 melalui Y_3 , Y_2
 dan Y_1
 $\theta_3\alpha_1 \beta_1 \gamma_1 \delta_1$ = Besarnya pengaruh tak langsung X_1 terhadap Y_5 melalui Y_4 , Y_3 ,
 Y_2 dan Y_1
 $-\theta_6 \cdot \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \beta_2$ = Besarnya pengaruh tak langsung X_2 terhadap Y_5 melalui Y_3 , Y_2
 dan Y_1
 $\theta_3\alpha_2\beta_2 \gamma_2 \delta_2$ = Besarnya pengaruh tak langsung X_2 terhadap Y_5 melalui Y_4 , Y_3 , Y_2
 dan Y_1

Pengaruh Total (Total Effect)

1. $\pi_1 = \alpha_3 + \alpha_1\beta_2 + \alpha_1\beta_1\delta_1 + \alpha_2\delta_1 =$ Besarnya total pengaruh X_1 terhadap Y_1

$\pi_2 = \alpha_4 + \alpha_1\beta_3 + \alpha_1\beta_1\delta_2 + \alpha_2\delta_2 =$ Besarnya total pengaruh X_2 terhadap Y_1

2. $\phi_1 = \beta_2 + \beta_1\delta_1 =$ Besarnya total pengaruh X_1 terhadap Y_2

$\phi_2 = \beta_3 + \beta_1\delta_2 =$ Besarnya total pengaruh X_2 terhadap Y_2

3. $\lambda_1 = \gamma_4\alpha_1 + \gamma_4\alpha_3\beta_1 + \gamma_1$ Besarnya total pengaruh X_1 terhadap Y_3

$\lambda_2 = \gamma_4\alpha_2 + \gamma_4\alpha_3\beta_2 + \gamma_2 + \gamma_2$ Besarnya total pengaruh X_2 terhadap Y_3

4. $\eta_1 = \delta_3\alpha_3\beta_1 + \delta_3\alpha_1 + \delta_5\beta_1 + \delta_4\gamma_4\alpha_1 + \delta_4\gamma_4\alpha_3\beta_1 + \delta_4\gamma_1 + \delta_4\gamma_3\beta_1 + \delta_4\epsilon_3 + \delta_1$ Besarnya total pengaruh X_1 terhadap Y_4

$\eta_2 = \delta_4\gamma_2 + \delta_4\gamma_4\alpha_2 + \delta_5\beta_2 + \delta_3\alpha_2 + \delta_3\alpha_3\beta_2 + \delta_4\gamma_4\delta_4\alpha_3\beta_2 + \delta_4\gamma_3\beta_2 + \delta_2$
Besarnya total pengaruh X_2 terhadap Y_4

5. $\epsilon_1 = \theta_3\alpha_1 + \theta_3\alpha_3\beta_1 + \theta_4\beta_1 + \theta_4\beta_1 + \theta_5\gamma_4\alpha_1 + \theta_5\gamma_4\alpha_3\beta_1 + \theta_5\gamma_3\beta_1 + \theta_5\gamma_1 + \theta_6\delta_3\alpha_1 + \theta_6\delta_3\alpha_3\beta_1 + \theta_6\delta_5\beta_1 + \theta_6\delta_4\gamma_4\alpha_1 + \theta_6\delta_4\gamma_3\beta_1 + \theta_6\delta_4\gamma_1 + \delta_1 + \theta_1 + \theta_6\delta_4\gamma_4\alpha_3\beta_1$ Besarnya total pengaruh X_1 terhadap Y_5

$\epsilon_2 = \theta_3\alpha_2 + \theta_3\alpha_3\beta_2 + \theta_4\beta_2 + \theta_5\gamma_4\alpha_2 + \theta_5\gamma_4\alpha_3\beta_2 + \theta_5\gamma_3\beta_2 + \theta_5\gamma_2 + \theta_6\delta_3\alpha_2 + \theta_6\delta_3\alpha_3\beta_2 + \theta_6\delta_5\beta_2 + \theta_6\delta_4\gamma_3\beta_2 + \theta_6\delta_2 + \theta_2 + \theta_6\delta_4\gamma_2 + \theta_6\delta_4\gamma_4\alpha_2 + \theta_6\delta_4\gamma_4\delta_4\alpha_3\beta_2$ Besarnya total pengaruh X_2 terhadap Y_5

3. Error Term

$\alpha_3\epsilon_2 + \epsilon_1 =$ Error term untuk Y_1

$\epsilon_2 =$ Error term untuk Y_2

$\gamma_4\alpha_3\epsilon_2 + \gamma_4\epsilon_1 + \gamma_3\epsilon_2 + \epsilon_3 =$ Error term untuk Y_3

$$\delta_3 \alpha_3 \varepsilon_2 + \delta_3 \varepsilon_1 + \delta_5 \varepsilon_2 + \delta_4 \gamma_0 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_0 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \beta_0 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \varepsilon_2 + \delta_4 \gamma_4 \varepsilon_1 + \delta_4 \gamma_3 \beta_0 +$$

$\delta_4 \gamma_3 \varepsilon_2 + \varepsilon_4 = \text{Error term untuk } Y_4$

$$\theta_3 \alpha_3 \varepsilon_2 + \theta_3 \varepsilon_1 + \theta_4 \varepsilon_2 + \theta_5 \gamma_4 \alpha_3 \varepsilon_2 + \theta_5 \gamma_4 \varepsilon_1 + \theta_5 \gamma_3 \varepsilon_2 + \theta_5 \varepsilon_3 + \theta_6 \delta_3 \alpha_3 \varepsilon_2 +$$

$$\theta_6 \delta_3 \varepsilon_1 + \theta_6 \delta_5 \varepsilon_2 + \theta_6 \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \varepsilon_2 + \theta_6 \delta_4 \gamma_4 \varepsilon_1 + \theta_6 \delta_4 \gamma_3 \varepsilon_2 + \theta_6 \delta_4 \varepsilon_3 + \theta_6 \varepsilon_4 + \varepsilon_5 =$$

Error term untuk Y_5

G. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini akan dilakukan persamaan persepsi dalam menginterpretasi variabel penelitian sebagai berikut:

Variabel Eksogen :

a. Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam APBD = X1

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya (Mardi Y Hutomo, 2000)

Anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat dialokasikan dalam APBN atau APBD dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan produktivitas masyarakat, dan diharapkan menjadi salah satu solusi bagi pengurangan jumlah penduduk miskin dan pengangguran, indikatornya adalah jumlah dana yang dialokasikan dalam APBD Kota untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk pemberian dana stimulan (modal usaha) dan dana pelatihan SDM bagi masyarakat miskin dan pengangguran.

b. Desentralisasi Fiskal = X₂

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability) dan memberikan stimulus terhadap aktifitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.

Secara umum dana desentralisasi terdiri dari bantuan umum (*block grant*) dan bantuan khusus (*specific grant*) (Davey, 1998). Penggunaan DAU, DBHP dan DBH SDA (*block grants*) diserahkan pada kebijakan masing-masing daerah.

Alokasi DAU selain untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, juga diharapkan dapat menstimulasi pembangunan daerah. Transfer ke daerah dari tahun ke tahun dapat meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antara pusat dan daerah dan antar daerah, serta mendukung pembangunan daerah dalam upaya menanggulangi kemiskinan (*pro poor*), memperluas lapangan kerja (*pro job creation*), dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*).

Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa

subsidi daerah otonom dan inpres. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah antar daerah. Sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya. Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, dan begitu juga sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, berfungsi sebagai dana untuk pemerataan antar daerah. Besarnya DAU ditetapkan minimal 25% dari penerimaan dalam negeri APBN dengan pembagian 10% untuk propinsi dan 90% untuk kabupaten/kota. DAU untuk suatu Daerah Propinsi (Kabupaten/Kota) tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk seluruh Daerah Propinsi (Kabupaten/Kota) yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi Daerah Propinsi (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan. Porsi Daerah Propinsi (Kabupaten/Kota) merupakan proporsi bobot Daerah Propinsi (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan terhadap jumlah semua Daerah Propinsi (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan. Bobot daerah ditetapkan berdasarkan: kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah.

Indikatornya adalah besarnya DAU yang ditransfer ke dalam APBD Kota.



Variable Endogen :

a. Pertumbuhan Ekonomi = Y_1 ,

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan Gross Domestic Product (GDP) atau Gross National Product (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999)

Indikatornya adalah PDRB beserta angka pertumbuhan Ekonomi Kota

b. Investasi = Y_2

Investasi merupakan pergerakan arus pengeluaran yang dapat menambah stok modal secara fisik. Dalam konteks makroekonomi, investasi merupakan pergerakan arus pengeluaran yang dapat menambah stok modal secara fisik, seperti pembangunan pabrik dan kantor. Investasi dalam identitas pendapatan nasional merupakan investasi rumah tangga dan swasta, serta investasi pemerintah yang merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah (Mankiw, 2000). Investasi swasta di Indonesia terdiri dari investasi domestik dan investasi asing.

Investasi swasta domestik merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak-pihak swasta di dalam negeri, sedangkan investasi asing merupakan penanaman modal yang berasal dari luar negeri yang meliputi semua pinjaman dan bantuan pemerintah dalam bentuk uang dan barang. Dornbusch & Fischer berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa mendatang.

Menurut Samuelson dan Nordhaus dalam Lailatussholihah (2005), investasi merupakan komponen pengeluaran yang cukup besar dan tidak mudah habis, perubahan besar pada investasi akan mempengaruhi permintaan agregat (efek jangka pendek) yang pada akhirnya berakibat juga pada output dan kesempatan kerja. Kemudian investasi mendorong terjadinya akumulasi modal yang dapat meningkatkan output potensial suatu bangsa dan merangsang pertumbuhan ekonomi (efek jangka panjang). Iklim investasi yang baik akan menumbuhkan pertumbuhan investasi melalui penanaman investasi dengan dukungan produktifitas yang tinggi. Oleh karena itu setiap pemerintah daerah akan berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan investasi di daerahnya.

Data investasi swasta yang digunakan dalam penelitian ini mencakup jumlah investasi yang dilakukan pihak swasta baik dari

dalam negeri maupun luar negeri. Data investasi swasta dari dalam negeri diperoleh dari proyek-proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui pemerintah menurut sektor ekonomi. Sedangkan investasi swasta dari luar negeri diperoleh dari proyek-proyek penanaman modal luar negeri (PMLN) yang disetujui pemerintah menurut sektor ekonomi. Investasi swasta tersebut dinyatakan dalam satuan milyar rupiah.

Indikatornya adalah besarnya investasi atau Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Luar Negeri.

c. Pendapatan Asli Daerah = Y_3 ,

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja (mardiasmo,2002), indikatornya adalah besarnya jumlah PAD Kota.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi kemandirian pemerintah daerah memerlukan pembiayaan pembangunan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Halim (2004: 67), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk moda dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pajak daerah adalah merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana bersifat memaksa. Menurut UU No. 34 Tahun 2000 pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat



dipaksakan berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Kesit Bambang Prakosa, 2003). Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan (Kesit Bambang Prakosa, 2003).

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah.

Indikatornya adalah besarnya jumlah PAD Kota.

d. Pengangguran = Y_4

Pengangguran terjadi karena tidak seimbangnya antara kesempatan kerja dengan angkatan kerja atau antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja. Pengangguran dapat diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja atau seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan, tetapi belum memperolehnya.

Pengertian pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja (Putong, 2003).

Penelitian Arthur Okun dalam Putong (2003) mengatakan apabila GNP tumbuh sebesar 2,5% diatas trendnya yang telah dicapai pada tahun tertentu, maka tingkat pengangguran akan turun sebesar 1%. Jadi $1\%/2,5\% = 0,4\%$. Apabila tingkat pengangguran ingin diturunkan sebesar 2%, maka pertumbuhan ekonomi haruslah dipacu agar bisa tumbuh sebesar 5% diatas rata-rata.

Secara umum terdapat tiga jenis pengangguran: Pengangguran cyclical adalah pengangguran yang terjadi akibat perekonomian yang mengalami resesi sehingga output berada

dibawah level *full employment*. *Full employment* adalah kondisi pada jangka panjang saat seluruh output yang diproduksi merupakan output yang optimal yang dapat diproduksi, yang berarti seluruh faktor produksi diberdayakan.

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi akibat ketidak sesuaian jenis pekerjaan dengan kapabilitas tenaga kerja. Contoh; masa revolusi industri dimana kebutuhan tenaga kerja beralih ke tenaga kerja yang membutuhkan *skill* untuk menjalankan mesin. Akibatnya tenaga kerja yang tidak mampu menjalankan mesin menganggur.

Pengangguran Friksional adalah pengangguran yang pasti ada, meskipun dalam kondisi *full employment*. Pengangguran ini terjadi akibat proses rekrutmen tenaga kerja yang membutuhkan waktu untuk mendapatkan pekerjaan. Bisa juga sebagai pekerja yang keluar dari tempat kerjanya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai dengan keinginannya.

Menurut Lincoln Arsyad (1999: 35) untuk memperoleh pengertian sepenuhnya tentang arti penting dari masalah ketenagakerjaan (*employment*) di perkotaan, harus diperhitungkan pula masalah penambahan pengangguran terbuka yang jumlahnya lebih besar yaitu mereka yang kegiatannya aktif bekerja tetapi secara ekonomis sebenarnya mereka tidak bekerja secara penuh (*underutilized*). Untuk mengelompokkan masing-masing



pengangguran, menurut Edgar O. Edward (1974) perlu diperhatikan dimensi-dimensi yaitu:

1. Waktu (banyak diantaranya yang bekerja lebih lama, misalnya jam kerja per hari, per minggu, atau per tahun).
2. Produktivitas (kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh kurangnya sumber daya-sumber daya komplementer Untuk melakukan pekerjaan).
3. Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan makanan)

Menurut Edgar O. Edward (tahun 1974) Pengangguran dibagi kedalam 5 bentuk :

Pengangguran terbuka : baik sukarela (tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan).

Setengah menganggur (underemployment): yaitu yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang biasa dikerjakan.

Tampaknya bekerja tetapi tidak bekerja secara penuh: yaitu yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah pengangguran, termasuk di sini adalah:

Pengangguran tak kentara (*disguised unemployment*) misalnya para petani yang bekerja di ladang selama sehari penuh, padahal

pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu selama sehari penuh.

Pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*) misalnya orang yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya.

- a. Pensiun lebih awal , fenomena ini merupakan kenyataan yang terus berkembang di lingkup pegawai pemerintah. Di beberapa negara, usia pensiun dipermuda sebagai alat menciptakan peluang bagi yang muda untuk menduduki jabatan di atasnya.
- b. Tenaga kerja yang lemah (*impaired*): yaitu orang yang mungkin bekerja full time, tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.
- c. Tenaga kerja yang tidak produktif : yaitu orang yang mampu untuk bekerja secara produktif tetapi karena sumber daya penolong kurang memadai maka tidak bisa menghasilkan sesuatu dengan baik .

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah angka pengangguran di daerah perkotaan.

e. Kemiskinan = Y_6

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi dan memuaskan keperluan dasar materialnya seperti pangan, sandang, dan papan untuk

kelangsungan hidup dan meningkatkan posisi sosial ekonominya. Sumber-sumber daya material yang dimiliki atau dikuasainya betul-betul sangat terbatas, sekadar mampu digunakan untuk mempertahankan kehidupan fisiknya, tidak memungkinkan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraannya (Oscar Lewis 1992)

Penduduk miskin adalah jumlah keseluruhan populasi dengan pengeluaran perkapita berada di bawah ambang batas tertentu yang dinyatakan sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran perkapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak.

Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan, Komite Penanggulangan Kemiskinan (2005) menegaskan pentingnya mendefinisikan kemiskinan dari pendekatan hak. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara pandang kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak ini mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas

ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Salah satu cara mengukur kemiskinan yang diterapkan di Indonesia yakni mengukur derajat ketimpangan pendapatan diantara masyarakat miskin, seperti koefisien Gini antar masyarakat miskin (GP) atau koefisien variasi pendapatan (CV) antar masyarakat miskin (CVP). Koefisien Gini atau CV antar masyarakat miskin tersebut penting diketahui karena dampak guncangan perekonomian pada kemiskinan dapat sangat berbeda tergantung pada tingkat dan distribusi sumber daya diantara masyarakat miskin.

Aksioma-aksioma atau prinsip-prinsip untuk mengukur kemiskinan, yakni: *anonimitas*, *independensi*, maksudnya ukuran cakupan kemiskinan tidak boleh tergantung pada siapa yang miskin atau pada apakah negara tersebut mempunyai jumlah penduduk yang banyak atau sedikit. Prinsip *monotonisitas*, yakni bahwa bila diberikan sejumlah uang kepada seseorang yang berada dibawah garis kemiskinan, dan diasumsikan semua pendapatan yang lain tetap maka kemiskinan yang terjadi tidak mungkin lebih tinggi dari pada sebelumnya. Prinsip *sensitivitas distribusional* menyatakan bahwa dengan semua hal lain konstan, bila dilakukan transfer pendapatan dari orang miskin ke orang kaya, maka akibatnya perekonomian akan menjadi lebih miskin

Para ahli ekonomi mengelompokkan ukuran kemiskinan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut, diartikan sebagai suatu keadaan di mana tingkat pendapatan dari seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, permukiman, kesehatan, dan pendidikan. Ukuran ini terkait dengan batasan pada kebutuhan pokok atau kebutuhan minimum.

Kemiskinan relatif berkaitan dengan distribusi pendapatan yang mengukur ketidakmerataan. Dalam kemiskinan relatif, seseorang yang telah mampu memenuhi kebutuhan minimumnya belum tentu disebut tidak miskin, karena apabila dibandingkan dengan penduduk sekitarnya ia memiliki pendapatan yang lebih rendah.

Indikator variabel kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah angka kemiskinan daerah perkotaan yang bersumber dari BPS dengan menggunakan 8 indikator yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan rumah tangga miskin secara riil. Skor 1 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan kemiskinan dan skor 0 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan ketidakmiskinan. Kedelapan indikator tersebut adalah:

1. Luas Lantai Perkapita : $\leq 8 \text{ m}^2$ (skor 1), $> 8 \text{ m}^2$ (skor 0)
2. Jenis Lantai : Tanah (skor 1), Bukan Tanah (skor 0)

3. Air Minum/Ketersediaan Air Bersih : Air hujan/sumur tidak terlindung (skor 1), Ledeng/PAM/sumur terlindung (skor 0)
4. Jenis Jamban/WC : Tidak Ada (skor 1), Bersama/Sendiri (skor 0)
5. Kepemilikan Asset : Tidak Punya Asset (skor 1), Punya Asset (skor 0)
6. Pendapatan (total pendapatan per bulan) : ≤ 350.000 (skor 1)
 > 350.000 (skor 0),
7. Pengeluaran (persentase pengeluaran untuk makanan) : 80 persen + (skor 1) < 80 persen (skor 0)
8. Konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam) : Tidak ada/ada, tapi tidak bervariasi (skor 1), Ada, bervariasi (skor 0)

Kedelapan indikator tersebut diperoleh dengan menggunakan metode *stepwise logistic regression* dan misklasifikasi yang dihasilkan sekitar 17 persen. Hasil analisis deskriptif dan uji Chi-Square juga menunjukkan bahwa kedelapan indikator terpilih tersebut sangat terkait dengan fenomena kemiskinan dengan tingkat kepercayaan sekitar 99 persen. Skor batas yang digunakan adalah 5 (lima) yang didasarkan atas modus total skor dari domain rumah tangga miskin secara konseptual.

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. **Gambaran Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kinerja Makroekonomi Perkotaan di Indonesia**

1. **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perkotaan di Indonesia**

Hakekat Anggaran Daerah adalah merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka APBD harus benar-benar menggambarkan perangkaan ekonomis yang mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk memecahkan masalahnya dan meningkatkan kesejahteraannya.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan *output* pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program kepentingan masyarakat. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Belanja pembangunan dikeluarkan oleh pemerintah yang mana manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena belanja pembangunan memang dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan publik. Salah satu bentuk anggaran belanja pembangunan tersebut adalah anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersumber dari APBN melalui berbagai PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) telah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan produktivitas masyarakat yang diharapkan menjadi salah satu solusi bagi pengurangan jumlah penduduk miskin dan pengangguran.

Anggaran pemberdayaan yang bersumber dari APBN bila dilihat dari total anggaran yang alokasikan oleh pemerintah untuk seluruh Indonesia memang besar jumlahnya yaitu mencapai 33,4 T dan khusus untuk program pemberdayaan masyarakat perkotaan sebesar 7,125 T, namun bila dilihat besarnya yang diterima oleh masing-masing kota maka jumlahnya tidak dapat memenuhi kebutuhan anggaran pemberdayaan di seluruh kota, sehingga kekurangan anggaran pemberdayaan tersebut idealnya dialokasikan dalam APBD setiap kota, dan menjadi komponen dari anggaran belanja langsung yang dialokasikan dalam anggaran program dan kegiatan SKPD setiap tahun. Anggaran pemberdayaan ekonomi

masyarakat diberikan kepada kelompok masyarakat dalam bentuk dana stimulan atau bantuan permodalan dan dana pelatihan guna peningkatan kualitas SDM masyarakat.

Besarnya anggaran pemberdayaan ekonomi sangat tergantung pada komitmen pemerintah daerah terhadap upaya pemberdayaan masyarakatnya dan seberapa dalam pihak eksekutif dan legislatif memahami pentingnya program pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan beberapa daerah/kota mengalokasikan anggaran pemberdayaan ekonomi dalam jumlah besar, sedang dan kecil, sehingga dampaknya terhadap pengurangan angka kemiskinan dan jumlah pengangguran juga bervariasi menurut besarnya anggaran yang tersedia dan sejauhmana program pemberdayaan ekonomi terimplementasi secara tepat, efektif dan efisien di wilayah tersebut.

Selama ini dalam menetapkan besarnya anggaran pemberdayaan ekonomi tidak berdasarkan suatu pedoman atau bentuk perhitungan dan asumsi dengan melihat besarnya angka kemiskinan dan jumlah pengangguran, melainkan tergantung pada selera dan keinginan perencana di SKPD tersebut atau dengan menetapkan persentase kenaikan lima sampai dengan sepuluh persen dari nilai anggaran tahun sebelumnya dan tidak menjadi sebuah program prioritas melainkan sering dijadikan program pencitraan bagi pemimpin daerah, hal tersebut menyebabkan

persentase anggaran pemberdayaan bervariasi jumlahnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Persentase Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Dalam APBD Kota

NO.	KOTA	% rata2 dr nilai APBD
1	PALEMBANG	0.0092
2	BOGOR	0.0093
3	SUKABUMI	0.0078
4	BANDUNG	0.0862
5	BEKASI	0.0274
6	DEPOK	0.0086
7	CIMAHI	0.0073
8	SURAKARTA	0.0192
9	SEMARANG	0.0154
10	YOGYAKARTA	0.0521
11	MALANG	0.0967
12	PASURUAN	0.0049
13	SURABAYA	0.0684
14	DENPASAR	0.0337
15	BALIKPAPAN	0.0063
16	SAMARINDA	0.0042
17	MANADO	0.0044
18	MAKASSAR	0.0048
19	PARE-PARE	0.0068
20	KENDARI	0.0065
21	GORONTALO	0.0075
22	AMBON	0.0034
23	JAYAPURA	0.0032
24	JAKARTA SELATAN	0.0494

Sumber APBD KOTA Penelitian, diolah (Lampiran 1)

Dalam Tabel 6. di atas terlihat bahwa hanya beberapa kota yaitu Bandung, Surabaya, Yogyakarta dan Jakarta Selatan yang mengalokasikan anggaran pemberdayaan ekonomi diatas 0,04

persen dari nilai total APBD, sedangkan kota-kota lainnya sangat tidak berarti.

2. Kinerja Makroekonomi dan Kemiskinan Perkotaan di Indonesia

Kinerja makro ekonomi dapat menjadi barometer seberapa besar pencapaian stabilitas makro ekonomi, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi stabil, investasi tinggi, inflasi rendah, pengangguran dan kemiskinan semakin menurun. Kinerja makroekonomi sebuah daerah pada tahun tertentu tidak lepas dari kondisi faktor internal dan eksternal baik level nasional maupun internasional..

Membbaiknya kinerja makro ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ini antara lain dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas empat persen, tingkat inflasi terkendali, naiknya pendapatan per kapita dan surplus perdagangan serta meningkatnya devisa. Akan tetapi, kondisi makro ekonomi tersebut masih tetap meninggalkan permasalahan yang rumit, yaitu lambatnya perluasan lapangan kerja jumlah pengangguran masih di atas 10 persen, angka kemiskinan masih pada kisaran 14,15 persen Tahun 2009 (BPS).

Jika indikator kinerja makroekonomi baik, kinerja secara mikro seharusnya juga baik. Namun, realitanya kinerja makro baik, di tingkat mikro kita masih buruk . Apakah indikator makro masih dapat dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan mikro?,



Selama ini kinerja makroekonomi merupakan salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah, demikian pula halnya dengan kota-kota di Indonesia. Pemerintah kota selalu menunjukkan kesuksesan pembangunan kotanya dengan mengemukakan capaian kinerja makro ekonomi yang bagus, namun di sisi lain, capaian indikator mikro yang terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat terabaikan. Fenomena yang sering terjadi adalah pertumbuhan ekonomi tinggi, investasi tinggi, pendapatan dan belanja pemerintah juga tinggi, akan tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat rendah, terlihat dari angka kemiskinan dan pengangguran yang tetap tinggi dan IPM yang masih rendah.

Sesaat setelah krisis ekonomi Asia, pertumbuhan ekonomi Indonesia kolaps hingga -13.1%. Pada tahun-tahun selanjutnya meski positif, namun pertumbuhan relatif rendah dibandingkan rata-rata periode sebelum krisis. Setelah krisis, terjadi paradoks pertumbuhan-pengangguran laju pertumbuhan ekonomi meningkat, namun laju pengangguran juga meningkat. Walau kemiskinan menunjukkan penurunan tipis, namun angkanya masih relatif besar.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan saat ini dikenal secara luas sebagai kondisi yang diperlukan untuk mengurangi kemiskinan, akan tetapi, sangat memungkinkan untuk menunjukkan secara empiris bahwa tidak ada variasi lainnya dalam

hubungan invarian antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan serta pengangguran.

Tingkat pengurangan kemiskinan pada tahun 1990 lebih cepat dibandingkan tahun 1980 (Sundaram and Tendulkar 2002) Dengan menggunakan pendekatan alternative untuk menghasilkan estimasi perbandingan, Datt, et al. (2003) yang menghasilkan kesimpulan berbeda. Menurut penelitian selanjutnya bahwa pengurangan kemiskinan lebih lambat pada Tahun 1980 dibandingkan pengurangan kemiskinan pada era 1990 hal ini merupakan contoh bahwa ada progress yang berlanjut. Kondisi tersebut juga terjadi di Indonesia, selama Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, dimasa pemerintahan "Orde Baru", penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin juga terjadi secara signifikan.

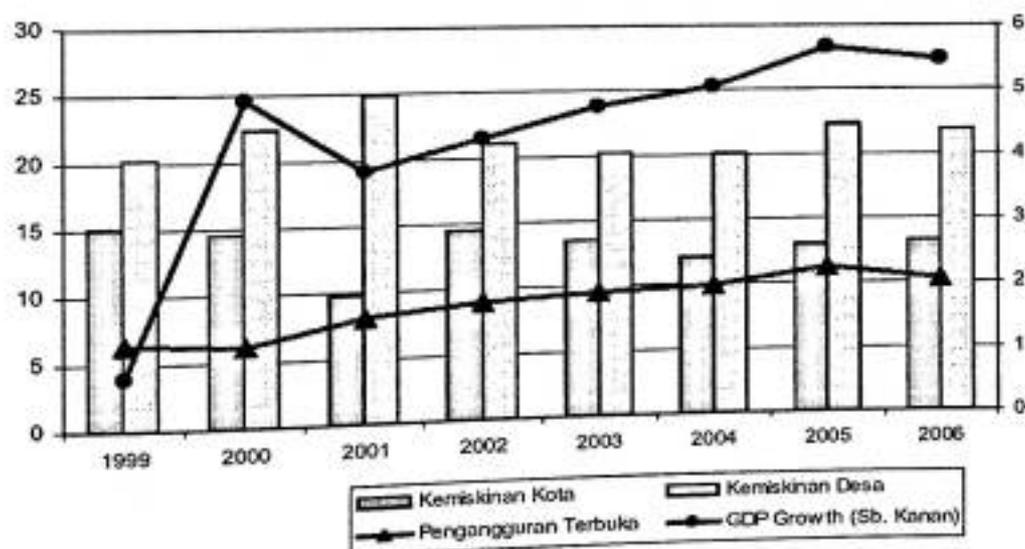
Pada tahun 1999 angka kemiskinan naik menjadi 23.persen dan dalam rentang waktu 1998-2000 ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang parah sebagai dampak krisis ekonomi. Laporan terakhir, tahun 2006, angka kemiskinan kembali turun menjadi 17.42 persen saat mana ekonomi Indonesia mulai bangkit secara perlahan (BPS, 2006).

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tentunya memberikan elastisitas yang berbeda dalam menurunkan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari sektor yang

kurang banyak melibatkan rumah tangga miskin tentu dapat diduga akan memberikan elastisitas yang rendah bagi penurunan kemiskinan, demikian pula sebaliknya.

Pertumbuhan ekonomi yang lambat pulih diiringi dengan jumlah penduduk miskin yang persisten pada angka yg cukup tinggi. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi triwulanan (2006:4) sudah mencapai 6.1 persen, namun jumlah penduduk miskin belum berkurang secara nyata. Teori ekonomi menyatakan: pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan semakin banyaknya output nasional, mengindikasikan semakin banyaknya orang yang bekerja sehingga seharusnya akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan, akan tetapi di Indonesia pertumbuhan ekonomi meningkat namun pengangguran cenderung meningkat dan kemiskinan masih tinggi.

Gambar 10. Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran, Tahun 1999-2006 (dalam Persen)



Pada Gambar 10 diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup berarti dari-tahun ke tahun , namun kemiskinan perkotaan cenderung stagnan dan mengalami penurunan yang sangat lamban, bahkan angka pengangguran menunjukkan peningkatan.

B. Deskripsi Variabel Penelitian

1. Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam APBD

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting karena di dalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan *input* dan *output* dalam satuan keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik.

Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.

Sesuai aturan APBD dan tujuan otonomi daerah, bahwa hakekat Anggaran Daerah adalah merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka APBD harus benar-benar menggambarkan perangkaan ekonomis yang mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk memecahkan masalahnya dan meningkatkan kesejahteraannya.

Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat merupakan anggaran belanja langsung pemerintah daerah yang di alokasikan dalam APBD, secara khusus diperuntukkan bagi program dan kegiatan yang berorientasi pada upaya memberdayakan ekonomi masyarakat. Anggaran tersebut dalam bentuk dana bantuan modal usaha dan dana pelatihan.

Setiap daerah/kota menetapkan kebijakan yang masing-masing berbeda dalam mendisain program dan kegiatan memutuskan besarnya anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang akan dimasukkan dalam APBD setiap tahunnya, hal tersebut menyebabkan besarnya anggaran bervariasi jumlahnya di setiap daerah, ada yang menjadikan program tersebut sebagai program prioritas, namun ada pula pemerintah kota yang hanya mengalokasikan dana yang sangat minim sebagaimana terlihat pada Tabel berikut

Tabel. 7. Anggaran Pemberdayaan Ekonomi dalam APBD Kota Th.2004-2008 (juta)

NO.	KOTA	2004	2005	2006	2007	2008
1	BANDUNG	1,597	2,234	4,860	5,735	15,147
2	SURABAYA	2,632	2,900	3,750	2,643	4,800
3	JAKARTA SELATAN	1,250	1,500	2,500	3,000	3,500
4	PASURUAN	115	160	225	350	430
5	JAYAPURA	150	230	275	350	500
6	AMBON	100	225	250	250	300

Sumber : APBD KOTA BANDUNG, SURABAYA, JAKARTA SELATAN, PASURUAN, JAYAPURA, AMBON

Dari Tabel 7. diatas anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat di perkotaan Indonesia terlihat bahwa Kota Bandung mengalokasikan Anggaran Pemberdayaan Ekonomi paling besar , kemudian Surabaya dan Jakarta Selatan, sedangkan kota yang mengalokasikan anggaran paling kecil adalah Kota Pasuruan, Jayapura, Ambon.

Selain Kota Bandung, Pemerintah Kota Surabaya juga konsisten dan berupaya meningkatkan perekonomian masyarakatnya melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi antara lain : Program Pemberdayaan PKL dan Program Urban Farming. Di Kota Jakarta Selatan terdapat Program Pemberian dana Stimulan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang secara keseluruhan jumlahnya cukup besar dan meningkat setiap tahunnya. Demikian pula halnya dengan Semarang, dan Surakarta masing-masing memiliki program pemberdayaan ekonomi yang dialokasi pada anggaran beberapa SKPD seperti : Dinas Koperasi, Dinas



Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perindustrian dan Bagian Perekonomian.

Untuk Kota Yogyakarta dan Denpasar, secara khusus pemerintah kotanya mendisain program pemberdayaan ekonomi yang diperuntukkan bagi para pengrajin dan pedagang kaki lima serta pedagang asongan guna mendukung industri pariwisata di kedua kota tersebut, antara lain melalui program Ekora, Kredit Lunak Tanpa Agunan, Pembinaan dan Pengembangan UKM, Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Pemasaran Produk Kerajinan, dan sebagainya. Program dan kegiatan tersebut tersebar di beberapa SKPD dengan melibatkan pihak swasta dalam upaya peningkatan ekonomi rakyat.

Akan halnya pemberdayaan ekonomi di Kota Makassar memang telah dilaksanakan melalui beberapa program, antara lain pemberian dana stimulan dan pelatihan kewirausahaan dengan alokasi anggaran cukup besar dan tersebar di beberapa SKPD, namun belum terkoordinasi dengan baik sebagaimana di kota-kota lainnya, sehingga belum menunjukkan capaian yang optimal dan dapat dianggap sebagai suatu keberhasilan bagi pemerintah Kota Makassar.

Kota lainnya juga menganggarkan dana pemberdayaan masyarakat tapi dalam jumlah yang tidak terlalu besar atau rata-

rata kurang dari 1 milyar . Beberapa kota lainnya mengalokasikan anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam jumlah yang rendah atau rata-rata kurang dari 500 jt per tahun dan pada umumnya hanya merupakan dana pendamping bagi dana yang bersumber dari APBN misalnya P2KPK atau PNPM-Perkotaan dan bantuan modal bagi UKM dan koperasi.

Data besarnya anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbeda antara kota menunjukkan bahwa masing-masing pemerintah kota memiliki kebijakan yang berbeda dalam menetapkan besarnya anggaran yang akan dialokasikan dalam APBD kota, demikian pula program dan kegiatan yang diprioritaskan. Kota-kota besar yang menghadapi permasalahan kemiskinan dan pengangguran, pemerintah kotanya cenderung memiliki komitmen untuk mengalokasikan anggaran cukup besar. Akan tetapi beberapa kota meskipun memiliki angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, tapi tetap mengalokasikan anggaran dalam jumlah sedikit dengan dalih keterbatasan anggaran APBD.

2. Investasi

Dalam konteks makroekonomi, investasi merupakan pergerakan arus pengeluaran yang dapat menambah stok modal secara fisik, seperti pembangunan pabrik dan kantor. Investasi dalam identitas pendapatan nasional merupakan investasi rumah

tangga dan swasta, serta investasi pemerintah yang merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah (Mankiw, 2000).

Perkembangan investasi di kota-kota penelitian sangat bervariasi dan menunjukkan pasang surut dari tahun ke tahun. data investasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jumlah investasi domestik dan asing di kota tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Investasi Kota Tertinggi Th.2004-2008
(juta Rp)

NO	KOTA	2004	2005	2006	2007	2008
1	BANDUNG	936,263	1,257,189	1,128,676	1,384,615	1,461,663
2	SURABAYA JAKARTA	948,376	524,617	961,933	1,382,835	1,269,741
3	SELATAN	1,649,753	1,812,266	1,560,472	2,363,287	2,764,837

Sumber : Kantor Penanaman Modal Bandung, Surabaya, Jakarta Selatan (diolah, lampiran 2)

Pada Tabel 8 diatas terlihat bahwa Jakarta Selatan menjadi kota investasi tertinggi dalam kurun waktu lima tahun, daerah ibu kota memang menjadi tempat yang paling dipilih oleh investor untuk menanamkan modal, salah satu penyebabnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap serta aksesibilitas yang menjadi pendukung utama bagi kegiatan investasi.

Bandung juga merupakan kota favorit bagi investor, dengan jumlah investasi mencapai Rp. 6,168,406 M, sedangkan Surabaya mendapatkan investasi sebesar Rp. 5,087,502 M. Hal tersebut

menunjukkan bahwa kota besar mengalami perkembangan yang pesat dengan adanya investasi.

Dalam beberapa tahun terakhir ini Kota Makassar juga telah menjadi salah satu kota yang banyak diminati oleh para investor terutama dalam bidang property, perdagangan dan juga industri pariwisata, hal tersebut terlihat dari adanya kenaikan nilai investasi yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya

Beberapa kota di Indonesia masih menunjukkan nilai investasi yang rendah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 9 berikut :

Tabel 9 . Investasi Kota Terendah Th.2004-2008 (M)

NO	KOTA	2004	2005	2006	2007	2008
1	PARE-PARE	47,286	69,315	61,461	76,131	81,607
2	AMBON GORONTALO	29,382	24,166	32,535	40,018	45,782
3	O	37,914	46,992	83,246	96,781	142,569

Sumber : Kantor Penanaman Modal Gorontalo, Ambon dan Bappeda Pare-Pare (diolah, lampiran

2)

Tabel 9 diatas Penanaman Modal terendah yaitu di Kota Ambon dengan jumlah investasi Rp. 171,883 M , iklim investasi kurang kondusif di kota ini sebagai dampak dari kerusuhan yang lalu , faktor stabilitas keamanan suatu wilayah menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam menentukan lokasi untuk berinvestasi

Sebagai salah satu kota kecil di Sulawesi Selatan, Pare-Pare dengan nilai investasi sebesar Rp.335,800 M , merupakan suatu capaian yang cukup besar dibandingkan investasi di daerah lainnya. Sedangkan bagi Gorontalo terjadinya peningkatan investasi yang sangat signifikan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya untuk menarik minat investor agar berinvestasi di daerah ini dengan memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi calon investor (Kabid Perencanaan Ekonomi Bappeda Gorontalo, 2010) .

3. Pendapatan Asli Daerah

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan adalah tersedianya pendapatan yang cukup untuk guna membiayai anggaran pembangunan di daerah. Oleh sebab itu setiap daerah selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatannya baik melalui transfer fiskal dari pusat maupun pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang dimasukkan ke dalam komponen Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah tertinggi dicapai Kota Surabaya yaitu rata-rata Rp.476,736,199,000 per tahunnya dan mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahun. Jakarta Selatan mendapatkan PAD rata-rata sebesar Rp.245,954,903,000 per tahun dan Kota Bandung setiap tahun rata-rata mencapai

Rp.234,206,610,000 . Capaian PAD tertinggi kota-kota di Indonesia dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel.10. PAD Kota Tertinggi Th.2004-2008

NO	KOTA	2004	2005	2006	2007	2008
1	BANDUNG	213,126,133	222,909,942	225,596,438	233,770,032	275,630,504
2	SURABAYA JAKARTA SELATAN	348,310,014	417,377,015	496,190,006	538,369,935	583,483,623
3		176,851,206	289,742,737	207,969,627	263,829,405	291,381,542

Sumber : Kota Dalam Angka Bandung, Surabaya, Jakarta Selatan (BPS), diolah lampiran 3

Akan tetapi , beberapa kota kurang dapat menghasilkan PAD dalam jumlah besar, beberapa kota dengan capaian PAD rendah dapat terlihat pada Tabel 11. dibawah ini :

Tabel.11. PAD Kota Terendah Th.2004-2008

NO	KOTA	2004	2005	2006	2007	2008
1	PASURUAN	15,754,177	13,210,249	14,352,838	20,757,930	24,320,473
2	AMBON	8,783,407	11,041,137	14,581,368	18,162,140	15,768,940
3	KENDARI	13,893,277	14,112,546	15,974,426	20,125,439	20,990,000

Sumber : Kota Dalam Angka Ambon, Pasuruan,Kendari (BPS)

Pada periode Tahun 2004-2008, Kota Ambon merupakan kota dengan PAD terendah yaitu hanya rata-rata sebesar Rp. 13,667,398,000 per tahun, kemudian Kota Kendari rata-rata mencapai Rp. 17,019,138,000 dan Kota Pasuruan sebesar Rp.17,679,133,000 rata-rata setiap tahun. Rendahnya capaian PAD akan berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD Kota, semakin besar capaian PAD maka,

semakin besar pulan belanja pemerintah kota yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

4. Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan desentralisasi fiskal bertujuan untuk mendukung pendanaan atas urusan-urusan yang telah diserahkan kepada daerah, agar daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik, diharapkan dapat memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan mendorong perkembangan ekonomi melalui pembangunan daerah. Selain itu tujuan utama pemberian dana perimbangan dalam kerangka otonomi daerah untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah (*equalizing transfer*) (Ehtisham, 2002).

Setiap daerah mendapatkan dana desentralisasi dari pusat yang berbeda, tergantung pada demografi dan kesenjangan fiskal daerah tersebut, maksud dilakukan transfer fiskal adalah untuk mewujudkan pemerataan terutama bagi daerah-daerah yang minim sumber daya. Dalam kurun waktu 2004-2008 beberapa kota mendapatkan dana desentralisasi yang tinggi dan ada pula yang rendah.

Kota Jakarta Selatan, Bandung, Balikpapan mendapat dana desentralisasi fiskal dalam jumlah besar, mencapai ratusan milyar

bahkan trilyun dan mengalami peningkatan setiap tahun, namun sebaliknya Kota Gorontalo, Kendari dan Pare-Pare mendapatkan dana dalam jumlah yang rendah tidak mencapai 300 M. Besarnya dana desentralisasi fiskal yang ditransfer ke kota-kota di Indonesia dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel.12. Dana Desentralisasi Fiskal Th.2004-2008

NO	KOTA	2004	2005	2006	2007	2008
1	BANDUNG	693,748.0	788,352.0	960,583.0	1,097,176.0	1,302,317.0
2	BALIKPAPAN	802,321.0	1,106,735.0	1,356,734.0	1,054,648.0	1,197,674.0
3	JAKARTA SELATAN	1,296,297,651.0	1,570,208,024.0	1,793,562,428.0	2,203,144,786.0	2,732,134,815.0
4	PARE-PARE	88,592.0	148,716.0	165,732.0	193,423.0	216,601.0
5	KENDARI	138,958.0	177,869.0	198,364.0	223,421.0	268,723.0
6	GORONTALO	128,503.0	167,921.0	184,536.0	215,541.0	297,122.0

Sumber : Kota Dalam Angka Bandung, Balikpapan, Jakarta Selatan, Pare-Pare, Kendari, Gorontalo (BPS)

lampiran 4

Kota-kota dengan dana desentralisasi fiskal rendah yaitu : Sukabumi, Bekasi, Depok, Cimahi, Pasuruan, Denpasar, dan Gorontalo, Kendari dan Pare-Pare mendapatkan dana dalam jumlah yang paling rendah tidak mencapai 300 M.

5. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian adalah pertumbuhan ekonomi, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah



dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Menurut beberapa pakar ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi merupakan istilah bagi negara yang telah maju untuk menyebut keberhasilannya, sedangkan untuk negara yang sedang berkembang digunakan istilah pembangunan ekonomi (Putong, 2003).

Kinerja makro ekonomi seluruh kota yang diteliti menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu, hal ini terlihat dari kenaikan PDRB dan angka pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan secara signifikan, seperti terlihat dalam Tabel 13 berikut :

Tabel 13. Pertumbuhan Ekonomi Kota-kota di Indonesia, kategori Tinggi dan Rendah

NO	KOTA	2004		2005		2006		2007		2008	
		PDRB (M)	Pert. (%)								
1	BANDUNG	18.490,72	7.34	19.874,81	7.49	21.370,70	7.53	23.043,10	7.83	24.941,52	8.24
2	MAKASSAR	8.882,25	8.6	9.791,71	10.24	10.492,54	7.16	11.341,85	8.09	12.261,54	8.11
3	BALIKPAPAN	11.528,66	9.87	12.228,69	5.15	12.621,68	7.52	13.033,07	7.93	13.466,78	10.22
1	CIMAHI	4.694,21	4.18	4.898,15	4.48	5.121,60	4.56	5.386,66	4.82	5.638,56	5.03
2	SEMARANG	14.793,05	4.04	15.402,67	4.12	16.194,26	5.14	17.118,71	5.71	18.142,64	5.98
3	YOGYAKARTA	3.993,84	4.76	4.195,39	5.05	4.397,85	4.83	4.572,50	3.97	4.776,40	4.46

Sumber : Kota Dalam Angka Bandung, Makassar, Balikpapan, Cimahi, Semarang dan Yogyakarta, BPS, 2009.

(lampiran 5)

Berdasarkan Tabel 13. diatas angka pertumbuhan tertinggi dicapai Kota Makassar dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun (8,44%), pada Tahun 2005 pertumbuhan mencapai angka tertinggi 10,24%, hal tersebut dipicu oleh pesatnya perkembangan penduduk serta pertumbuhan output total yang sebagian besar bersumber dari sektor industri, perdagangan dan jasa yang

mengalami peningkatan dengan pesat.

Kota Balikpapan mengalami pertumbuhan rata-rata (8,13%) per tahun, hal tersebut didorong oleh sektor pertambangan yang memberi andil cukup besar terhadap peningkatan PDRB kota . Bandung juga merupakan kota yang mencapai angka pertumbuhan tinggi yaitu rata-rata (7,68%), ada tiga sektor yang berperan memberi kontribusi terhadap pertumbuhan tersebut yaitu : industri, perdagangan dan jasa.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang mengalami pertumbuhan sedang, dengan rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir (4,65%), pertumbuhan tertinggi dicapai pada Tahun 2005 dan Tahun 2007 hanya 3,97%, hal tersebut terkait dengan menurunnya arus wisatawan ke kota tersebut, sedangkan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kota Yogya adalah industri kepariwisataan.

Kota Semarang mengalami pertumbuhan rata-rata (4,99%) per tahun, cukup rendah dibandingkan ibu kota provinsi lainnya, sedangkan Kota Cimahi yang mencapai pertumbuhan terendah (4,61%), akan tetapi sebagai kota yang baru terbentuk 6 tahun yang lalu, capaian tersebut sudah cukup tinggi

6. Pengangguran

Permasalahan lain yang dihadapi kota-kota di Indonesia adalah pengangguran, sebagai dampak dari peningkatan arus urbanisasi ke kota dengan kualitas tenaga kerja rendah, pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah sehingga tidak mampu bekerja di sektor formal dan menghasilkan pengangguran baru, sehingga jumlahnya tetap besar

Menurut Lincoln Arsyad (1999) untuk memperoleh pengertian sepenuhnya tentang arti penting dari masalah ketenagakerjaan (employment) di perkotaan, harus diperhitungkan pula masalah penambahan pengangguran terbuka yang jumlahnya lebih besar yaitu mereka yang kegiatannya aktif bekerja tetapi secara ekonomis sebenarnya mereka tidak bekerja secara penuh (underutilized). Untuk mengelompokkan masing-masing pengangguran.

Masalah pengangguran di perkotaan disebabkan besarnya arus urban dan rendahnya kesempatan kerja yang tersedia, hampir setiap kota di Indonesia menghadapi permasalahan tersebut, tapi beberapa kota menunjukkan angka pengangguran yang tinggi sebagaimana terlihat pada Tabel 14. berikut :

Tabel.14. Angka Pengangguran Th.2004-2008

NO	KOTA	2004	2005	2006	2007	2008
1	PASURUAN	6.27	7.04	7.32	7.89	7.13
2	DENPASAR	5.4	4.7	5.3	5.8	6.0
3	PARE-PARE	6.2	7.1	7.4	7.1	7.0
4	MAKASSAR	17.4	17.8	18.7	18.5	18.0
5	AMBON	12.63	11.67	12.30	15.60	13.72
6	JAKARTA SELATAN	14.3	14.2	14.6	14.2	11.6
7	BANDUNG	12,49	13,56	14,83	14,50	11,58

Sumber : Kota Dalam Angka (BPS)

Pada Tabel 14. terlihat bahwa angka pengangguran tertinggi secara berurut terdapat di Kota Makassar, Ambon dan Jakarta Selatan, sedangkan pengangguran terendah di Kota Denpasar, Pare-Pare dan Pasuruan. Dalam lima tahun sejak 2004-2008 rata-rata pengangguran di Makassar mencapai (18,2%), Ambon(13,18%) dan Jakarta Selatan (13,08%), Denpasar (5,4%), Pare-Pare(6,9) dan Pasuruan(7,13%).

7. Kemiskinan

Kemiskinan memberi gambaran situasi serba kekurangan seperti terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan adalah ketidakberdayaan penduduk miskin, Mubyarto (1997).

Permasalahan klasik dan bersifat umum yang dihadapi oleh hampir semua kota di Indonesia adalah masalah kemiskinan, yang seakan-akan belum mendapat solusi yang paling tepat dalam penanggulangannya, sehingga, dari tahun ke tahun angka kemiskinan masih tinggi walaupun berbagai program telah dilakukan untuk hal tersebut, berikut data kemiskinan di daerah perkotaan Indonesia :

Tabel. 15. Angka Kemiskinan Th.2004-2008

NO	KOTA	2004		2005		2006		2007		2008	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	BEKASI	69.7	2.8	70.8	3.0	71.5	3.42	104.4	5.07	106.9	4.97
2	SEMARANG	55.93	3.0	56.3	3.2	58.7	4.22	77.8	5.33	77.6	5.26
3	BALIKPAPAN	15.2	2.9	15.7	3.0	17.3	3.96	18	3.69	18.3	3.74
4	SURAKARTA	66.2	11.9	66.4	12.0	69.1	13.34	77.6	15.21	69.8	13.64
5	PASURUAN	19.2	11.5	19.4	11.7	21.8	12.43	23.6	13.71	21.3	12.61
6	JAYAPURA	47.8	24.0	49.3	24.5	50.2	24.87	54.1	25.69	52.9	25.3

Sumber : Data dan Informasi kemiskinan (BPS) lampiran 7

Tabel.15 diatas menunjukkan angka kemiskinan tertinggi berada di Kota Jayapura (25,3%), Pasuruan (12,61%) dan Surakarta (13,64%), sedangkan kemiskinan terendah berada di Kota Balikpapan (3,74%), Bekasi (4,97%) dan Semarang (5,26%). Dari data di atas terlihat angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun , kecuali Kota Jayapura yang tetap tinggi bahkan mengalami kenaikan.

C. Hasil Estimasi Pengaruh Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Dana Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan Daerah Perkotaan

Dalam penelitian ini telah dilakukan Pengujian model pengukuran Structural Equation Modeling (SEM) berdasarkan prosedur yang dikemukakan oleh Hair, et. Al (1988), Joreskog & Yang (1996); Kline (1998) dan Barbara (2001) bahwa komponen pengukuran model terlebih dahulu diperiksa dan selanjutnya diikuti dengan pengujian model struktural secara keseluruhan. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi ukuran-ukuran ganda *multiplemeasures* pada konstruk laten, termasuk sifat validitas dan reliabilitas, sehingga hasil yang diperoleh model pengukuran dalam persamaan struktural. Analisis Faktor Konfirmatori *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dan aplikasi SEM digunakan untuk menganalisis model pengukuran konstruk laten tersebut. Evaluasi model dilakukan dengan berdasarkan pada kriteria bersama dari indeks model fit, yaitu: Chi-square (χ^2), relative chi square (χ^2/df), Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), Comparative Fit Index (CFI) dan Tucker-Lewis Index (TLI). Nilai kritis sebagai kriteria penerimaan dalam mengevaluasi model biasanya disebut sebagai cut off dengann menggunakan nilai yang disarankan Arbuckle (2006), Garson (2006), dan Lee (2007), dari uji model didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel. 16. Hasil Kesesuaian Model Estimasi

Kriteria	Cut Off	Hasil	Evaluasi
Chi-Square	df=156 P=5% =159	8,015	Baik
Probability	$\geq 0,05$	0.000	Baik
CFI	$\geq 0,95$	0,986	Baik
TLI	$\geq 0,95$	1,878	Baik
CMIN/DF	$\leq 2,00$	1,603	Baik
RMSEA	$\leq 0,08$	0,024	Baik

Pada tabel 16. diatas terlihat hasil uji model yang menunjukkan uji Chi-Square kecil (8,015.), CFI (0.986), TLI (1,878), CMIN/DF(1.603),RMSEA (0,024) dengan demikian hasil pengujian secara keseluruhan memenuhi kriteria baik .

Selain itu dalam penelitian ini akan diuraikan hasil pengujian model secara keseluruhan antara variabel eksogen yang terdiri dari Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Investasi, dan Desentralisasi Fiskal terhadap variabel endogen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, pengangguran dan kemiskinan. Indikasi model yang baik adalah telah dilakukannya pengujian antara model yang didukung oleh teori kemudian dibuktikan dengan data empiris, atau secara statistik dilakukan secara uji-t yaitu membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel pada $\alpha=5\%$ dan $n=200$.

1. Hasil Estimasi Pengaruh Antara Koefisien Variabel Eksogen dan Variabel Endogen

Hasil estimasi nilai-nilai *intercept* atau *constant* dan koefisien regresi hubungan fungsional antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam analisis SEM masing-masing dapat dilihat pada Tabel 17 sebagai berikut :

Tabel 17. Hasil Estimasi Nilai-Nilai *Intercept* Berdasarkan Model SEM

Hubungan Fungsional	Intercept (Constanta)		t.Value	P
	Simbol	Angka Estimasi		
$Y_1 = f(X_1, X_2, Y_2)$	α_0	3.115	3.728	****
$Y_2 = f(X_1, X_2)$	β_0	1.402	2.710	.007
$Y_3 = f(Y_1, Y_2, X_1, X_2,)$	γ_0	2.827	3.198	.001
$Y_4 = f(Y_1, Y_2, Y_3, X_1, X_2,)$	δ_0	2.414	2.716	.007
$Y_5 = f(Y_1, Y_2, Y_3, Y_4, X_1, X_2,)$	θ_0	-.492	-.476	.634

Berdasarkan model SEM yang sudah *fit*, maka dilakukan uji signifikansi hubungan fungsional antar variabel. Pengujian dilakukan secara parsial dengan nilai *critical ratio* (CR) atau *probability* (p) pada *regression weights*. Nilai *critical ratio* (CR) sama dengan nilai *critical student* (*t-value*) pada model regresi biasa (non struktural).

Pada Tabel 18. berikut ini ditunjukkan signifikansi pengaruh antara variabel yang ditandai pada nilai probabilitasnya apabila berada dibawah $P \leq 5\%$ atau diluar batas $\pm 1,96$ dalam uji dua arah maka signifikan, sedangkan apabila berada dalam area $\pm 1,96$ maka tidak signifikan

Tabel 18. Koefisien Estimasi Hubungan Anggaran Pembedayaan Ekonomi Masyarakat dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan Daerah Perkotaan

Hubungan	Estimate	S.E.	t-Value	P	Keterangan		
					Hubungan	Hubungan	
Y1	← X1	0.320	.076	4.208	***	Positif	Signifikan
	← X2	0.234	.076	3.085	.002	Positif	Signifikan
	← Y2	0.142	.054	2.637	.008	Positif	Signifikan
Y2	← X1	0.146	.129	1.128	.259	Positif	Tidak Signifikan
	← X2	0.405	.130	3.112	.004	Positif	Signifikan
Y3	← X1	0.004	.135	.030	.976	Positif	Tidak Signifikan
	← X2	0.264	.131	2.019	.018	Positif	Signifikan
	← Y1	0.442	.152	2.910	.013	Positif	Signifikan
	← Y2	0.240	.091	2.637	.012	Positif	Signifikan
Y4	← X1	-0.139	.131	-1.064	.287	Negatif	Tidak Signifikan
	← X2	-0.335	.127	-2.635	.032	Negatif	Signifikan
	← Y1	-0.072	.147	-.488	.626	Negatif	Tidak Signifikan
	← Y2	-0.198	.089	-2.224	.021	Negatif	Signifikan
	← Y3	-0.052	.088	-.589	.556	Negatif	Tidak Signifikan
Y5	← X1	-0.030	.148	-.202	.840	Negatif	Tidak Signifikan
	← X2	-0.221	.146	-1.513	.130	Negatif	Tidak Signifikan
	← Y1	-0.350	.266	-1.135	.135	Negatif	Signifikan
	← Y2	-0.222	.101	-2.197	.031	Negatif	Tidak Signifikan
	← Y3	-0.133	.100	-1.332	.120	Negatif	Signifikan
	← Y4	-0.262	.103	-2.544	.011	Negatif	Signifikan



Sumber: Output AMOS 7.0 dari Data Diolah

10% (*) $\alpha = 0,10$

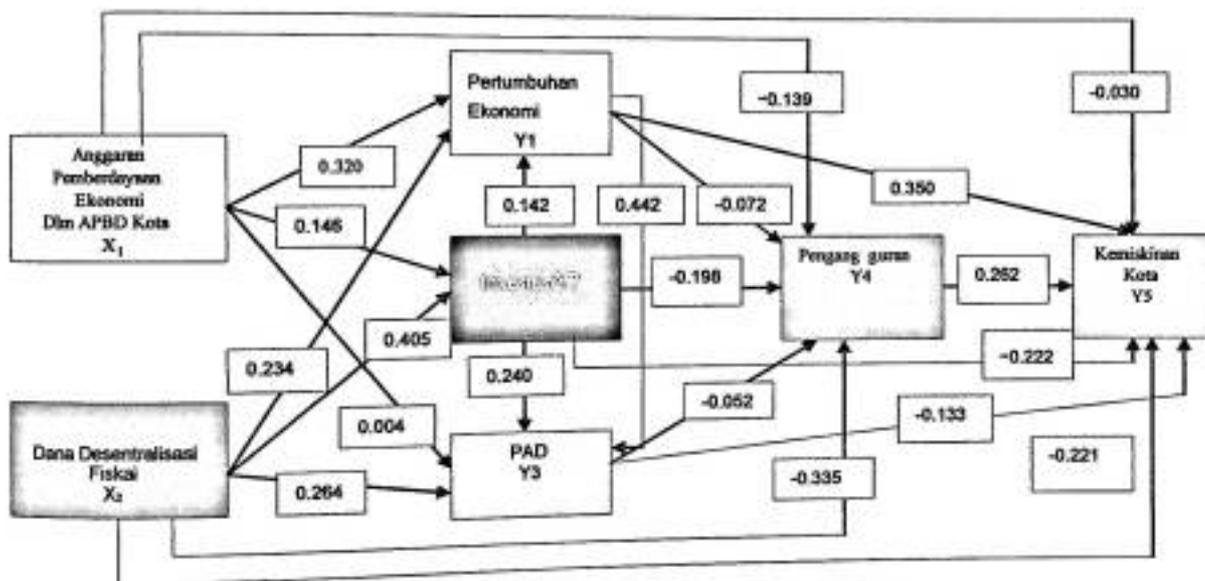
5% (**) $\alpha = 0,05$

1% (***) $\alpha = 0,01$

Guna memudahkan penafsiran data tersebut, maka didukung oleh gambar hubungan antara variabel berikut ini:

Gambar 11 . Hasil Estimasi Pengaruh antara koefisien Variabel Eksogen dan Variabel Endogen

$df=5$
 $Chi\ Square=8,015$
 $Prob.=0,000$
 $Relative\ Chi-Square=1,803$
 $RMSEA=.024$
 $TLI=1,878$
 $CFI=.986$



Keterangan :

(*) signifikansi $\alpha = 10\%$, (**) $\alpha = 5\%$, (***) $\alpha = 1\%$

Berdasarkan data dan gambar 11. diatas akan diuraikan beberapa temuan sesuai dengan fakta di lapangan sebagai berikut :

Anggaran Pemberdayaan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut ditunjukkan dari t-hitung 4.208, dan koefisien estimasi 0,320, hal ini berarti bahwa anggaran pemberdayaan menentukan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan terhadap Investasi tidak berpengaruh, ditunjukkan dari *critical ratio* 1.128 dan koefisien estimasi 0.146 yang berarti bahwa anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak menentukan investasi. Terhadap PAD, anggaran pemberdayaan tidak berpengaruh, hal tersebut ditunjukkan dari *critical ratio* .030, dengan koefisien estimasi 0.004, berarti anggaran pemberdayaan tidak menentukan pendapatan asli daerah.

Selain itu, anggaran pemberdayaan ekonomi juga tidak berpengaruh terhadap pengangguran, hal tersebut ditunjukkan dari *critical ratio* -1.064 dengan koefisien estimasi -0.139 , yang berarti bahwa anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak menentukan pengangguran.

Demikian pula anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak berpegaruh terhadap pengurangan kemiskinan daerah perkotaan, hal tersebut ditunjukkan dari nilai *critical ratio* -.202 , dan koefisien

estimasi -0.030 , sehingga anggaran pemberdayaan ekonomi tidak menentukan kemiskinan daerah perkotaan .

Dalam penelitian ini didapatkan fakta bahwa dana desentralisasi fiskal berpegaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut ditunjukkan dari t-hitung 3.085 , dan koefisien estimasi 0.234 , berarti desentralisasi fiskal menentukan pertumbuhan ekonomi. Demikian pula terhadap investasi, dana desentralisasi fiskal berpengaruh positif , dengan nilai t-hitung 3.112 , dan koefisien estimasi 0.405 .Terhadap PAD, desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan, hal tersebut terlihat pada nilai t-hitung 2.019 , dengan koefisien estimasi 0.264 , berarti desentralisasi fiskal menentukan PAD.

Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pengangguran adalah negatif signifikan yang ditunjukkan oleh nilai t-hitung -2.635 dengan koefisien estimasi -0.335 .Sedangkan terhadap kemiskinan, desentralisasi fiskal tidak berpegaruh , terlihat dari nilai t-hitung -1.513 kemudian koefisien estimasi -0.221 , yang berarti bahwa desentralisasi fiskal tidak menentukan kemiskinan.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap PAD adalah positif signifikan dengan nilai t-hitung 2.910 dan koefisien estimasi 0.442 , sedangkan terhadap pengangguran, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh ditunjukkan dari t-hitung $-.488$ dengan koefisien

estimasi -0.072 berarti pertumbuhan ekonomi tidak menentukan pengangguran.

Variabel pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, hal tersebut ditunjukkan dari t-hitung -1.135 , dan koefisien estimasi -0.350 , yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di perkotaan.

Akan halnya variabel Investasi, ditemukan fakta bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut ditunjukkan dari t-hitung 2.637 , dengan koefisien estimasi 0.142 , yang berarti bahwa investasi di perkotaan menentukan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Investasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal tersebut ditunjukkan dari t-hitung 2.637 , dan koefisien estimasi 0.240 , dengan demikian investasi menentukan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Demikian pula terhadap pengangguran, investasi berpengaruh negatif signifikan terlihat dari t-hitung -2.224 dengan koefisien estimasi -0.198 , yang berarti bahwa investasi menentukan pengangguran. Terhadap kemiskinan daerah perkotaan, investasi berpengaruh negatif dan signifikan, hal tersebut ditunjukkan dari t-hitung -2.197 , kemudian koefisien estimasi -0.222 , sehingga peningkatan investasi berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan.

Variabel lainnya yaitu pendapatan asli daerah tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap pengangguran, hal tersebut ditunjukkan dari t-hitung -0.589 , dengan koefisien estimasi -0.052 , sehingga peningkatan pendapatan asli daerah tidak menentukan pengangguran.

Sedangkan terhadap kemiskinan, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh, hal tersebut ditunjukkan dari nilai t-hitung -1.332 , dan koefisien estimasi -0.133 , dengan demikian peningkatan pendapatan asli daerah tidak menentukan penurunan kemiskinan.

Variabel pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, hal tersebut terlihat pada nilai t-hitung -2.544 , dengan koefisien estimasi -0.262 , sehingga berarti bahwa pengangguran menentukan kemiskinan.

2. Hasil Estimasi Pengaruh Langsung dan Tidak langsung Antara variabel eksogen dan variabel endogen

Berdasarkan hasil analisis pengaruh antara variabel yang telah ditunjukkan diatas, maka berikut ini akan ditunjukkan pengaruh langsung dan tak langsung antara variabel dalam model. Adapun tujuannya adalah untuk melihat besarnya konstruk antara variabel antara hubungan langsung dan setelah melalui variabel intervening, dan menurut Ferdinand (2000) bahwa total pengaruh akan dijumlahkan antara pengaruh langsung dan tak langsung seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:



Tabel 19. Pengaruh Langsung dan Tak Langsung Antara Variabel Eksogen dengan Variabel Endogen

Hubungan		Simbol	Langsung	Simbol	Tidak Langsung	Total
Y1	← X1	α_1	0,320	$\beta_1\alpha_3$	0,021	0,341
	← X2	α_2	0,234	$\beta_2\alpha_3$	0,057	0,291
	← Y2	α_3	0,142	$\alpha_3\gamma_3$	0,034	0,176
Y2	← X1	β_1	0,146	$\alpha_1\alpha_3$	0,045	0,191
	← X2	β_2	0,405	$\alpha_2\alpha_3$	0,033	0,438
Y3	← X1	γ_1	0,004	$\alpha_1\gamma_4$	0,141	0,145
	← X2	γ_2	0,264	$\alpha_2\gamma_4$	0,102	0,366
	← Y1	γ_4	0,442	$\alpha_3\gamma_3$	0,034	0,476
	← Y2	γ_3	0,240	$\alpha_3\gamma_4$	0,062	0,302
Y4	← X1	$-\delta_1$	-0,139	$\alpha_1-\delta_3\gamma_1-\delta_4$	-0,387	0,582
	← X2	$-\delta_2$	-0,335	$\alpha_2-\delta_3\gamma_2-\delta_4$	-0,154	-0,489
	← Y1	$-\delta_3$	-0,072	$\alpha_3-\delta_3\gamma_4-\delta_4$	-0,0006	-0,072
	← Y2	$-\delta_5$	0,198	$\alpha_3-\delta_3\gamma_3-\delta_4$	-0,00003	-0,198
	← Y3	$-\delta_4$	-0,052	$\gamma_4-\delta_3\gamma_3-\delta_5$	-0,0015	-0,054
Y5	← X1	$-\theta_1$	-0,030	$-\theta_3-\delta_4\gamma_4\beta_1$	-0,001	-0,031
	← X2	$-\theta_6$	0,221	$-\theta_3-\delta_4\gamma_4\alpha_3$	-0,005	-0,226
	← Y1	$-\theta_2$	0,350	$-\delta_3-\theta_3\gamma_4-\theta_5$	-0,0011	-0,351
	← Y2	$-\theta_4$	-0,222	$\alpha_3-\theta_2-\delta_3-\theta_3$	-0,0025	-0,226
	← Y3	$-\theta_5$	-0,133	$\gamma_4-\theta_2\gamma_3-\theta_4$	-0,0082	-0,141
	← Y4	$-\theta_3$	-0,262	$-\delta_3-\theta_2-\delta_5-\theta_4$	-0,0007	-0,263

Sumber: Output AMOS 7.0 dari Data Diolah

Berdasarkan Tabel 19 atas dapat dijelaskan persamaan regresi

untuk masing-masing model dalam analisis SEM sebagai berikut :

1. Model Pertumbuhan Ekonomi

$$Y_1 = (\alpha_0 + \alpha_3\beta_0) + (\alpha_1 + \alpha_3\beta_1)X_1 + (\alpha_2 + \alpha_3\beta_2)X_2 + (\alpha_3\beta_2 + \varepsilon_1)$$

$$= ((\alpha_0 + 0,142\beta_0) + (0,32 + (0,142)(0,146)X_1 + (0,234 + (0,142)(0,405)X_2 + (0,142)))$$

2. Model Investasi

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

$$= \beta_0 + (0,146)X_1 + (0,405)X_2$$

3. Model Pendapatan Asli Daerah

$$Y_3 = (\gamma_0 + \gamma_4 \alpha_0 + \gamma_4 \alpha_3 \beta_0 + \gamma_3 \beta_0) + (\gamma_4 \alpha_1 + \gamma_4 \alpha_3 \beta_1 + \gamma_1)X_1 + (\gamma_4 \alpha_2 + \gamma_4 \alpha_3 \beta_2 + \gamma_2)X_2$$

$$= (\gamma_0 + 0,442\alpha_0 + (0,442)(0,142)\beta_0 + (0,240)\beta_0 + (0,442)(0,320) + (0,442)(0,142)(0,146) + 0,004)X_1 + (0,442)(0,234) + (0,442)(0,142)(0,405) + 0,264 +)X_2$$

4. Model Pengangguran adalah

$$Y_4 = \delta_0 + \delta_3 \alpha_0 + \delta_3 \alpha_3 \beta_0 + \delta_3 \beta_0 + (\delta_3 \alpha_3 \beta_1 + \delta_3 \alpha_1 + \delta_3 \beta_1 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_1 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \beta_1 + \delta_4 \gamma_1 + \delta_4 \gamma_3 \beta_1 + \delta_4 \epsilon_3 + \delta_1)X_1 + (\delta_4 \gamma_2 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_2 + \delta_5 \beta_2 + \delta_3 \alpha_2 + \delta_3 \alpha_3 \beta_2 + \delta_4 \gamma_4 \delta_4 \alpha_3 \beta_2 + \delta_4 \gamma_3 \beta_2 + \delta_2)X_2$$

5. Model Kemiskinan Perkotaan

$$Y_5 = \theta_0 + \theta_3(\alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 \beta_0 + \alpha_3 \beta_1 X_1 + \alpha_3 \beta_2 X_2 + \alpha_3 \epsilon_2 + \epsilon_1) + \theta_4(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon_2) + \theta_5(\gamma_0 + \gamma_4 \alpha_0 + \gamma_4 \alpha_1 X_1 + \gamma_4 \alpha_2 X_2 + \gamma_4 \alpha_3 \beta_0 + \gamma_4 \alpha_3 \beta_1 X_1 + \gamma_4 \alpha_3 \beta_2 X_2 + \gamma_4 \alpha_3 \epsilon_2 + \gamma_4 \epsilon_1 + \gamma_3 \beta_0 + \gamma_3 \beta_1 X_1 + \gamma_3 \beta_2 X_2 + \gamma_3 \epsilon_2 + \gamma_1 X_1 + \gamma_2 X_2 + \epsilon_3) + \theta_6(\delta_0 + \delta_3 \alpha_0 + \delta_3 \alpha_1 X_1 + \delta_3 \alpha_2 X_2 + \delta_3 \alpha_3 \beta_0 + \delta_3 \alpha_3 \beta_1 X_1 + \delta_3 \alpha_3 \beta_2 X_2 + \delta_3 \alpha_3 \epsilon_2 + \delta_3 \epsilon_1) + \delta_5 \beta_0 + \delta_5 \beta_1 X_1 + \delta_5 \beta_2 X_2 + \delta_5 \epsilon_2 + \delta_4 \gamma_0 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_0 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_1 X_1 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_2 X_2 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \beta_0 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \beta_1 X_1 + \delta_4 \gamma_4 \delta_4 \alpha_3 \beta_2 X_2 + \delta_4 \gamma_4 \alpha_3 \epsilon_2 + \delta_4 \gamma_4 \epsilon_1 + \delta_4 \gamma_3 \beta_0 + \delta_4 \gamma_3 \beta_1 X_1 + \delta_4 \gamma_3 \beta_2 X_2 + \delta_4 \gamma_3 \epsilon_2 + \delta_4 \gamma_1 X_1 + \delta_4 \gamma_2 X_2 + \delta_4 \epsilon_3 + \delta_1 X_1 + \delta_2 X_2 + \epsilon_4) + \theta_1 X_1 + \theta_2 X_2 + \epsilon_5$$

Berdasarkan hasil estimasi diatas ditemukan bahwa X_1 = Anggaran Pemberdayaan Ekonomi tidak berpengaruh langsung terhadap Y_5 = kemiskinan perkotaan dengan nilai estimasi -0,030, sedangkan pengaruh tidak langsungnya melalui Y_1 = pertumbuhan ekonomi sebesar 0,112, pengaruh tidak langsung melalui Y_2 = Investasi sebesar -0.033 dan melalui Y_3 = PAD sebesar -0,0005 dan melalui Y_4 = Pengangguran sebesar -0,036

Akan halnya X_2 = Dana Desentralisasi Fiskal, menunjukkan tidak berpengaruh langsung terhadap Y_5 = kemiskinan dengan nilai estimasi sebesar -0,221 . Pengaruh tidak langsung melalui Y_1 = pertumbuhan ekonomi sebesar 0,081, melalui Y_2 = Investasi sebesar -0,089 dan melalui Y_3 = Pendapatan Asli Daerah sebesar -0,035 dan Y_4 = Pengangguran sebesar -0,087

Hasil estimasi menunjukkan Y_1 = pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap Y_5 = kemiskinan daerah perkotaan dengan nilai sebesar -0,350 dan pengaruh tidak langsungnya melalui Y_2 = Investasi sebesar -0,028, melalui Y_3 sebesar -0,058 dan melalui Y_4 = Pengangguran sebesar -0,018.

Pengaruh langsung Y_2 = Investasi terhadap Y_5 = kemiskinan perkotaan adalah negatif sebesar -0,222 dan pengaruh tidak langsungnya melalui Y_1 = pertumbuhan ekonomi sebesar -0,049, melalui Y_3 = PAD dengan hasil estimasi sebesar - 0,032 dan melalui Y_4 = Pengangguran sebesar - 0,051.

BAB VI

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang hasil temuan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah penelitian dan mendiskusikan dengan landasan teoretis atau temuan sebelumnya sebagai suatu implikasi dari hasil penelitian tersebut.

Pembahasan secara sistematis disesuaikan dengan tujuan penelitian dengan memperhitungkan rumusan hipotesis khususnya yang terkait dengan model analisis struktural (SEM), baik secara simultan maupun secara parsial. Berikut ini tahapan pembahasan berdasarkan jalur hubungan antara variabel dalam model:

A. Analisis dan Implikasi Pengaruh Anggaran Pemberdayaan Ekonomi dalam APBD terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Pengangguran di Perkotaan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh antara variabel, maka diperoleh fakta bahwa Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat tidak berpengaruh langsung terhadap kemiskinan. Pengaruh tidak langsungnya melalui Pertumbuhan Ekonomi juga tidak signifikan, sedangkan melalui Investasi negatif signifikan, melalui PAD tidak berpengaruh dan melalui pengangguran negatif signifikan, yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pengaruh Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Anggaran Pemberdayaan ekonomi masyarakat berpengaruh langsung, positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Hal tersebut sejalan dengan Hukum Wagner "Hukum meningkatnya ekspansi aktivitas publik", suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. Wagner mengemukakan pendapatnya bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan "*The Law of Expanding State Expenditure*" menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai determinan utama pertumbuhan sektor publik (Wagner, 1983 dalam Mankiw, 2007 dan Donrbusch, et,al, 1987) yang berarti pengeluaran pemerintah merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Analogi untuk hubungan ini adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka tingkat penerimaan pemerintah dari sektor pajak juga meningkat yang akhirnya meningkatkan pengeluaran pemerintah.

Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga mencerminkan semakin besarnya kebutuhan layanan jasa pemerintah, sehingga dibutuhkan anggaran pemerintah yang semakin besar.

Studi yang menunjukkan hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan diantaranya: Ram (1986) dan Grossman(1988) menemukan hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Diamond (1989) menyatakan bahwa pengeluaran sosial mempunyai hubungan positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak tersebut sangat dipengaruhi oleh efisiensi penggunaan dana.

Bukti empiris di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam APBD berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Beberapa kota seperti : Bandung, Makassar, dan Balikpapan menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi tinggi . Kota Bandung mengalokasikan anggaran pemberdayaan ekonomi dalam jumlah besar (tabel) melalui Program " Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang kemakmuran)" dan sejak Tahun 2007 menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan demikian pula pengaruhnya terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan pada Tahun 2008. Sedangkan anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kota Makassar dan Balikpapan sangat kecil, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Selain Kota Bandung, beberapa kota yang juga mengalokasikan anggaran pemberdayaan ekonomi secara khusus yaitu : Surabaya, Jakarta Selatan, Jogjakarta, Malang dan Denpasar , semuanya menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara pertumbuhan ekonomi, dengan anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dialokasikan dalam APBD Kota. Sedangkan kota-kota lainnya, yang mengalokasikan anggaran pemberdayaan dalam jumlah yang tidak cukup besar, menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Implikasi dari temuan ini yaitu anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam APBD walaupun berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pengaruhnya belum cukup kuat untuk mendorong terjadinya pengurangan jumlah kemiskinan dan pengangguran di perkotaan secara signifikan.

Hal tersebut menjadi penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi perkotaan, yaitu dalam merencanakan belanja publik, diantaranya anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kota serta berdampak terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran di perkotaan

Beberapa hal yang harus mendasari perencanaan Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yaitu : pemberian peluang atau akses

yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; penguatan industri kecil; mendorong munculnya wirausaha baru; dan pemerataan spasial.

Guna mendukung hal tersebut diperlukan data kemiskinan dan pengangguran yang akurat serta komitmen yang tinggi dari para penentu kebijakan terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dapat diimplementasikan secara riil dan ditetapkan sebagai program pembangunan prioritas dalam APBD .

Dengan demikian, anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat mewujudkan ekonomi rakyat yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar, namun berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomiannya .

2. Pengaruh Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terhadap Investasi

Anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam APBD tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi, hal ini berarti peningkatan anggaran tidak akan mempengaruhi investasi, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Aschaver (1989), Greene and Villanuva (1991), Munnell (1992), Shafik (1992), Oshikaya (1994), Ramirez (1994), Ghura and Goodwin (2000),



Mamatzakis (2001) and Rashid (2005) yang mendapatkan hubungan positif antara anggaran pengeluaran pemerintah dengan investasi. Pengaruh tidak langsungnya negatif melalui pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, sebagaimana penelitian Akkina and Celibi (2002), Pereira and Sagales (2001), Williams and Darius (1998) and Wai and Wang (1982)].

Implikasi temuan ini yaitu Anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak berpengaruh langsung terhadap investasi, akan tetapi melalui peningkatan investasi akan terjadi peningkatan pendapatan pemerintah dan hal itu akan berpengaruh terhadap anggaran belanja dalam APBD, termasuk pula anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kemudian anggaran tersebut diharapkan dapat menurunkan kemiskinan dan pengangguran.

3. Pengaruh Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD)

Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap PAD, hal ini berarti peningkatan anggaran pemberdayaan ekonomi tidak akan mempengaruhi PAD, hal ini sejalan dengan penelitian Aschaver (1989), Greene and Villanuva (1991), Munnell (1992), Shafik (1992), Oshikaya (1994), Ramirez (1994), Ghura and Goodwin (2000), Mamatzakis (2001) and Rashid (2005) yang tidak mendapatkan adanya hubungan positif

antara pengeluaran pemerintah dalam hal ini anggaran pemberdayaan ekonomi terhadap Pendapatan atau PAD. Pengaruh tidak langsungnya positif dan signifikan melalui pertumbuhan ekonomi, sebagaimana penelitian Akkina and Celibi (2002), Pereira and Sagales (2001), Williams and Darius (1998) and Wai and Wang (1982)] menyatakan hubungan yang hubungan positif.

Bukti empiris dalam penelitian ini adalah kota-kota besar seperti : Jakarta Selatan, Surabaya, Bandung, Palembang memperlihatkan anggaran pemberdayaan ekonomi dalam APBD yang cukup besar dan meningkat setiap tahunnya, namun tidak menunjukkan adanya peningkatan PAD yang cukup signifikan, dengan demikian tidak ada korelasi langsung anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat terhadap Pendapatan Asli Daerah , akan tetapi berpengaruh tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.

Implikasi temuan ini yaitu besarnya anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam APBD tidak dikaitkan dengan PAD karena pada umumnya pemerintah kota belum menjadikan besarnya nilai PAD kota sebagai dasar dalam menetapkan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga tidak ada korelasi antara keduanya dan tentunya juga tidak mempengaruhi penurunan pengangguran serta angka kemiskinan di perkotaan.

Penetapan besarnya anggaran pemberdayaan ekonomi berdasarkan persentase nilai PAD yang di dapatkan pemerintah kota akan berdampak terhadap peningkatan atau penurunan anggaran setiap tahunnya, namun dengan adanya penetapan tersebut baik melalui Perda atau Peraturan Walikota, maka minimal ada jaminan bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat akan selalu dianggarkan dalam APBD kota, melihat bahwa hingga saat ini belum semua daerah dan kota mengalokasikan anggaran pemberdayaan ekonomi secara khusus dan berkelanjutan dalam APBD kota.

4. Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan pengaruhnya terhadap Pengangguran

Salah satu program yang diharapkan dapat mengurangi tingginya angka pengangguran di perkotaan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun anggaran pemberdayaan yang dialokasikan dalam APBD kota tidak menunjukkan adanya pengaruh langsung terhadap pengangguran demikian pula pengaruh tidak langsungnya melalui PAD kota. Beberapa penelitian yang sejalan dengan hal tersebut dilakukan oleh Dritsakis, Nicolaos Adamopoulos, Antonis, Shenggen Fan, Peter Hazell Sukhadeo Thorat Neelesh Gounder Paresh Kumar Narayan Arti Prasad,

yang menemukan bahwa anggaran belanja pemerintah tidak mempengaruhi pengangguran.

Fakta yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu anggaran pemberdayaan yang dialokasikan dalam APBD kota – kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar tidak berpengaruh terhadap pengurangan jumlah pengangguran kota, demikian pula pengaruh tidak langsungnya melalui PAD kota tidak berdampak terhadap pengurangan jumlah pengangguran di perkotaan.

Kecuali Kota Bandung yang secara khusus mengalokasikan anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam jumlah yang cukup besar sejak Tahun 2007 melalui Program " Bawaku Makmur ",

Pemerintah Kota Bandung secara khusus dan bertahap namun konsisten terus berupaya untuk mewujudkan pengembangan perekonomian kota yang adil melalui berbagai langkah dan kebijakannya antara lain melalui Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung dalam bentuk Perda No. 06 Tahun 2004, yang bertujuan meningkatkan potensi sumber daya ekonomi kota yang dapat meningkatkan daya beli dan kesempatan kerja masyarakat. Untuk itu, sebanyak 50.971 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Bandung, sejak akhir 2007 lalu, secara bertahap telah menerima Bantuan Peningkatan Usaha dan Kesejahteraan diselenggarakan melalui Program Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran, atau yang dikenal istilah "Bawaku Makmur" dengan total anggaran Rp 36.419.M .

Program Bawaku Makmur, dimaksudkan untuk dapat membantu mengatasi persoalan masyarakat di bidang pembangunan ekonomi. Program tersebut merupakan salah satu strategi kebijakan ekonomi kota yang dilakukan dalam rangka mengakselerasi pencapaian target IPM Kota Bandung, dengan upaya mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah, serta individu atau kelompok masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan dan atau akan melakukan perintisan usaha.

Secara spesifik, sasaran penerima dana hibah terbagi tiga kelompok : pertama, kelompok masyarakat atau perorangan yang melakukan perintisan usaha ; kedua, pelaku usaha kecil dan menengah baik kelompok maupun perorangan di bidang jasa, produksi, industri; ketiga, koperasi dengan bidang usaha simpan pinjam, konsumen, produsen dan aneka usaha.

Program ini diatur dalam Peraturan Walikota No.321/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian/Penyaluran Bantuan Peningkatan Kemakmuran dengan Alokasi bantuan sebesar 10 persen bagi calon wirausaha (Rp.500.000,- s/d Rp.5.000.000); 55 persen bagi UKM (Rp.500.000,- s/d Rp.15.000.000,-); serta 35 persen bagi Koperasi (Rp.5.000.000,- s/d Rp.15.000.000,-). Mekanisme Pemberian Bantuan yaitu : Proposal dan atau data sekunder pemohon dianalisa&disurvey; hasil telaahan disampaikan kepada walikota utk dipertimbangkan; bila memenuhi persyaratan, walikota menerbitkan Daftar Nama Calon Penerima Bantuan untuk mendapat persetujuan DPRD.



Dengan adanya program tersebut terlihat adanya penurunan pengangguran pada Tahun 2008, namun belum ada penelitian yang membuktikan bahwa penurunan tersebut terutama disebabkan oleh program Bawaku Makmur, namun melalui program tersebut pemerintah Kota Bandung telah membuka peluang usaha dan kesempatan kerja bagi pengangguran yang ada

Dengan demikian implikasi dari temuan ini bahwa anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat dan PAD belum dapat mendorong terjadinya pengurangan pengangguran. Hal ini antara lain disebabkan oleh jumlah anggaran pemberdayaan ekonomi dalam APBD masih sangat jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai permasalahan yang dihadapi terutama untuk mengurangi tingkat pengangguran di daerah perkotaan yang dari tahun ke tahun tidak menunjukkan adanya penurunan signifikan.

Selain dari itu, masih banyak pengangguran di perkotaan yang belum mengetahui dan tertarik untuk mengakses modal dan informasi dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada umumnya pengangguran dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi masih lebih tertarik untuk berburu bursa pekerjaan di perusahaan atau pemerintahan dan kurang berminat untuk mengembangkan wirausaha dengan memanfaatkan bantuan

permodalan baik dari program pemberdayaan ekonomi maupun dari perbankan.

5. Pengaruh Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terhadap Kemiskinan Perkotaan

Anggaran Pemberdayaan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan perkotaan, dengan demikian peningkatan anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak mempengaruhi angka kemiskinan . Beberapa penelitian yang mendukung antara lain Alesina and Rodrik, (1994); Dagdeviren *et al.* (2002); Agenor, (2004), pertumbuhan dapat berpengaruh baik atau buruk bagi pengurangan kemiskinan, tergantung pada bagaimana kebijakan makroekonomi seperti ; belanja publik, peningkatan pendapatan dan kebijakan lainnya dirancang untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi , akan tetapi bilamana kebijakan tersebut berpengaruh negatif terhadap masyarakat miskin, maka anggaran pengeluaran pemerintah harus ditingkatkan (Squire, 1993) atau mempermudah dan memberi peluang modal (Birdsall and Londono, 1997), oleh karena kebijakan makroekonomi misalnya belanja publik dan anggaran pembangunan akan berpengaruh berbeda bagi setiap individu sebab masing –masing memiliki peluang dan tantangan .Pada tingkat mikro (Galor and Zeira, 1993), Datt and Ravallion (1998) dan Palmer-Jones and Sen (2006a) Carter and Barrett (2006).

Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa beberapa kota dengan angka kemiskinan yang tinggi seperti : Surakarta , Pasuruan dan Jayapura, tidak mengalokasikan anggaran pemberdayaan ekonomi yang cukup besar dalam APBD kota, memang terlihat adanya peningkatan jumlah anggaran tetapi nilainya tidak signifikan atau sangat kecil. Demikian pula halnya dengan kota-kota yang memiliki nilai anggaran pemberdayaan ekonomi besar, seperti : Bandung, Surabaya, Jakarta dan Semarang belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, sebagaimana terlihat pada gambar di atas , angka kemiskinan terlihat tidak menunjukkan penurunan yang signifikan meskipun anggaran pemberdayaan ekonomi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Implikasi temuan dalam penelitian ini yaitu anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan perkotaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat belum ditetapkan secara tepat. Berdasarkan penjelasan dari beberapa Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda kota didapatkan fakta bahwa selama ini pemerintah kota pada umumnya menetapkan anggaran pemberdayaan ekonomi hanya berdasarkan asumsi persentase kenaikan anggaran setiap tahun, rata-rata 5 -10 persen dari tahun dan kemudian dihubungkan dengan angka kemiskinan kota.

Dengan demikian pagu anggaran yang diperuntukkan bagi program pemberdayaan ekonomi masyarakat belum menjadi prioritas dalam APBD, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan jumlah kemiskinan perkotaan secara signifikan, masih sebatas pada konsep yang tertuang pada Visi dan Misi dalam RPJM Kota. Pemerintah kota belum memiliki data base kemiskinan kota yang akurat dan dapat dijadikan dasar dalam merencanakan anggaran pemberdayaan ekonomi dan selalu dikaitkan dengan target indikator capaian penurunan angka kemiskinan yang tercantum dalam RPJM.

Idealnya, selain program khusus yang didisain untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, juga terdapat program-program pendukung yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di daerah perkotaan, kebijakan tersebut harus dikuatkan dengan Perda atau aturan pemerintah lainnya, dengan demikian program pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi program eksklusif bagi SKPD tertentu tapi menjadi program wajib dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) .

B. Analisis dan Implikasi Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah dan Pengangguran

Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh langsung terhadap kemiskinan daerah perkotaan. Pengaruh tidak langsungnya melalui

pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi dan pengangguran, positif dan signifikan.

1. Pengaruh Dana Desentralisasi Fiskal terhadap pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kota-kota di Indonesia menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil studi ini mendukung temuan empiris Martinez and Robert Mc.Nab (2001), Mahi (2000), Brodjonegoro (2002), Dartanto dan Brodjonegoro (2003).

Beberapa penelitian yang sejalan antara lain: Holtz-Eakin *et.al.*, (1985) dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi (Chang & Ho, 2002), dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah, Miles (2001) Gamkhar dan Oates (1996).

Desentralisasi mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dalam era desentralisasi fiskal dengan transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas

kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi kota.

Hasil studi ini sesuai dengan teori desentralisasi fiskal Oates (1993). Menurut Oates desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan pelayanan publik.

Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi.

Selain itu, desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat.

Dalam penelitian ditemukan fakta bahwa kota-kota yang mendapatkan dana desentralisasi fiskal dalam jumlah besar seperti : Jakarta Selatan, Bandung dan Balikpapan, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Sebaliknya, kota-kota dengan dana

desentralisasi fiskal kecil, seperti : Gorontalo, Pare-Pare, Jayapura dan Kendari angka pertumbuhan ekonominya juga kecil.

Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu pengalokasian dana desentralisasi fiskal dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

2. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Investasi

Hasil estimasi menunjukkan bahwa dana desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi, dengan demikian desentralisasi fiskal menentukan investasi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Hansen and Perloe, 1944; Rafuse, 1965; Ziegler, 1972; Bahl, 1984; Blackley and DeBoer, 1993; Fox and Murray, 1997, yang mendapatkan adanya hubungan positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan investasi.

Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa kota yang memiliki dana desentralisasi fiskal tinggi seperti Jakarta Selatan, Surabaya, Bandung, Balikpapan menunjukkan nilai investasi yang cukup tinggi pula. Implikasi kebijakan dari temuan ini yaitu besarnya dana desentralisasi fiskal dapat dialokasikan pada program dan kegiatan yang peningkatan kualitas pelayanan publik baik sarana dan prasarana

sehingga dapat mendorong peningkatan investasi baik dalam negeri maupun PMA.

3. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pengangguran

Desentralisasi fiskal berpengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap pengangguran dan pengaruh tidak langsungnya melalui pertumbuhan dan Investasi positif signifikan. Dengan demikian peningkatan dana desentralisasi fiskal berpengaruh secara langsung terhadap pengangguran, tetapi melalui pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian yang terkait dengan hal ini dilakukan antara lain oleh Oates (1993) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Penelitian Yose Rizal Damuri dan Ari A Perdana (2003) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Penelitian Jutting et al (2004) menunjukkan bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pengangguran bersifat *ambiguous*. Dampak desentralisasi terhadap kemiskinan dan pengangguran tergantung pada kapasitas dan kemampuan pengambil kebijakan untuk

mencurahkan perhatian terhadap program dan pengurangan pengangguran.

Bukti empiris di lapangan yaitu beberapa kota yang mendapatkan dana desentralisasi fiskal dalam jumlah besar seperti : Jakarta Selatan, Bandung dan Balikpapan memperlihatkan angka pengangguran rata-rata 6,7%, sedangkan kota yang mendapat alokasi dana desentralisasi fiskal dalam jumlah kecil seperti : Kota Sukabumi, Pare-Pare, Kendari dan Gorontalo, menunjukkan angka pengangguran sebesar 10,5%.

Implikasi hasil penelitian yaitu bilamana dana desentralisasi fiskal yang dialokasikan ke daerah dimanfaatkan secara bijak dan diarahkan pada program-program yang berorientasi pada pengurangan pengangguran, maka secara perlahan tapi pasti jumlahnya pengangguran perkotaan akan mengalami penurunan.

4. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan Perkotaan

Berdasarkan hasil estimasi Dana Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh langsung terhadap kemiskinan, sedangkan pengaruh tidak langsungnya melalui pertumbuhan ekonomi, pendapatan Asli daerah, investasi dan pengangguran. Hal tersebut berbeda dengan beberapa

penelitian lalu yang dilakukan antara lain oleh Strauss, *et al.* (2002) yang disponsori oleh World Bank dengan menggunakan *Indonesian Family Life Surveys (IFLS)* untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Beberapa penelitian lain yang terkait dilakukan oleh Barzelay, (1991), Bahl (2000), Lewis (2001), Gemmell, Kneller dan Sanz (1998), Tao Zhang dan Heng-fu Zou (1998), Bird (1993), Bird dan Wallich (1993), Linn (1992), Gramlich (199) ,Wang dan Hu (1993); World Bank (1995, 1996) Akai and Sakata (1997-2001), Davoodi and Zou (2003), Woller and Phillips(1974).

Hasil temuan empiris menunjukkan bahwa dana desentralisasi fiskal tidak mempengaruhi penurunan kemiskinan di daerah perkotaan. Ditemukan fakta bahwa kota-kota yang memiliki dana desentralisasi fiskal dan anggaran pemberdayaan ekonomi dalam jumlah besar , memperlihatkan adanya penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, namun persentase penurunannya sangat kecil dan tidak signifikan,sehingga dapat dikatakan bahwa dana tersebut tidak mempengaruhi pengurangan kemiskinan diperkotaan (gambar.)

Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu dana desentralisasi fiskal belum diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan dana transfer lebih banyak



digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan belanja aparat yang kurang produktif, sedangkan yang dialokasikan untuk memberdayakan masyarakat sangat terbatas dan tidak cukup besar untuk dapat menumbuhkan aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan membuka peluang kerja.

C. Analisis dan Implikasi Pengaruh Investasi terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan Pengangguran

Investasi berpengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap kemiskinan kota. Pengaruh tidak langsungnya positif dan signifikan melalui pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan pengangguran.

1. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Axéle (1997), Giroud (2001), Hossein Jalilian (2004), John Weiss(1999), Nick Freeman (2002), Mya Than (2007), Pradeep Agrawal (2005), Brian W. Cashell (2002), Bigsten (2000), Arne Levin (2004), JorgenHelsinky (2004) yang mengungkapkan adanya hubungan positif antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi

digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan belanja aparat yang kurang produktif, sedangkan yang dialokasikan untuk memberdayakan masyarakat sangat terbatas dan tidak cukup besar untuk dapat menumbuhkan aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan membuka peluang kerja.

C. Analisis dan Implikasi Pengaruh Investasi terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan Pengangguran

Investasi berpengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap kemiskinan kota. Pengaruh tidak langsungnya positif dan signifikan melalui pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan pengangguran.

1. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Axèle (1997), Giroud (2001), Hossein Jalilian (2004), John Weiss (1999), Nick Freeman (2002), Mya Than (2007), Pradeep Agrawal (2005), Brian W. Cashell (2002), Bigsten (2000), Arne Levin (2004), Jorgen Helsinky (2004) yang mengungkapkan adanya hubungan positif antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi

memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno,2000:367).

PMA merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sukses. Hal terpenting dalam pembangunan ekonomi adalah percepatan dan transfer efisiensi serta proses adopsi berbagai keberhasilan yang telah dicapai negara lain, secara khusus PMA diyakini sebagai faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, paling tidak melalui peningkatan kualitas SDM . Oleh karena pertumbuhan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi pengurangan kemiskinan, maka PMA menjadi penentu utama dalam mencapai tujuan tersebut (K.Michael,2001)

Fakta empiris menunjukkan bahwa kota-kota besar seperti : Jakarta, Balikpapan, Bandung, Makassar dan Palembang dengan jumlah investasi yang tinggi juga memperlihatkan tren pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara signifikan setiap tahunnya, sebaliknya kota-kota dengan tingkat investasi rendah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak tinggi.

Implikasi dari temuan tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dipacu melalui peningkatan investasi, tanpa investasi yang

kuat maka pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak akan berkualitas dan tidak memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, temuan ini sejalan dengan temuan Allen dan Qian (2005), Lo (2007), Khalidi, Taqdizi (2006), Dritzaki, Adamopoulos (2004), Barua, Sawhney (2007), Bhattacharya and Sakthivel (2004), Kalirajan et al (2009).

Bukti empiris menunjukkan bahwa beberapa kota dengan nilai investasi besar seperti: Bandung, Surabaya, Jakarta Selatan, Palembang dan Makassar memperlihatkan PAD yang tinggi, sedangkan kota-kota dengan nilai investasi tidak besar seperti : Ambon, Gorontalo, Jayapura, dan Pare-Pare mendapatkan PAD yang rendah.

Implikasi temuan ini yaitu melalui peningkatan investasi PMA dan PMDN akan terjadi peningkatan PAD disebabkan adanya peningkatan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja yang berdampak terhadap peningkatan kontribusi pajak dan retribusi daerah.

3. Pengaruh Investasi terhadap Pengangguran

Dalam penelitian ini didapatkan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran, berarti peningkatan

investasi di kota-kota Indonesia berpengaruh dalam menurunkan jumlah pengangguran, hal ini mendukung beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu ; pandangan Neoklasik yang menyatakan investasi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi, semakin cepat laju perkembangan investasi, semakin cepat perkembangan volume stok capital rata-rata per tenaga kerja sehingga kapasitas produksi tenaga kerja semakin tinggi pula (Solow dan Swan).

Penanaman modal asing dapat mengisi kebutuhan akan investasi dan untuk menggerakkan tabungan domestik (Todaro and Smith, 2003, Hayami, 2001). Selain itu juga akan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, meningkatkan manajemen dan teknologi serta keterampilan tenaga kerja. Pada akhirnya investasi tersebut akan membantu negara dalam memecahkan permasalahan pengangguran dan kemiskinan (Hayami, 2001). Manfaat investasi dapat mencakup akuisisi teknologi baru, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia, dan kontribusi terhadap integrasi perdagangan internasional, meningkatkan investasi domestik, dan meningkatkan pajak pendapatan yang dihasilkan oleh Penanaman Modal Asing (Jenkins dan Thomas, 2002; Bank Dunia, 2000).

Dampak Penanaman Modal terhadap kemiskinan dan pengangguran tergantung pada banyak faktor termasuk kebijakan

negara, kualitas pasar tenaga kerja, ekonomi lingkungan, dan investasi itu sendiri (Mayne, 1997). Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2000).

Peningkatan produktifitas merupakan salah satu yang membedakan antara investasi swasta dengan investasi publik pemerintah Klein (2003). Peningkatan investasi sektor swasta menyebabkan lapangan kerja terbuka luas bagi pekerja, Steer and Taussig (2002) Loc, Lanjouw, and Lensink (2006).

Bukti empiris yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu kota-kota dengan nilai investasi yang besar seperti : Bandung, Surabaya dan Jakarta Selatan menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan nilai investasi, jumlah pengangguran cenderung menurun dari tahun ke tahun dan dalam kurun waktu lima tahun, telah terjadi pengurangan pengangguran . Sebaliknya, kota Ambon, Gorontalo dan Pare-Pare dengan nilai investasi yang tidak besar memperlihatkan penurunan angka pengangguran yang juga kecil selama lima tahun.

Implikasi hasil penelitian, laju pengangguran di kota-kota dapat dikurangi dengan peningkatan investasi baik PMDN maupun PMA,

melalui investasi akan tercipta kesempatan kerja yang akan dapat menyerap pengangguran di perkotaan.

4. Pengaruh Investasi terhadap Kemiskinan Perkotaan

Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, hal tersebut berarti bahwa besarnya investasi atau penanaman modal di kota-kota Indonesia berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan, tetapi pengurangan tersebut tidak berarti besar. Hal tersebut sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya ; Jenkins dan Thomas, 2002; Bank Dunia, 2000). Investasi dapat memberikan kontribusi bagi ekonomi dan lapangan kerja , pertumbuhan ekonomi tinggi yang merupakan alat efektif untuk mewujudkan perbaikan dalam pengurangan kemiskinan. Akan tetapi, dampak investasi asing terhadap kemiskinan dan pengangguran tergantung pada banyak faktor termasuk kebijakan negara, kualitas pasar tenaga kerja, ekonomi lingkungan, dan investasi itu sendiri (Mayne, 1997) Dampak langsung investasi terhadap kemiskinan dapat dilihat melalui peningkatan lapangan kerja dan pengurangan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang dihasilkan dari peningkatan permintaan untuk kerja, dan peningkatan tenaga kerja dan keselamatan, Bende-Nabende (1998)

Investasi merupakan faktor penting untuk menghasilkan pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi adalah faktor paling penting yang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Dollar and Kraay (2000), dengan demikian efek positif investasi cenderung lebih besar daripada efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, Nelson dan Pack (1999), dan Kakwani (2000).

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam mengurangi kemiskinan, beberapa studi mengemukakan bahwa pertumbuhan cenderung meningkatkan pendapatan masyarakat miskin secara proporsional dengan pertumbuhan secara menyeluruh (Dollar and Kraay, 2000). PMA adalah kunci utama pemicu pertumbuhan, sehingga menjadi faktor penting yang menentukan pengurangan kemiskinan. Apakah berpotensi dalam proses difusi atau tergantung daya serap dari negara penerima, termasuk tingkat pendidikan dan infrastruktur diperlukan untuk memaksimalkan manfaat PMA tersebut (Borenzstein, De Gregoria and Lee, 1998) demikian pula halnya persaingan dalam pasar domestik (Bromstrom and Kokko, 1996). Semuanya diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan lowongan kerja, dimana hal tersebut adalah salah satu sarana dalam mewujudkan pengurangan kemiskinan. Dengan demikian pengaruh PMA terhadap kemiskinan tergantung pada banyak faktor dan ditentukan oleh institusi dan kebijakan negara, kualitas tenaga kerja, kondisi perekonomian dan investasi itu sendiri. (Mayne, 1997).

PMA berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap pengurangan kemiskinan, melalui pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan standar hidup dan peningkatan pendapatan perkapita, peningkatan teknologi dan produktivitas, dan juga kondisi perekonomian. Pengaruh langsungnya terlihat pada peningkatan lapangan kerja dan pengurangan penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan yang disebabkan oleh peningkatan permintaan tenaga kerja dan peningkatan bursa kerja dan keamanan kerja. Dollar and Kraay (2000), dengan menggunakan database Deninger and Squire, menemukan bahwa pertumbuhan secara keseluruhan cenderung terlihat akan meningkatkan pendapatan penduduk miskin secara proporsional, dan PMA merupakan pemicu pertumbuhan tersebut sehingga berperan penting terhadap pengurangan kemiskinan.

Dampak positif PMA lebih besar dari pada dampak negatifnya, karena menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Selanjutnya, Roemer dan Gugerty (1997) menunjukkan bahwa rata-rata penduduk miskin mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Kenaikan tingkat pertumbuhan per kapita GDP sangat berkorelasi dengan rata-rata pendapatan masyarakat miskin.

Bukti empiris di lapangan, menunjukkan bahwa kota-kota yang memiliki nilai investasi besar seperti : Bandung, Surabaya, Balikpapan dan Jakarta Selatan, menunjukkan angka kemiskinan yang tidak terlalu

tinggi ($\pm 4,5\%$), sedangkan kota yang tidak memiliki nilai investasi besar seperti :Ambon , Jayapura dan Gorontalo menunjukkan angka kemiskinan yang cukup tinggi ($\pm 16,5\%$), sehingga untuk kondisi kota-kota Indonesia menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan besarnya Investasi terhadap penurunan jumlah kemiskinan

Implikasi hasil penelitian ini adalah peningkatan nilai investasi dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan jumlah kemiskinan di kota-kota di Indonesia jika nilai investasi tersebut cukup besar dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui investasi akan terbuka kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin, dengan demikian akan terjadi pengurangan angka kemiskinan yang signifikan di kota-kota tersebut

D. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Daerah Perkotaan Melalui Pendapatan Asli Daerah dan Pengangguran

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan demikian pertumbuhan ekonomi menentukan PAD. Hal tersebut sejalan dengan temuan Robinson dan Syrquin (1986), Chenery dan Taylor (1968); Watanabe (1958), yang mendapatkan hubungan signifikan antara pertumbuhan



ekonomi dengan pajak lokal (local revenue), demikian pula dengan hasil penelitian Nasoetion (1991), Priyo Hari Adi (2006), Hadi Sasana (2005) Saragih (2003) dan Bappenas (2003) Lin dan Liu (2000). Saragih (2003) menyatakan bahwa peningkatan PAD merupakan eksese dari pertumbuhan ekonomi. Sependapat dengan ini Bappenas (2003) menegaskan bahwa pertumbuhan

PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan PDRB, artinya setiap terjadi kenaikan PDRB akan memberikan dampak positif terhadap kenaikan PAD.

Temuan empiris yang diperoleh di lapangan bahwa kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi seperti :Balikpapan , Samarinda, Bandung dan Makassar juga memperlihatkan adanya peningkatan PAD yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2004-2008.Implikasi dari temuan ini yaitu perlu upaya yang maksimal dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas , dimana pemerintah mampu mengimbangi berbagai produk baru tersebut dengan pengembangan potensi ekonomi lokal, misalnya dengan memberikan peluang yang lebih luas kepada investor. Dibutuhkan kepekaaan yang tinggi terhadap berbagai kebutuhan investor untuk meningkatkan aktivitas investasi di

perkotaan. Tingginya aktivitas investasi akan memberikan tambahan penerimaan bagi pemerintah kota

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran

Berdasarkan hasil estimasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengangguran, hal tersebut berarti pertumbuhan ekonomi kota-kota di Indonesia tidak menentukan pengurangan jumlah pengangguran, hal ini tidak sejalan dengan Hukum Okun yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara pengangguran dan GDP riil, (Mankiw, 2003) Dalam Siregar (2005), Hukum Okun juga menyatakan bahwa laju pengangguran berbanding terbalik dengan selisih laju pertumbuhan ekonomi dalam keadaan normal.

Hipotesa lain mengungkapkan bahwa pengangguran itu sendiri akan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Bila demikian peraturan pasar buruh yang mengatur pengurangan pengangguran akan mendorong pertumbuhan ekonomi, hal tersebut terjadi dalam model teori pertumbuhan endogen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang mendapatkan fakta berbeda di Eropa, bahwa pertumbuhan ekonomi

dan pengangguran merupakan dua permasalahan berbeda, sehingga solusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dihubungkan dengan solusi masalah pengangguran (Paci, Pigliaru, Pugno, 2001) Hampir tidak ada hubungan antara pertumbuhan, produktifitas dengan pengangguran (Aghion and Howitt , 1994).

Bukti empiris yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi kota-kota di Indonesia tidak berpengaruh terhadap pengurangan jumlah pengangguran, , beberapa kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti: Makassar, Jakarta Selatan, Bandung dan Jayapura , memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi dan persentasi penurunannya dari tahun ke tahun sangat kecil. Demikian pula kota-kota dengan pertumbuhan ekonomi rendah seperti : Semarang, Malang dan Cimahi juga menunjukkan tingkat pengangguran yang tinggi

Berdasarkan hal tersebut , maka pertumbuhan ekonomi tidak merupakan faktor penentu yang dominan bagi pengurangan jumlah pengangguran di kota-kota Indonesia, pertumbuhan ekonomi belum cukup tinggi dan kurang berkualitas untuk mempengaruhi pengurangan jumlah pengangguran secara signifikan. Menurut Kwik Kian Gie, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan 4,49% (tahun 2004) dan 5,03% (tahun 2005) samasekali tidak menjamin terbukanya lapangan kerja. Diperlukan enam atau

tujuh persen pertumbuhan yang bisa diperoleh dari investasi baru terutama dari investor asing. Untuk mencapai angka enam atau tujuh persen sangat sulit karena investor asing kurang berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena biaya ekonomi yang sangat tinggi. Secara teoritik (perhitungan standar dalam ekonomi), setiap pertumbuhan ekonomi 1% akan menghasilkan penyerapan tenaga kerja baru 400.000 orang.

Implikasi dari temuan ini bahwa pertumbuhan ekonomi belum berpengaruh terhadap pengurangan jumlah pengangguran di kota-kota Indonesia, oleh karena pertumbuhan ekonomi tersebut kurang berkualitas yaitu tidak didukung oleh sector-sektor yang memiliki elastisitas lapangan kerja yang tinggi pula, pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap pengangguran bila terwujud sinergi kebijakan yang mengakomodasi modal domestic, PMA dan kebijakan investasi yang mengarah pada aktivitas industri yang produktif yaitu sektor industri yang mendorong penciptaan lapangan kerja baru serta pemberdayaan ekonomi masyarakat kota.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Perkotaan

Hasil estimasi antara Pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan didapatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak

berpengaruh langsung terhadap kemiskinan, hal tersebut berarti bahwa pertumbuhan ekonomi di kota-kota Indonesia tidak berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Hal ini bertentangan dengan beberapa penelitian yang dilakukan antara lain oleh Dollar dan Kray(2002), dari hasil penelitiannya terhadap 75 negara terungkap bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti dengan pengurangan angka kemiskinan, demikian pula menurut Tendlukar (1998), Ravallion dan Datt (1996) , Deaton Dreze (2001) Bhagawati (2000). Deininger dan Squire (dalam Tambunan: 2001) menyimpulkan ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan peningkatan angka kemiskinan.

Peningkatan pendapatan per kapita secara umum akan mengurangi kemiskinan (Field, 1985, World Bank 1990, Roomer dan Gugerti,1997). Elastisitas kemiskinan dapat memperkirakan persentasi perubahan kemiskinan yang disebabkan pertumbuhan pendapatan perkapita, studi di 62 negara menunjukkan pertumbuhan rata-rata per kapita 1 % akan mengurangi 3,1% orang miskin yang hidup dibawah 1 \$ US /hari (Ravallion dan Chen,1997), sejalan dengan peneliti lainnya, Deininger,Squire, 1996, Timmer(1997), Gallup, Redelet dan Wanner (2001).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kota-kota Indonesia belum memberi manfaat bagi

masyarakat miskin secara proporsional dalam arti bahwa peningkatan pendapatan si miskin lebih besar dibandingkan yang tidak miskin(Pernia, 2003). Di sektor pertanian pertumbuhan tidak menurunkan kemiskinan, sehingga harus ada sektor industri yang mendukung pengurangan kemiskinan (Binswanger,1986), sektor industri lebih berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan (Warr dan Wang, 1999). Pengurangan kemiskinan di wilayah perkotaan disebabkan kontribusi pertumbuhan sektor industri, demikian pula dengan elastisitas pertumbuhan sektor jasa berpengaruh terhadap elastisitas kemiskinan di Indonesia, Asep, Daniel, Sudarno,2006).

Bukti empiris yang diperoleh di lapangan yaitu pertumbuhan ekonomi kota-kota di Indonesia tidak berpengaruh terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kota-kota dengan angka pertumbuhan tertinggi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti ; Kota Bandung, Makassar dan Balikpapan, memang memperlihatkan adanya penurunan jumlah kemiskinan, akan tetapi jumlah pengurangan kemiskinan sangat kecil, bahkan di beberapa kota yang memiliki angka pertumbuhan tinggi memperlihatkan angka kemiskinan yang juga tinggi, seperti Kota Surakarta dan Jayapura.

Berdasarkan temuan tersebut, menunjukkan bahwa ada faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kemiskinan di kota-kota Indonesia, antara lain : ketimpangan distribusi pendapatan sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa kajian empiris yang menguji hipotesis Kuznets di mana hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan negatif, sebaliknya hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi adalah hubungan positif. Hubungan ini sangat terkenal dengan nama kurva U terbalik dari Kuznets.

Peneliti lain, Siwar dan Idris (1996) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak seiring dengan penghapusan kemiskinan dan perbaikan pendapatan. Sebagian besar negara berkembang mengalami pertumbuhan yang tinggi, namun manfaatnya sedikit yang menetes ke bawah untuk sampai pada golongan masyarakat miskin dan sangat miskin. Schneider (2003), Bounignon(2002) semakin tinggi ketimpangan, maka semakin rendah pengaruh elastisitas pertumbuhan dalam mengurangi kemiskinan. Negara dengan ketimpangan tinggi tidak akan dapat mengurangi kemiskinan dengan cepat, Hyun dan Kakwani (2004) pertumbuhan yang cepat akan memperlambat pengurangan kemiskinan, bahkan cenderung menaikkan.

Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah kebijakan pembangunan yang tidak berorientasi pada pertumbuhan bagi si miskin (*pro poor growth*). Kemiskinan, ketimpangan dan ketertinggalan sebenarnya berakar pada struktur ekonomi politik anggaran yang timpang, yang tidak berorientasi pada kesejahteraan. Ada tiga lapis masalah dalam struktur anggaran. Pertama, kemiskinan sangat berakar di bawah dan beragam antar daerah, tetapi rezim anggaran masih jauh dari skema desentralisasi fiskal. Dari total anggaran APBN (66%) dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat, dan hanya (34%) yang ditransfer ke daerah dalam bentuk dana perimbangan dan dana otonomi khusus, bila dana tersebut didaerahkan dengan desentralisasi (*block grant*), sebagian besar belanja pemerintah pusat yang dibawa ke daerah dan desa menggunakan skema dana alokasi khusus, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sudah ditentukan dan dikendalikan secara terpusat (*specific grant*).

Termasuk dalam hal ini adalah anggaran untuk penanggulangan kemiskinan yang dinyatakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Program dan anggaran anti-kemiskinan yang terpusat itu kontradiktif dengan gambaran kemiskinan yang beragam antar daerah. Keragaman terjadi dalam bentuk data potret kemiskinan. Pemerintah menggunakan data kemiskinan berdasarkan

kriteria dan temuan agregat Badan Pusat Statistik, sementara daerah cenderung resisten dengan data yang dikeluarkan BPS, yang membuat perbedaan angka kemiskinan versi pusat dan versi daerah. Kesenjangan pendataan ini yang membuat kesulitan dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan dari pusat ke daerah dan desa.

Pemerintah daerah yang resisten cenderung tidak sepenuhnya menjalankan tugas pembantuan dari pusat dalam program penanggulangan kemiskinan bila metode dan data yang digunakan berasal dari pusat. Daerah juga tidak mau bertanggungjawab apabila dana dari pusat langsung masuk ke level kelompok sasaran. Selain itu, akar kemiskinan juga bervariasi, dan tentu harus dijawab dengan pendekatan yang beragam pula.

Negara mempunyai formasi dan karakter pemangsa (*predatory state*) terhadap anggaran. gaji pegawai negeri dan TNI/Polri sangat kecil, tetapi secara makro belanja gaji memakan mayoritas (sekitar 60%) anggaran negara dan daerah. Di daerah, belanja aparatur jauh lebih besar daripada belanja publik, bahkan belanja publik sekali juga masih ada yang dikonsumsi untuk biaya administrasi dan belanja aparatur. Ketimpangan distribusi anggaran juga terjadi antarsektor dalam tubuh negara. Negara bukan hanya berkarakter *predatory* tetapi juga lemah karena institusi negara



digerogoti oleh penyerobotan elite (*elite capture*) melalui politik patronase yang mengakar. *Elite capture* hadir dalam bentuk korupsi, berbagai aktor-aktor dalam negara membuat kebijakan dan kegiatan yang menguntungkan diri, maupun kebijakan yang kontradiktif dengan hak kepentingan kaum miskin maupun kelompok-kelompok marginal. *Capture*, sebaliknya, bisa juga hadir dalam bentuk tindakan individu maupun kelompok, baik aktor informal maupun formal, yang mempengaruhi peraturan maupun kebijakan pemerintah untuk kepentingan mereka (Craig Johnson dan Daniel Strat, 2001; Jean-Philippe Platteau, 2004; Mac Darrow dan Amparo Tomas, 2005; Aniruddha Dasgupta dan Victoria Beard, 2007). Penyakit *capture* di Indonesia tidak terlalu sulit ditemukan. Beberapa peneliti sudah menunjukkan penyakit *capture* itu ditingkat lokal, yang melahirkan sebutan-sebutan mafia lokal (Vedi Hadiz, 2003); *Bosisme* lokal (John T. Sidel, 2005); raja-raja kecil (HS Nordholt, 2005); maupun *shadow state* (Syarif Hidayat, 2007). *Elite capture* merupakan sebuah ancaman serius bagi desentralisasi (Remy Prud'homme, 1995, P. Bardhan dan D. Mookherjee, 2000; Larry Diamond, 2003, Jean-Paul Faguet, 2004).

Alokasi-distribusi anggaran untuk rakyat bersifat residual atau "sisa- sisa" dan ditempuh dengan pendekatan yang kurang tepat (Sri-Edi Swasono). Adanya ketimpangan anggaran, terlihat pada

angka penanggulangan kemiskinan hanya 40 triliun rupiah, dan untuk rekapitalisasi perbankan sebesar 600 triliun rupiah. Selain itu, pendekatan distribusi yang ditempuh cenderung bersifat parsial dan sedekah(Mubyarto)

Implikasi dari temuan ini yaitu pertumbuhan ekonomi kota-kota di Indonesia tidak akan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan karena ketimpangan distribusi pendapatan tinggi dan kebijakan anggaran pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota tidak berpihak pada masyarakat miskin (*pro poor*).

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengangguran

Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh langsung terhadap pengangguran, yang berarti bahwa peningkatan PAD tidak berpengaruh terhadap penurunan jumlah pengangguran. PAD berpengaruh tidak langsung terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi. Sebagaimana penelitian di beberapa negara tentang hubungan antara pendapatan pemerintah dengan pengeluaran (belanja) hubungan kausal antara pendapatan terhadap pengeluaran, pendapat yang dipelopori oleh Friedman (1978), yang menyatakan

bahwa peningkatan pajak akan menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah, selanjutnya Friedman (1982) Ram (1988), Miller and Russek (1990) di Ireland, Kollias and Makrydakis (2000) di Itali, Li (20 di China) Cairneiro et al. (2004) di Guinea-Bissau, Narayan (2005) di 9 negara Asia salah satu diantaranya Indonesia, dan sesuai dengan hipotesis pajak yaitu bila pendapatan pajak meningkat maka pengeluaran pemerintah juga meningkat dan hal tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi .

Beberapa penelitian tentang hubungan pengeluaran pemerintah dengan pengangguran dilakukan antara lain oleh : Tanzi, (1993) Basu and Morrissey (1997), Rao (1999) , Zaghini (2001), Annett (2002), Dabla-Norris and Matovu (2002) , Gupta et al. (2002, 2005), S Baldacci et al. (2004), Schade (2005), Khattry (2003), Khattry and Rao (2002), Ndikumana (2004) , Kumar et al. (2007), Baldacci et al. (2004).

Temuan empiris dalam penelitian yaitu kota-kota dengan Pendapatan Asli Daerah yang besar seperti : Surabaya, Jakarta Selatan, Bandung, dan Semarang memperlihatkan angka pengangguran yang cukup tinggi, rata-rata 11% dan mengalami peningkatan per tahun sekitar 1,4% ,peningkatan tertinggi terjadi pada Tahun 2006 -2007 angka pengangguran di kota naik hingga

sekitar 2%, sedangkan kota-kota yang memiliki PAD kecil seperti : Pasuruan , Ambon, kendari dan Jayapura juga mengalami angka peningkatan pengangguran sekitar 1,8 % per tahun.

Implikasi hasil penelitian yaitu besarnya PAD tidak mempengaruhi pengurangan pengangguran, oleh karena pemerintah kota belum menjadikan PAD salah satu sumber pendanaan bagi program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran. Pemerintah kota masih sangat tergantung pada dana-dana dari pusat dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan upaya pengurangan jumlah pengangguran kota, sehingga bilamana dana tersebut tidak tersedia atau berkurang maka program dan kegiatan akan berkurang pula. Diperlukan strategi dan kebijakan dalam menentukan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk program dan kegiatan yang bertujuan mengurangi jumlah pengangguran di daerah perkotaan.

5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemiskinan Perkotaan

Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, dengan demikian peningkatan PAD tidak menurunkan angka kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang



meneliti adanya hubungan tidak langsung antara Pendapatan dengan kemiskinan dan pengangguran melalui pengeluaran pemerintah, beberapa penelitian tentang hubungan pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan dan pengangguran dilakukan antara lain oleh: Schade, 2005; Khattry, 2003; Khattry and Rao, 2002; Ndikumana, 2004; Rao, 1999; Kumar et al. 2007; Gupta et al. 2002; 2005; Dabla-Norris and Matovu, 2002; Zaghini, 2001; Annett, 2002; Baldacci et al. 2004, Gupta et al. 2003; Basu and Morrissey, 1997; Tanzi, 1993. mengungkapkan bahwa berkurangnya pendapatan berpengaruh bagi pengurangan belanja pemerintah, Sehingga banyak negara yang menaikkan pendapatan melalui pajak agar dapat meningkatkan pengeluaran publiknya untuk program pengurangan kemiskinan.

Bukti empiris menunjukkan bahwa beberapa kota dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi seperti : Surabaya, Jakarta Selatan, Bandung, dan Semarang menunjukkan angka kemiskinan cukup tinggi rata-rata 6,5% dan meskipun mengalami penurunan dari tahun ke tahun nilainya sangat kecil, hanya berkisar 0,67% per tahun pada periode Tahun 2004 -2008. Sedangkan kota-kota dengan PAD rendah seperti : Ambon, Kendari, Pasuruan dan Jayapura memperlihatkan angka kemiskinan yang tinggi, rata-rata 13,5 % dengan tingkat penurunan setiap tahun sekitar 0,46%.

Implikasi hasil penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah masih belum menjadi sumber pendapatan yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan kota, karena pemerintah kota tidak menetapkan besarnya persentase PAD yang selayaknya disisihkan untuk dialokasikan bagi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan

6. Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan Daerah Perkotaan

Hasil estimasi Pengangguran terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan, hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian empiris antara kemiskinan dan pengangguran tersebut ditemukan di beberapa Negara, di Korea, Park (2002) menemukan hubungan yang sangat kuat antara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga naik dan ketika tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan juga ikut turun. Akan tetapi perubahan antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan tidak selalu sejalan seperti yang ditemukan pada penelitian di negara lain. Bob DeFina seperti dikutip oleh Robert DeFina (2002) berdasarkan penelitian di Amerika Serikat menemukan bahwa kemiskinan tidak memiliki korelasi yang kuat

dengan pengangguran. Defina lebih lanjut menyatakan bahwa keterkaitan antara pengangguran dan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kemiskinan itu diukur.

Temuan penelitian ini sejalan dengan data publikasi BPS, dimana hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia tidak mengikuti pola seperti yang ditemukan di Korea. Fakta yang terjadi adalah pada level nasional ketika tingkat pengangguran meningkat, tingkat kemiskinan menurun atau sebaliknya. Hubungan tersebut diperkuat oleh hubungan antara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran pada level kabupaten/kota yang memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa kabupaten/kota yang memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Hubungan antara pengangguran dan kemiskinan tidak selalu searah sesuai asumsi teori ekonomi yang ada, tetapi memiliki hubungan yang terbalik.

Fakta menunjukkan bahwa di daerah perkotaan sebagian orang yang secara sukarela menganggur karena sedang menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian/pendidikan dan belum tentu miskin karena berasal dari rumah tangga kelompok pendapatan menengah ke atas.

Secara konsep atau metodologi, tidak adanya keterkaitan langsung antara pengangguran dan kemiskinan juga disebabkan

karena angka pengangguran dihitung secara individu berdasarkan data Sakernas, sedangkan pengeluaran dihitung berdasarkan rumah tangga (BPS 2007).

Penjelasan lain adalah bahwa rumah tangga miskin hampir tidak mungkin menjadi penganggur (Oshima 1990). Pernyataan Oshima tersebut dapat dipahami mengingat di negara berkembang seperti Indonesia tidak terdapat jaminan sosial bagi penganggur, sehingga orang miskin untuk bertahan hidup harus bekerja meskipun hanya beberapa jam seminggu. Hal ini sejalan dengan pernyataan Todaro (1977) yang menyebutkan bahwa mereka yang berada dalam keadaan miskin adalah mereka yang tidak bekerja secara teratur atau terus menerus, atau yang bekerja paruh waktu saja. Frances and Streeten (1981) lebih tegas lagi menyatakan bahwa pengangguran bukanlah ukuran yang memuaskan bagi kemiskinan, karena umumnya orang yang menganggur keadaannya lebih baik, sementara umumnya orang yang benar-benar miskin tidak menganggur.

Fakta empiris dalam penelitian ini yaitu beberapa kota yang memiliki angka pengangguran yang tinggi juga memperlihatkan angka kemiskinan yang sedang misalnya : Jakarta Selatan dan

Bandung, sebaliknya kota-kota dengan jumlah pengangguran kecil, memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi

Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu pengangguran dan kemiskinan tidak berkaitan secara langsung karena bukan variabel yang komplemen, walaupun keduanya merupakan permasalahan di perkotaan namun untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berbeda. Akan tetapi melalui perencanaan program pemberdayaan ekonomi yang didisain dengan baik akan dapat menjadi solusi bagi permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di perkotaan.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih sangat terbatas, variabel dalam model hanya Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, investasi, PAD, pengangguran dan desentralisasi fiskal yang memberi pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap Kemiskinan. Terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan, seperti tata kelola ekonomi daerah dan kinerja keuangan daerah namun demikian variabel tersebut tidak termasuk dalam konstruk model penelitian ini, selain itu penelitian hanya dilakukan di wilayah perkotaan.



Menyadari keterbatasan dalam penelitian ini, maka diharapkan akan ada penelitian lain yang lebih memperluas dan menyempurnakannya dengan menggunakan variabel-variabel berpengaruh lainnya, serta penambahan kota lokasi penelitian dengan demikian data dan hasil analisa akan lebih komprehensif.

BAB VII

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis , pengujian hipotesis, dan pembahasan penelitian tentang pengaruh Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terhadap kemiskinan perkotaan melalui pertumbuhan ekonomi, PAD dan pengangguran dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Anggaran Pemberdayaan Ekonomi tidak berpengaruh langsung terhadap kemiskinan daerah perkotaan, hal ini disebabkan pemerintah kota pada umumnya belum menetapkan kebijakan khusus tentang perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat terkait besaran minimal anggaran pemberdayaan ekonomi yang seharusnya dialokasikan dalam APBD Kota untuk memenuhi target capaian penurunan kemiskinan daerah perkotaan. Selain itu, kebijakan yang terkait dengan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan program pemberdayaan ekonomi masyarakat belum didisain secara komprehensif dan sistematis yang mengarah pada keberhasilan program.
2. Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh langsung terhadap kemiskinan daerah perkotaan, hal ini menunjukkan bahwa proporsi

dana transfer dari pemerintah masih tidak cukup besar untuk belanja publik yang produktif dan dapat menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat kecil.

3. Investasi berpengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap kemiskinan daerah perkotaan, disebabkan melalui peningkatan investasi akan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan perubahan struktur ekonomi kota, sehingga dapat menurunkan kemiskinan dan pengangguran .
4. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh langsung terhadap kemiskinan daerah perkotaan, pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas dan tidak pro kemiskinan, selain itu ada faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kemiskinan. .
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh langsung terhadap kemiskinan daerah perkotaan,oleh karena belum ada kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran yang menetapkan PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang telah dirumuskan, maka saran atau rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penetapan besarnya Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam APBD Kota harus direncanakan secara tepat berdasarkan data base kemiskinan dan pengangguran yang akurat, sehingga program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi dapat mencapai target sasaran penurunan angka kemiskinan secara signifikan. Untuk itu perlu adanya dukungan kebijakan dalam bentuk perda atau peraturan lainnya yang menetapkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai program prioritas dalam APBD dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu perlu adanya pedoman pelaksanaan yang lebih terencana dan terarah yang mengurai secara rinci dan detail tentang mekanisme pelaksanaan dan pengawasan program anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat kota.
2. Agar dana desentralisasi fiskal dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah, perlu adanya penilaian dan pengawasan terhadap perencanaan pemanfaatan dana desentralisasi fiskal dalam APBD,

baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan provinsi maupun masyarakat, serta perlunya komitmen yang tinggi dari pemerintah kota dalam mengalokasikan anggaran belanja secara wajar dan proporsional, terutama dalam penetapan belanja publik dan belanja aparat.

3. Peningkatan investasi merupakan salah satu solusi bagi permasalahan kemiskinan dan pengangguran di daerah perkotaan, melalui investasi akan terbuka peluang kerja dan memungkinkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk itu upaya peningkatan investasi harus didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kota antara lain penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, karena investor akan tertarik untuk menanamkan modal hanya pada daerah perkotaan yang memiliki berbagai keunggulan, terutama ketersediaan fasilitas dan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan oleh investor.
4. Pertumbuhan ekonomi kota yang tinggi harus didukung oleh sektor-sektor yang memiliki elastisitas lapangan kerja yang tinggi pula, hal tersebut dapat dicapai dengan sinergi kebijakan yang mengakumulasi modal domestik, penanaman modal asing dan kebijakan investasi yang diarahkan pada aktifitas industri yang produktif, serta prioritas

program atau kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan usaha kecil menengah, dengan demikian akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran daerah perkotaan.

5. Pendapatan Asli Daerah seharusnya menjadi salah satu sumber pembiayaan anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat, untuk itu perlu didukung kebijakan pemerintah kota yang menetapkan besaran persentase PAD yang dialokasikan untuk anggaran tersebut, dengan demikian akan selalu tersedia dana bagi program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2004. *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory*. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu. Bengkulu. 4-5 Oktober 2004.
- Abustan , Mahyuddin, *Analisis Vector Auto Regressive (VAR) Terhadap Korelasi Antara Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan, Tahun 2007*.
- Adelman, I. and Morris, C. T. (1971) *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*, Stanford University Press, Stanford, CA.
- Agrawal.Prakash,(2001), *Economic Growth and Poverty Reduction: Eviden from Kazakhstan*, Journal of Development Economic
- Agell, J. and P. Lundborg (1999), Survey Evidence on Wage Rigidity and Unemployment: Sweden in the 1990s, Working Paper 1999:2 (IFAU, Uppsala).
- Aghion, P. and P. Howitt (1994), Growth and Unemployment, Review of Economic Studies 61.
- Agénor, P-R. (2005) The Macroeconomics of Poverty Reduction, The Manchester School 73(4), 369-434.
- Agenor, P.R. (2004), Macroeconomic Adjustment and the Poor: Analytical Issues and Cross Country Evidence, Journal of Economic Surveys, 18(3), 351-408.

- Aghion, P. and P. Bolton (1997), A Theory of Trickle-Down Growth and Development, *The Review of Economic Studies*, 64 (2): 151-172.
- Ahluwalia, M. S. (1974) *Income Inequality: Some Dimensions of the Problem*, in Hollis Chenery et al., *Redistribution with Growth*, Oxford University Press, Oxford.
- Ames, B., W. Brown, S. Devarajan and A. Izquierdo (2001) *Macroeconomic Policy and Poverty Reduction*, International Monetary Fund and the World Bank: Washington DC.
- Anand, S. and Kanbur, S. M. R (1984) "The Kuznets Process and The Inequality development relationship", *Journal of Development Economics*, 40, 25-52
- Allen, Richard dan Tommasi, Daniel, 2001. *Managing a Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*. OECD Paris.
- Aaberge, Rolf & Audun Langorgen. 1997. Fiscal and Spending Behavior of Local Government: An empirical analysis based on Norwegian data. Statistics. Norway, Discussion paper no. 196.
- Anderson, W., Wallace, M.S. and Warner, J. (1986), "Government spending and taxation: what causes what?", *Southern Economic Journal*, Vol. 52, pp. 630-9.
- Atkinson, A. B. (1970) "On the measurement of Inequality" *Journal of Economic Theory*, Vol 2, pp 244-263
- Aziz, Mariam Abdul, Muzafar Shah Habubullah, W.N.W. Aman-Saini, & M. Azali. 2000. The causal relationship between tax revenues and Government spending in Malaysia. University Putra Malaysia, working Paper

- Azis, Iwan J. 2002. What Would Have Happened in Indonesia if Different Economic Policies had been Implemented When the Crisis Started? *The Asian Economic Papers* 1 (2). MIT Press.
- . 2006. A Drastic Reduction of Fuel Subsidies Confuses Ends and Means. *ASEAN Economic Bulletin*. April. ISEAS, Singapore.
- Bahl, R.W., Linn, J., 1992. Urban public finance in developing countries. Oxford University Press, New York.
- Bahl, R.W., Wallich, C., 1992. Intergovernmental fiscal relations in China. Working Papers, Policy Research Department, World Bank, Washington D.C.
- BAPPENAS. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Propinsi dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah*. Direktorat Jenderal Pengembangan Otonomi Daerah. Jakarta.
- BPS Kota Ambon. 2005. Pendapatan Regional Kota Ambon. Kerjasama Pemerintah Kota Ambon dengan BPS. Ambon.
- BPS Kota Ambon. 2008. Pendapatan Regional Kota Ambon Menurut Penggunaan. Kerjasama Pemerintah Kota Ambon dengan BPS. Ambon.
- BPS Kota Balikpapan. 2008. Indikator Ekonomi Kota Balikpapan. BPS. Balikpapan.
- BPS Kota Balikpapan. 2007. Profil Kependudukan Kota Balikpapan. BPS. Balikpapan.
- BPS Kota Balikpapan. 2007. Profil Kependudukan Kota Balikpapan. BPS. Balikpapan.
- BPS Kota Balikpapan. 2007. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha. BPS. Balikpapan.

- Azis, Iwan J. 2002. What Would Have Happened in Indonesia if Different Economic Policies had been Implemented When the Crisis Started? *The Asian Economic Papers* 1 (2). MIT Press.
- . 2006. A Drastic Reduction of Fuel Subsidies Confuses Ends and Means. *ASEAN Economic Bulletin*. April. ISEAS, Singapore.
- Bahl, R.W., Linn, J., 1992. Urban public finance in developing countries. Oxford University Press, New York.
- Bahl, R.W., Wallich, C., 1992. Intergovernmental fiscal relations in China. Working Papers, Policy Research Department, World Bank, Washington D.C.
- BAPPENAS. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Propinsi dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah*. Direktorat Jenderal Pengembangan Otonomi Daerah. Jakarta.
- BPS Kota Ambon. 2005. Pendapatan Regional Kota Ambon. Kerjasama Pemerintah Kota Ambon dengan BPS. Ambon.
- BPS Kota Ambon. 2008. Pendapatan Regional Kota Ambon Menurut Penggunaan. Kerjasama Pemerintah Kota Ambon dengan BPS. Ambon.
- BPS Kota Balikpapan. 2008. Indikator Ekonomi Kota Balikpapan. BPS. Balikpapan.
- BPS Kota Balikpapan. 2007. Profil Kependudukan Kota Balikpapan. BPS. Balikpapan.
- BPS Kota Balikpapan. 2007. Profil Kependudukan Kota Balikpapan. BPS. Balikpapan.
- BPS Kota Balikpapan. 2007. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha. BPS. Balikpapan.

- BPS Kota Balikpapan. 2007. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Penggunaan. BPS. Balikpapan.
- BPS Kota Bandung. 2008. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandung. Kerjasama BAPPEDA Kota Bandung dengan BPS. Bandung.
- BAPPEDA Kota Bekasi. 2007. Rencana Umum Pembangunan Ekonomi (RUPE) Tahap 1. BAPPEDA Kota Bekasi. Bekasi
- BPS Kota Bekasi. 2008. Kota Bekasi Dalam Angka 2007. BPS Kota Bekasi. Bekasi.
- BPS Kota Bogor. 2008. Kota Bogor Dalam Angka 2008. Kerjasama BAPPEDA Kota Bogor dengan BPS. Bogor.
- BPS Kota Cimahi. 2008. Kota Cimahi Dalam Angka 2008. BPS. Cimahi.
- BPS Kota Cimahi. 2007. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cimahi. BPS. Cimahi.
- BPS Kota Denpasar. 2007. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Denpasar. Kerjasama BPS & BAPPEDA Kota Denpasar.
- BAPPEDA Kota Denpasar. 2007. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Penyusunan Potensi & Produk Unggulan Daerah Kota Denpasar). BAPPEDA. Denpasar.
- BAPPEDA Kota Depok 2009. Kota Depok Dalam Angka 2008. BAPPEDA. Depok.
- BAPPEDA Kota Gorontalo. 2008. Profil Kota Gorontalo. BAPPEDA. Gorontalo.
- BAPPEDA Kota Gorontalo. 2008. Produk Domestik Regional Bruto Kota Gorontalo. Kerjasama BAPPEDA & BPS Kota Gorontalo. Gorontalo.
- BPS Kotamadya Jakarta Pusat. 2007. Pendapatan Regional Jakarta Pusat Tahun 2003- 2007. BPS. Kotamadya Jakarta Pusat.



- BPS Kota Administratif Jakarta Selatan. 2007. Pendapatan Regional Jakarta Selatan Tahun 2003- 2007. BPS. Kota Administratif Jakarta Selatan.
- BPS Kota Administratif Jakarta Selatan. 2008. Jakarta Selatan Dalam Angka 2007. BPS. Kota Administratif Jakarta Selatan.
- BPS Kota Kendari. 2007. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kendari. BPS. Kendari.
- BAPPEDA Kota Makassar. 2009. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar 2008. Kerjasama BAPPEDA & BPS. Makassar
- .BAPPEDA Kota Makassar. 2009. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2008. Kerjasama BAPPEDA & BPS. Makassar.
- BAPPEDA Kota Makassar. 2009. Buku Saku Kota Makassar. BAPPEDA. Makassar.
- BPS Kota Pasuruan. 2007. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasuruan. BPS. Kabupaten Pasuruan.
- BPS Kota Palembang. 2008. Produk Domestik Regional Bruto Analisis Ekonomi Daerah Kota Palembang Tahun 2007. BPS. Kota Palembang.
- BPS Kota Pontianak. 2007. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Sektor Kota Pontianak 2003 -2007. BPS. Kota Pontianak.
- BPS Kota Semarang. 2007. Indikator Ekonomi Kota Semarang Tahun 2007. BPS. Kota Semarang.
- BPS Kota Semarang. 2007. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Semarang Tahun 2007. BPS. Kota Semarang.
- BAPPEDA Kota Surabaya. 2008. Analisis Ekonomi Daerah Kota Surabaya Tahun 2008. BAPPEDA. Kota Surabaya.

- BAPPEDA Kota Surabaya. 2008. Program Penataan Atau Pemberdayaan PKL, Program Pengembangan Koperasi UMKM & Investasi. BAPPEDA. Kota Surabaya.
- BAPPEDA Kota Surabaya. 2009. Paparan Urban Framing Tahun 2010. BAPPEDA. Kota Surabaya.
- BPS Kota Surabaya. 2007. Produk Domestik Regional Bruto Kota Surabaya Tahun 2006. BPS. Kota Surabaya.
- BAPPEDA Kota Surakarta. 2007. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Semarang Tahun 2006. BAPPEDA. Kota Surakarta.
- BAPPEDA Kota Yogyakarta. 2008. Materi Sosialisasi Dana Stimulan Pemberdayaan Masyarakat (PMK). BAPPEDA. Kota Yogyakarta.
- BAPPEDA Kota Yogyakarta. 2000. Penyusunan Kawasan Strategis Ekonomi Yogyakarta Selatan. BAPPEDA. Kota Yogyakarta.
- BPS Nasional . 2008, Data Kemiskinan Kota dan Kabupaten di Indonesia
- BPS. Nasional 2008. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi Di Indonesia Menurut Penggunaan 2003-2007. BPS. Jakarta.Indonesia.
- BPS. Nasional 2008. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Indonesia 2003-2007. BPS. Jakarta.Indonesia.
- BPS. Nasional 2008. Indikator Ekonomi 2009. BPS. Jakarta.Indonesia.
- BPS Nasional 2009, Data Kemiskinan Indonesia, Jakarta Indonesia
- BPS. Nasional 2007. Statistik Pengangguran 2001-2006. BPS. Jakarta.Indonesia.
- Banerjee, A., and E. Duflo (2007), The Economic Lives of the Poor, The Journal of Economic Perspectives, 21 (1): 141-167.
- Basu, S. and S. Mallick (2007) Is Growth Alone Sufficient to Reduce Poverty? In Search of the Trickle Down Effect in Rural India

- Ben-David, D. and Papell, D. (1995), "The great wars, the great crash and steady state growth: some new evidence about an old stylized fact", *Journal of Monetary Economics*, Vol. 36, pp. 453-75.
- Bigsten, A., Levin and Helsinky, Growth, Income Distribution and Poverty , 2001 *Journal of Economic Development*, Vol.17.
- Bird, R.M., Wallich, C., 1993. Fiscal decentralization and intergovernmental relations in Transition economies: Towards a systematic framework of analysis. Country Economics Department Working Paper, World Bank, Washington D.C.
- Bird, R.M., 1993. Threading the fiscal labyrinth: Some issues in fiscal decentralization. *National Tax Journal* XLVI (2), 207-227.
- Bhagwati, J.N. (1988) "*Poverty and Public Policy.*" *World Development* 16(5):539-654.
- Bourguignon, F. (2002) "*The growth elasticity of poverty reduction: Explaining Heterogeneity across countries and time periods.*" Presented at the conference Growth and Inequality: Issues and Policy Implications organized by CESifo in Munich, Germany
- Blackley, P. 1986. Causality between revenues and expenditures of the size of Federal Budget. *Public Finance quarterly* 14: 139-156.
- Blackburn, K. and N. Bose (2003), A model of trickle-down through learning, *Journal of Economic Dynamics and Control*, 27 (3): 445-466.
- Blanchard, O. (1999), European Unemployment: The Role of Shocks and Institutions (Baffi Lecture, Rome).
- Blanchard, O. and L. Summers (1986), Hysteresis and the European Unemployment Problem, in: S. Fischer (ed.), *NBER Macroeconomics Annual* (MIT Press, Cambridge).

- Blanchard, O. and J. Wolfers (2000), The Role of Shocks and Institutions in the Rise of European Unemployment: The Aggregate Evidence, *Economic Journal* 110.
- Bradford, D. & W. Oates. The analysis of revenue sharing in a new Approach to collective fiscal decisions. *Quarterly Journal of Economics* 83 (3): & . 1971b. Towards a predictive theory of intergovernmental grant. *American Economic Review* 61 (2): 440-448.
- Bretton Woods Update. 2001. Macro Policy and Poverty Reduction Reviewed, (25), October/November. Bretton Woods Project.
- Budiono, 1985. *Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4*. BPFE. Yogyakarta.
- Cashell, Brian W, (2003) *Economic Growth, Inflation, and Unemployment: Limits to Economic Policy*.
- Calmfors, L. (1998), Macroeconomic Policy, Wage Setting and Employment—What Difference Does the EMU Make?, *Oxford Review of Economic Policy* 3.
- Calmfors, L. and J. Driffill (1988), Bargaining Structure, Corporatism, and Macroeconomic Performance, *Economic Policy* 6.
- Chang, Tsangyao & Yuan Hong Ho. 2002. Tax or spend, what cause what: Taiwan's experience. *International Journal of Business and Economics* 1 (2): 157-165.
- Cashin, Paul., P. Mauro, C. Patillo., R. Sahay (2001). "Macroeconomic Policies and Poverty Reduction: Stylized Facts and an Overview of Research," *IMF Working Paper*, WP/01/135.

- Cheng, Benjamin S. 1999. Causality between taxes and expenditure: Evidence From Latin American Countries. *Journal of Economics and Finance* 23 (2): 184-192.
- Chen, S. and Ravallion, M. (2000) "How did the World's Poor Fare in the 1990's", Policy Research Working Paper No. 2409, World Bank, Washington D.C.
- Christiaensen, L, Demery, L. and Paternostro, S. (2002) "Reforms, Economic Growth and Poverty Reduction in Africa: Messages from the 1990s", *Mimeographed*, World Bank: Washington D.C.
- Carneiro, F., Faria, J.R. and Barry, B.S. (2004), "Government revenues and expenditures in Guinea-Bissau: causality and cointegration", Africa Region Working Paper Series No. 65.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol 08 No 01. February 2007. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Davey, K.J, 1988. "Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga." Jakarta: UI-Press.
- Dagdeviren, H., Van der Hoeven, R., and Weeks J. (2002), Poverty Reduction with Growth and Redistribution, *Development and Change*, June, 33 (3): 383-413.
- Datt, G., and M. Ravallion (2002), Is India's Economic Growth Leaving the Poor Behind? *The Journal of Economic Perspectives*, 16 (3): 89-108.
- Datt, G. and M. Ravallion (1998), Why Have Some Indian States Done Better Than Others at Reducing Rural Poverty?, *Economica*, 65 (257): 17-38.15

- Datt, G. and M. Ravallion (1997), *Macroeconomic Crises and Poverty Monitoring: A Case Study for India*, *Review of Development Economics*, June 1997, 1 (2): 135-152
- Daveri, F. and G. Tabellini (2000), *Unemployment, Growth and Taxation in Industrial Countries*, *Economic Policy* 15.
- Devas, Nick et al, 1989. "Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia." Jakarta: UI-Press.
- Deller, Steven, Craig Maher, & Victor Lledo. 2002. *Wtsconsinlocal government, State share revenue and the illusive flypaper effect*. University of Wisconsin-Madison, workingpaper
- Deller, Steven, Craig Maher. 2005. *Categorical Municipal Expenditures witha focus on The Flypaper Effect*. Public BudgetingIFall.
- Deddy Rustiono, *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah, Thesis, Tahun 2006*.
- Deiningner, K. and Squire, L. (1996) *Measuring income inequality: a new data base*, *World Bank Economic Review* 10(3), pp565-591
- Davoodi, H., Zou, H., 1997. *Fiscal decentralization and economic growth: A cross- county study*. forthcoming, *Journal of Urban Economics*.
- Departemen Keuangan RI. *Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan PengelolaanKeuangan Daerah 2009*..
- Dollar, D., and A. Kraay (2000) "Growth is Good for the Poor." *World Bank, Washington, D.C. Draft*.
- Dritsakis, Nikolaos dan Adamopoulos, *A Causal Relationship Between Government Spending and Economic Development an Empirical Examination of The Greek Economic*

- Edmund A, N. Aslanidis, F. Nixson and B. Walters, *Economic Growth and Poverty Alleviation: A reconsideration of Dollar Kraay*, University of Manchester, 2002.
- Engle, R.F. and Granger, C.W.J. (1987), "Cointegration and error correction representation: estimation and testing", *Econometrica*, Vol. 55, pp. 251-76.
- Ediharsi; Weny Darta Taihr; Husna Rosa; dm Syahmdin. 1998. Praktek Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* (Vol. 6. No.1): 69-1 13.
- Fasano, Ugo & Qing Wang. 2002. Testing the relationship between government Spending and revenue: Evidence from GCC countries. *IMFworkingPaper No. WP/02/201*.
- Firdausy, Carunia Mulya, Haryo Aswicahyono dan Lepi Tarmidi, 2002. "Sources Of Indonesian Economic Growth." *Indonesian Country Studies*, Worldbank Jakarta Office.
- Francis A, Joseph A. Ayee, et al (2003), *Fiscal Decentralisation and Sub-National Government Finance in Relation to Infrastructure and Service Provision in Ghana*.
- Fields, G. S. (1989) "Changes in Poverty and Inequality in the Developing Countries", mimeographed paper.
- Friedman, M. (1978), "The limitations of tax limitations", *Policy Review*, Summer.
- Friedmann (1992): *Empowerment: the Politics of Alternative Development*. Cambridge Mass: Blackwell Publisher.
- Foster, J, Greer, J, and Thorbecke, E. (1984) "A Class of Decomposable Poverty Measures", *Econometrica*, 52, no. 3, 761-6
- Fozzard, Adrian. 2001. The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their

implications for pro-poor budgeting. *Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). Working Paper*

Fuess, S.M., Hou, J.W. and Millea, M. (2003), "Tax or spend, what causes what? Reconsidering Taiwan's experience", *International Journal of Business and Economics*, Vol. 2 No. 2, pp. 109-19.

Hafiz M, Axèle G,H. Jalilian, et.al, *Regionalisation Foreign Direct Investment an Poverty Reduction: The Case of ASEAN*

Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25*.

Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.

Hamzah, Muhammad Zilal. 2005, Does Block Grant Generates Economic Growth on Province Level In Indonesia After The Implementation of Fiscal Desentralization Policy

Hamzah Ardi (2007), *Analisa Kinerja Keuangan Terhadap pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur)*

Hyun H. Son, Kakwani.N *Economic Growth and Poverty Reduction : Initial Condition Matter* Department of Economics, Macquarie University, Sydney 2109, Australia

- Jalilian, H., and C. Kirkpatrick (2002), Financial development and poverty reduction in developing countries, *International Journal of Finance & Economics*, 7 (2): 97-108.
- Joulfaian, D. & R. Mookerjee. 1990. *The interporal relationship between State and local government revenues and expenditures: Evidence from OECD countries*. *PublicFinance*45: 109-117.
- Kakwani, N (2000), "Growth and Poverty Reduction: An Empirical Analysis", *Asian Development Review*, Vol 18, Number 2, pp75-84
- Kakwani, N and Pernia, E. (2000) "What is Pro-poor Growth" *Asian Development Review*. Vol. 16: 1-16
- Kuznets, S. (1955) "Economic Growth and Income Inequality", *American Economic Review*, vol. XLV, 1-28.
- Kollias, C. and Makrydakis, S. (2000), "Tax and spend or spend and tax? Empirical evidence from Greece, Spain, Portugal and Ireland", *Applied Economics*, Vol. 32, pp. 533-46
- Keefer, Philip and Khemani, Democracy, Public Expenditures, and the Poor, 2003, *Word Bank Policy Research Working Paper 3164*.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Kuncoro, M. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Penerbit Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Layard, R., S. Nickell and R. Jackman (1991), *Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market* (Oxford University Press, Oxford).
- L. Calmfors and B. Holmlund, *Unemployment and Economic Growth: a Partial Survey*



- Li, X. (2001), "Government Revenue, Government Expenditure and Temporal Causality: Evidence from China", *Applied Economics*, Vol. 33, pp. 485-97.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, Economic Development and Cultural Change*, Chicago. <http://www3.nccu.edu.pdf> diakses 1 April 2009.
- Lorenzo Boetti, Massimiliano P(2001), *Fiscal Decentralization and Spending Efficiency of Local Governments An Empirical Investigation on a Sample of Italian Municipalities*.
- Khan, M.S., and M.S. Kumar (1997), *Public and Private Investment and the Growth Process in Developing Countries*, *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 59 (1), 69-88.
- Mankiw, N. G. 2000. *Macro Economics*, 4th Ed ,Worth Publishers, New York.
- Marlow, M. and Manage, N. (1986), "The causal relation between federal expenditure and receipts", *Southern Economic Journal*, Vol. 52, pp. 617-29.
- Meltzer, A.H. and Richard, S.F. (1981), "A rational theory of the size of the government", *Journal of Political Economy*, Vol. 89, pp. 914-27.
- Miller, S. and Russek, F. (1990), "Cointegration and Error Correction models: The Temporal causality between government taxes and spending", *Southern Economic Journal*, Vol. 57, pp. 221-9.
- M.Imamunah, R.Akbar,(2008) *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Universitas Gadjah Mada.

- Michael. K, Carl A, B. Hadjimichael, Foreign Direct Investment and Poverty Reduction, 2004
- Maldonado, J.H. 2004. Relationships Among Poverty, Financial Services, Human Capital, Risk Coping, And Natural Resources: Evidence From El Salvador And Bolivia, Dissertation, Ohio State University. Diakses dari <http://www.osu.edu>
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mubyarto, 2003. Tantangan Ilmu Ekonomi dalam Menanggulangi Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Rakyat. Edisi Maret 2003 diakses dari <http://www.ekonomirakyat>
- Narayan, P. (2005), "The government revenue and government expenditure nexus: empirical evidence from nine Asian countries", Journal of Asian Economics, Vol. 15, pp. 1203-16.
- Narayan, P.K. (2003), "The economic impact of the IMF recommended VAT policy for the Fiji economy: evidence from a computable general equilibrium model review", Urban and Regional Development Studies, Vol. 15, pp. 226-37.
- Narayan, P.K. and Narayan, S. (2003), "The sustainability of Fiji's budget deficit: an econometric analysis", Pacific Economic Bulletin, Vol. 18, pp. 77-90. Government revenue and expenditure 157
- Neelesh G, Paresh K.N, Arti Prasad, An Empirical investigation of the Relationship Between Government Revenue and Expenditure

- N. KING.D and YUE MA, *Decentralization and macroeconomic performance*,
Department of Economics, University of Stirling, FK9 4L A,
Scotland, UK, 1998
- Oates, Wallace E. 1995. Comment on "Conflict and Dilemmas of
 Decentralization" by Rudolf Holmes. *The World Bank
 Research Observer*. Hal: 351-353
- Oates,W.E., 1993. Fiscal decentralization and economic development.
National Tax Journal XLVI (2), 237-243.
- Paci.R, Pigliaru.F and Pugno.M, *Disparities in Economic Growth and
 Unemployment Across The Europe Regions; a Sectoral
 Perspective*
- Projono, O.S dan Pranarka, A.M.W (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan
 dan implementasi*.CSIS; Jakarta h.: 269: 1-4.
- Ravallion, M., and Datt, G. (2002) Why has economic growth been more pro-
 poor in some States of India than others? *Journal of
 Development Economics*, August, 68 (2): 381-400.
- Rizwanul Islam,2004 *The Nexus of Economic Growth, Employment and
 Poverty Reduction: An Empirical Analysis.*
- Roemer, M and M. K.Gugerty, 1997, *Does Economic Growth Reduce
 Poverty*, Harvard Institute For International Development.
- Richard P,Hallsworth, *The Macroeconomics of Poverty Reduction*
International Macroeconomics and Development
Economics Centre for Growth and Business Cycle
Research University of Manchester, United Kingdom
- Sadono, Sukirno, 2001, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan
 Kebijakan* Penerbit Media Global Edukasi. Jakarta.

- Samuels, David. 2000. Fiscal Horizontal Accountability? Toward Theory of Budgetary "Checks and Balances" in presidential systems. University of Minnesota, Working paper presented at the Conference on Horizontal Accountability in New Democracies, University of Notre Dame, May.
- Samuelson, Paul. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*, Edisi 17 (terjemahan). Penerbit Media Global Edukasi. Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta
- Setiyawati, Anis dan Hamzah, Ardi. 2007 Analisa PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, kemiskinan, dan Pengangguran.
- Sumidiningrat, Gunawan (1999). Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Gramedia; Jakarta.
- Shenggen F, Peter H, Sukhadeo T, Linkages between Government Spending, Growth, and Poverty in Rural India
- Squire, L. (1993), Fighting Poverty, *American Economic Review*, 83 (2): 377-82. Stiglitz, J.E. (2004) Globalization and growth in emerging markets, *Journal of Policy Modeling*, 26 (4): 465-484.
- Sugiarto; Dergibson Siagian; Lasmono Tri Sunaryanto; Deny S. Oetomo. 2001. Teknik Sampling. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Tao Zhang , Heng-fu Zou, 2001, Fiscal Decentralization, Public Spending, and Economic Growth in China, *Economic Development Journal*
- Tambunan T. 2001. *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Tarumingkeng R.C. (editor) 2001. *Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi: Sebuah Kajian Pemodelan*, Program Pasca Sarjana IPB Bogor.
- Sachs, J.D and Larrain, B.F. 1993. *Macroeconomics In The Global Economy*, Prentice-Hall, Inc, New Jersey.
- Thorbecke, E., et al. 1992. *Adjustment and Equity in Indonesia*. Development Center Studies. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.
- World Bank. 2001. *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. Oxford University Press, New York.
- World Bank. 2001. *Indonesia, Constructing A New Strategy for Poverty Reduction*. World Bank Office, Jakarta.
- Wegner, 2004 "Decentralisation and Poverty In Developing Countries: Exploring The Impact." OECD Development Centre Working Paper No. 236
- Yustikasari, D.Y., 2007, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Makalah, disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X, UNHAS Makasar.
- Zheng, B. (1997). Aggregate poverty measures, *Journal of Economic Surveys* 11, 123

Tabel 10. ANGGARAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM APBD KOTA
(Rp)

NO.	KOTA	2004	2005	2006	2007	2008	% rata-rata dr nilai APBD
1	PALEMBANG	300,000,000	350,000,000	500,000,000	650,000,000	1,000,000,000	0.0092
2	BOGOR	550,000,000	750,000,000	1,000,000,000	1,150,000,000	1,350,000,000	0.0093
3	SUKABUMI	250,000,000	275,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	0.0078
4	BANDUNG	1,500,000,000	2,000,000,000	4,500,000,000	5,000,000,000	22,000,000,000	1.0862
5	BEKASI	200,000,000	250,000,000	1,300,000,000	1,500,000,000	2,250,000,000	0.0274
6	DEPOK	300,000,000	500,000,000	500,000,000	750,000,000	1,000,000,000	0.0086
7	CIMAHI	150,000,000	250,000,000	300,000,000	500,000,000	300,000,000	0.0073
8	SURAKARTA	1,000,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	2,000,000,000	0.0192
9	SEMARANG	700,000,000	500,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000	1,000,000,000	0.0154
10	YOGYAKARTA	1,000,000,000	1,500,000,000	2,000,000,000	2,500,000,000	4,500,000,000	0.5213
11	MALANG	500,000,000	500,000,000	500,000,000	1,250,000,000	700,000,000	0.0967
12	PASURUAN	100,000,000	100,000,000	200,000,000	250,000,000	300,000,000	0.0049
13	SURABAYA	2,500,000,000	2,500,000,000	3,500,000,000	2,000,000,000	4,000,000,000	0.0684
14	DENPASAR	750,000,000	1,000,000,000	1,250,000,000	1,500,000,000	2,500,000,000	0.0337
15	BALIKPAPAN	500,000,000	750,000,000	750,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0.0063
16	SAMARINDA	300,000,000	500,000,000	750,000,000	750,000,000	500,000,000	0.0042
17	MANADO	300,000,000	500,000,000	500,000,000	750,000,000	1,000,000,000	0.0044
18	MAKASSAR	750,000,000	500,000,000	500,000,000	300,000,000	1,500,000,000	0.0048
19	PARE-PARE	150,000,000	200,000,000	200,000,000	300,000,000	500,000,000	0.0068
20	KENDARI	250,000,000	300,000,000	500,000,000	750,000,000	750,000,000	0.0065
21	GORONTALO	300,000,000	750,000,000	750,000,000	1,000,000	750,000,000	0.0075
22	AMBON	100,000,000	200,000,000	250,000,000	250,000,000	300,000,000	0.0034
23	JAYAPURA	150,000,000	300,000,000	500,000,000	500,000,000	750,000,000	0.0032
24	JAKARTA SELATAN	1,250,000,000	1,500,000,000	2,500,000,000	3,000,000,000	3,500,000,000	0.0494

Sumber : APBD Kota
, Bappeda dan Bappeko



Tabel 11. INVESTASI
(MILYAR)

NO	KOTA	2004	2005	2006	2007	2008
1	PALEMBANG	507,328	651,131	776,900	855,129	1,204,783
2	BOGOR	361,974	487,563	620,534	738,125	819,206
3	SUKABUMI	188,346	235,317	279,112	307,493	483,762
4	BANDUNG	936,263	1,257,189	1,128,676	1,384,615	1,461,663
5	BEKASI	94,758	147,373	261,134	339,817	412,546
6	DEPOK	274,156	318,826	396,719	463,509	531,674
7	CIMAHI	90,518	197,611	238,136	279,685	337,495
8	SURAKARTA	143,504	276,837	394,513	407,119	536,187
9	SEMARANG	186,490	850,276	543,471	489,275	613,219
10	YOGYAKARTA	162,105	291,686	472,308	570,684	696,754
11	MALANG	148,528	166,752	192,357	234,183	261,548
12	PASURUAN	61,143	187,491	236,536	270,211	243,154
13	SURABAYA	948,376	524,617	961,933	138,283	1,269,741
14	DENPASAR	133,213	146,184	107,216	119,104	133,238
15	BALIKPAPAN	205,514	376,903	244,712	249,837	264,102
16	SAMARINDA	90,016	139,535	172,151	108,761	137,519
17	MANADO	52,384	124,209	146,628	125,137	149,776
18	MAKASSAR	369,510	473,710	680,652	812,674	1,168,213
19	PARE-PARE	47,286	69,315	61,461	76,131	81,607
20	KENDARI	50,183	41,697	59,356	57,208	62,145
21	GORONTALO	37,914	46,992	83,246	96,781	142,569
22	AMBON	29,382	24,166	32,535	40,018	45,782
23	JAYAPURA	37,163	41,506	31,814	39,331	43,806
24	JAKARTA SELATAN	1,649,753	1,812,266	1,560,472	2,363,287	2,764,837

Tabel 12. PAD KOTA
(000, Rp)

NO	KOTA	2004	2005	2006	2007	2008
1	PALEMBANG	57,496,301	61,586,179	78,714,190	89,676,047	147,456,158
2	BOGOR	41,454,150	49,431,543	66,707,298	73,371,081	78,509,112
3	SUKABUMI	25,523,466	26,949,815	36,577,623	40,955,438	43,847,986
4	BANDUNG	213,126,133	222,909,942	225,596,438	233,770,032	275,630,504
5	BEKASI	85,882,558	96,432,522	126,066,840	138,871,746	162,881,080
6	DEPOK	28,854,261	54,467,014	64,919,304	67,218,328	72,079,619
7	CIMAHI	30,105,857	39,336,768	48,242,910	50,325,671	54,658,922
8	SURAKARTA	154,815,684	159,782,969	166,086,576	178,585,750	186,344,700
9	SEMARANG	143,157,296	155,824,657	189,773,078	224,822,680	231,740,209
10	YOGYAKARTA	168,621,563	179,911,419	189,196,470	196,419,456	201,374,387
11	MALANG	42,094,973	50,007,305	58,740,205	62,311,314	70,091,417
12	PASURUAN	15,754,177	13,210,249	14,352,838	20,757,930	24,320,473
13	SURABAYA	348,310,014	417,377,015	496,190,006	538,369,935	583,483,623
14	DENPASAR	88,548,230	90,827,789	116,302,937	126,148,262	119,715,952
15	BALIKPAPAN	59,606,222	67,998,080	70,121,115	99,258,578	73,577,900
16	SAMARINDA	55,188,762	65,791,308	71,076,774	81,346,119	100,006,370
17	MANADO	30,392,110	34,576,450	35,631,695	46,516,790	52,250,010
18	MAKASSAR	85,704,918	99,795,457	120,904,263	173,145,595	158,131,371
19	PARE-PARE	15,205,651	15,423,289	18,880,254	23,820,086	28,655,900
20	KENDARI	13,893,277	14,112,546	15,974,426	20,125,439	20,990,000
21	GORONTALO	12,107,064	16,589,990	22,448,628	26,229,723	48,050,000
22	AMBON	8,783,407	11,041,137	14,581,368	18,162,140	15,768,940
23	JAYAPURA	14,623,558	16,575,167	21,121,319	22,401,618	24,500,000
24	JAKARTA SELATAN	176,851,206	289,742,737	207,969,627	263,829,405	291,381,542

Tabel 13. PERTUMBUHAN EKONOMI PDRB

NO	KOTA	2004		2005		2006		2007		2008	
		PDRB (M)	Pert. (%)								
1	PALEMBANG	11.488,47	5,44	12.226,26	6,42	13.087,90	7,05	13.998,09	6,95	14.992,48	7,10
2	BOGOR	3.168,19	6,07	3.361,44	6,10	3.567,23	6,12	3.782,27	6,03	4.012,74	6,09
3	SUKABUMI	1.267,58	5,39	1.340,71	5,77	1.420,51	5,95	1.509,02	6,23	1.607,22	6,51
4	BANDUNG	18.490,72	7,34	19.874,81	7,49	21.370,70	7,53	23.043,10	7,83	24.941,52	8,24
5	BEKASI	10.545,46	5,25	11.112,52	5,38	11.739,95	5,65	12.453,01	6,07	13.255,15	6,44
6	DEPOK	4.169,76	6,26	4.440,88	6,50	4.750,03	6,96	5.066,13	6,65	5.418,25	6,95
7	CIMAHI	4.694,21	4,18	4.898,15	4,48	5.121,60	4,56	5.386,66	4,82	5.638,56	5,03
8	SURAKARTA	3.468,28	6,11	3.669,37	5,80	3.858,17	5,15	4.067,53	5,43	4.304,29	5,82
9	SEMARANG	14.793,05	4,04	15.402,67	4,12	16.194,26	5,14	17.118,71	5,71	18.142,64	5,98
10	YOGYAKARTA	3.993,84	4,76	4.195,39	5,05	4.397,85	4,83	4.572,50	3,97	4.776,40	4,46
11	MALANG	9.063,14	4,36	9.593,86	5,86	10.136,32	5,65	10.745,07	6,01	11.412,77	6,21
12	PASURUAN	765,63	4,67	809,58	5,74	856,75	5,83	909,17	6,12	966,21	6,27
13	SURABAYA	53.125,90	4,29	56.312,93	6	59.877,99	6,33	63.677,39	6,35	67.695,82	6,31
14	DENPASAR	3.717,10	5,31	3.933,89	5,83	4.171,80	6,05	4.417,09	5,88	4.708,52	6,60
15	BALIKPAPAN	11.528,66	9,87	12.228,69	5,15	12.621,68	7,52	13.033,07	7,93	13.466,78	10,22
16	SAMARINDA	7.890,75	9,52	8.601,03	9,00	9.293,07	8,05	9.841,37	5,90	10.090,41	6,53
17	MANADO	3.466,87	4,91	3.656,15	5,46	3.871,65	5,89	4.130,05	6,67	4.410,98	6,80
18	MAKASSAR	8.882,25	8,6	9.791,71	10,24	10.492,54	7,16	11.341,85	8,09	12.261,54	8,11
19	PARE-PARE	472,92	5,01	502,37	6,23	532,39	5,90	569,46	6,96	609,22	6,98
20	KENDARI	1.066,99	6,63	1.164,97	9,18	1.269,26	8,95	1.372,82	8,16	1.475,51	7,48
21	GORONTALO	371,66	5,78	395,25	6,31	421,85	6,73	451,62	7,06	484,89	7,36
22	AMBON	1.189,66	5,63	1.257,86	5,73	1.336,06	6,22	1.421,96	6,43	1.511,62	6,31
23	JAYAPURA	1.445,95	8,40	1.578,26	9,15	1.713,48	8,57	1.932,15	12,76	2.186,55	13,17
24	JAKARTA SELAT	58.900,11	5,58	62.191,04	5,59	65.772,30	5,76	69.896,63	6,27	74.377,05	6,41

Tabel 14. DESENTRALISASI FISKAL
(MILYAR)

NO	KOTA	2004	2005	2006	2007	2008
1	PALEMBANG	274,873.0	352,707.0	421,383.0	496,278.0	519,970.0
2	BOGOR	206,383.0	263,199.0	315,167.0	401,578.0	482,373.0
3	SUKABUMI	149,682.0	161,350.0	192,347.0	249,728.0	309,816.0
4	BANDUNG	693,748.0	788,352.0	960,583.0	1,097,176.0	1,302,317.0
5	BEKASI	163,422.0	281,508.0	697,826.0	881,763.0	1,023,754.0
6	DEPOK	196,348.0	223,541.0	358,539.0	421,352.0	487,161.0
7	CIMAHI	153,783.0	186,559.0	308,779.0	358,633.0	406,422.0
8	SURAKARTA	286,438.0	325,984.0	386,749.0	419,765.0	474,521.0
9	SEMARANG	312,983.0	374,785.0	404,571.0	478,936.0	534,672.0
10	YOGYAKARTA	289,769.0	275,739.0	341,687.0	428,319.0	556,159.0
11	MALANG	409,383.0	448,703.0	493,514.0	557,640.0	612,785.0
12	PASURUAN	175,874.0	208,564.0	286,465.0	363,572.0	399,345.0
13	SURABAYA	362,519.0	519,866.0	737,673.0	809,856.0	1,212,765.0
14	DENPASAR	116,893.0	175,652.0	274,473.0	324,553.0	397,547.0
15	BALIKPAPAN	802,321.0	1,106,735.0	1,356,734.0	1,054,648.0	1,197,674.0
16	SAMARINDA	468,357.0	673,503.0	715,976.0	675,302.0	723,431.0
17	MANADO	317,614.0	396,735.0	421,276.0	497,735.0	517,365.0
18	MAKASSAR	448,392.0	473,519.0	516,645.0	789,896,922.0	922,664,630.0
19	PARE-PARE	88,592.0	148,716.0	165,732.0	193,423.0	216,601.0
20	KENDARI	138,958.0	177,869.0	198,364.0	223,421.0	268,723.0
21	GORONTALO	128,503.0	167,921.0	184,536.0	215,541.0	297,122.0
22	AMBON	172,417.0	197,436.0	225,122.0	276,094.0	301,347.0
23	JAYAPURA	225,324.0	384,425.0	492,188.0	581,579.0	684,092.0
24	JAKARTA SELAT	1,296,297,651.0	1,570,208,024.0	1,793,562,428.0	2,203,144,786.0	2,732,136,815.0

Tabel15. PENGANGGURAN
(%)

NO	KOTA	2004	2005	2006	2007	2008
1	PALEMBANG	9,08	8,37	8,56	12,82	9,33
2	BOGOR	10,36	11,18	11,78	11,61	11,04
3	SUKABUMI	7,49	8,04	8,59	8,45	8,21
4	BANDUNG	12,49	13,56	14,83	14,50	11,58
5	BEKASI	10,38	11,81	11,97	12,08	11,23
6	DEPOK	12,54	13,32	12,71	12,83	12,09
7	CIMAHI	9,86	10,16	11,37	10,92	10,19
8	SURAKARTA	7,38	7,54	8,31	8,95	8,28
9	SEMARANG	7,01	7,63	8,12	9,38	8,43
10	YOGYAKARTA	5,62	6,26	7,59	6,25	6,31
11	MALANG	7,33	7,59	8,04	8,15	7,86
12	PASURUAN	6,27	7,04	7,32	7,89	7,13
13	SURABAYA	6,88	7,16	7,91	6,73	3,12
14	DENPASAR	5,36	4,66	5,32	5,78	6,04
15	BALIKPAPAN	6,93	6,02	6,18	8,78	8,87
16	SAMARINDA	7,67	7,59	7,34	8,83	9,03
17	MANADO	10,79	10,91	14,45	14,05	14,62
18	MAKASSAR	17,43	17,81	18,74	18,49	18,03
19	PARE-PARE	6,15	7,09	7,39	7,11	6,97
20	KENDARI	10,30	9,35	8,92	7,42	9,67
21	GORONTALO	10,17	12,29	9,79	9,77	7,62
22	AMBON	12,63	11,67	12,3	15,6	13,72
23	JAYAPURA	6,21	8,00	7,12	7,31	5,83
24	JAKARTA SELATAN	14,31	14,2	14,6	14,18	11,56

Tabel 16. ANGKA KEMISKINAN

NO	KOTA	2004		2005		2006		2007		2008	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	PALEMBANG	12.350	9,04	12.470	8,79	12.590	9,35	12.630	9,23	12.440	8,98
2	BOGOR	75.200	6,87	78.600	7,91	79.300	8,31	89.200	9,64	91.400	9,47
3	SUKABUMI	20.100	6,54	20.800	6,87	21.900	7,09	24.600	8,20	22.600	7,26
4	BANDUNG	81.80	3,06	82.300	3,22	84.600	3,71	95.200	4,09	87.200	3,68
5	BEKASI	69.70	2,8	70.800	3,0	71.500	3,42	104.400	5,07	106.900	4,97
6	DEPOK	36.90	2,51	37.300	2,63	39.600	2,88	35.300	2,48	35.900	2,24
7	CIMAH	48.80	7,98	49.200	8,04	50.800	8,44	42.200	7,41	43.700	7,33
8	SURAKARTA	66.20	11,9	66.400	12	69.100	13,34	77.600	15,21	69.800	13,64
9	SEMARANG	55.93	3,0	56.300	3,2	58.700	4,22	77.800	5,33	77.600	5,26
10	YOGYAKARTA	42.30	9,89	42.500	9,93	44.400	10,50	45.200	10,22	42.900	9,78
11	MALANG	51.10	5,97	51.500	6,01	54.800	7,20	59.400	7,42	56.600	7,19
12	PASURUAN	19.20	11,5	19.400	12	21.800	12,43	23.600	13,71	21.300	12,61
13	SURABAYA	188.60	5,96	190.800	6,92	194.600	7,35	210.800	8,08	203.700	7,98
14	DENPASAR	10.40	1,87	10.990	1,98	11.400	2,16	15.700	2,69	12.300	2,10
15	BALIKPAPAN	15.20	2,9	15.700	3,0	17.300	3,96	18.000	3,69	18.300	3,74
16	SAMARINDA	30.90	5,05	31.800	5,12	33.600	5,78	35.600	6,05	38.200	6,60
17	MANADO	20.40	4,76	20.700	4,92	21.200	5,09	28.100	6,73	23.000	5,43
18	MAKASSAR	72.20	5,81	72.900	5,93	74.300	6,19	88.400	7,22	69.900	5,66
19	PARE-PARE	6.90	6,23	7.300	6,41	7.800	6,70	9.100	7,86	8.800	7,65
20	KENDARI	23.80	9,54	24.600	10,22	25.900	10,65	30.500	12,51	27.500	10,15
21	GORONTALO	14.50	9,42	14.800	9,83	15.200	10,06	15.600	9,87	12.000	8,11
22	AMBON	14.20	5,96	14.700	6,31	15.800	6,56	18.100	7,43	16.800	6,51
23	JAYAPURA	47.80	24	49.300	25	50.200	24,87	54.100	25,69	52.900	25,3
24	JAKARTA SELATAN	65.30	4,61	63.600	3,07	64.000	3,36	76.300	3,74	78.800	4,02

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y2 <--- X1	.146	.129	1.128	.259	
Y2 <--- X2	.405	.130	3.112	.004	
Y1 <--- X2	.234	.076	3.085	.002	
Y1 <--- X1	.320	.076	4.208	***	
Y1 <--- Y2	.142	.054	2.637	.008	
Y3 <--- X2	.264	.131	2.019	.018	
Y3 <--- X1	.004	.135	.030	.976	
Y3 <--- Y1	.442	.152	2.910	.013	
Y3 <--- Y2	.240	.091	2.637	.012	
Y4 <--- Y1	-.072	.147	-.488	.626	
Y4 <--- X1	-.139	.131	-1.064	.287	
Y4 <--- Y2	-.198	.089	-2.224	.021	
Y4 <--- Y3	-.052	.088	-.589	.556	
Y4 <--- X2	-.335	.127	-2.635	.032	
Y5 <--- X2	-.221	.146	-1.513	.130	
Y5 <--- Y3	-.233	.100	-2.332	.020	
Y5 <--- Y4	.262	.103	2.544	.011	
Y5 <--- X1	-.030	.148	-.202	.840	
Y5 <--- Y1	.350	.166	2.110	.035	
Y5 <--- Y2	-.222	.101	-2.197	.031	

CMIN

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	37	13.090	7	.000	1.870
Saturated model	44	.000	0		
Independence model	8	256.187	36	.000	7.116

Baseline Comparisons

Model	NFI Delta1	RFI rho1	IFI Delta2	TLI rho2	CFI
Default model	.859	.276	.883	.981	.968
Saturated model	1.000		1.000		1.000
Independence model	.000	.000	.000	.000	.000

Parsimony-Adjusted Measures

Model	PRATIO	PNFI	PCFI
Default model	.194	.167	.169
Saturated model	.000	.000	.000
Independence model	1.000	.000	.000

NCP

Model	NCP	LO 90	HI 90
Default model	29.090	13.931	51.764
Saturated model	.000	.000	.000
Independence model	220.187	173.108	274.756

FMIN

Model	FMIN	F0	LO 90	HI 90
Default model	.181	.146	.070	.260
Saturated model	.000	.000	.000	.000
Independence model	1.287	1.106	.870	1.381

RMSEA

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	.005	.001	.009	.000
Independence model	.075	.055	.096	.000

AIC

Model	AIC	BCC	BIC	CAIC
Default model	110.090	113.595		
Saturated model	88.000	92.168		
Independence model	272.187	272.945		

ECVI

Model	ECVI	LO 90	HI 90	MECVI
Default model	.553	.477	.667	.571
Saturated model	.442	.442	.442	.463
Independence model	1.368	1.131	1.642	1.372

Intercepts: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y2	3.115	.836	3.728	***	
Y1	1.402	.517	2.710	.007	
Y3	2.827	.884	3.198	.001	
Y4	2.414	.889	2.716	.007	
Y5	-.492	1.034	-.476	.634	

Variances: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
X2	.263	.034	7.727	***	
X1	.266	.034	7.727	***	
error term 2	.533	.069	7.727	***	
error term 1	.183	.024	7.727	***	
error term 3	.503	.065	7.727	***	
error term 4	.469	.061	7.727	***	
error term 5	.598	.077	7.727	***	

Total Effects (Group number 1 - Default model)

	X1	X2	Y2	Y1	Y3	Y4
Y2	.146	.405	0	0	0	0
Y1	.32	.234	.142	0	0	0
Y3	.004	.147	.24	.442	0	0
Y4	-.482	-.335	-.198	-.072	-.052	0
Y5	-.030	-.419	-.222	.35	-.233	.262



Direct Effects (Group number 1 - Default model)

	X1	X2	Y2	Y1	Y3	Y4
Y2	.146	.405	0	0	0	0
Y1	.32	.234	.142	0	0	0
Y3	.004	.134	.24	.442	0	0
Y4	-.69	.208	.109	-.072	-.052	0
Y5	-.012	.22	-.121	.351	.233	.262

Indirect Effects (Group number 1 - Default model)

	X1	X2	Y2	Y1	Y3	Y4
Y2	0	0	0	0	0	0
Y1	0	0	0	0	0	0
Y3	0	.13	0	0	0	0
Y4	.551	-.543	-.307	0	0	0
Y5	-.018	-.441	-.101	-.001	-.466	0